

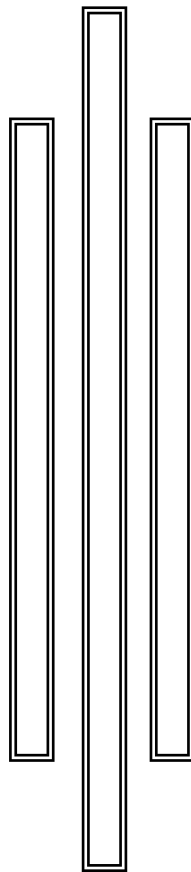


**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019 – 2039**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019 – 2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019 – 2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 93);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 – 2039.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Industri Prioritas Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri Prioritas di Kabupaten.
3. Rencana pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disebut RPIK Sigi 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sigi.
4. Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian di masa yang akan datang.
5. Industri pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
6. Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
7. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Sigi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. industri unggulan Daerah;
- b. RPIK Tahun 2019 – 2039;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah dengan mengacu pada industri Prioritas Nasional dan Provinsi.
- (2) Industri unggulan Daerah diklasifikasikan berdasarkan industri andalan, industri pendukung dan industri hulu.

Pasal 4

Industri unggulan Daerah berdasarkan pengelompokan industri dan klasifikasi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sebagai berikut :

- a. industri andalan merupakan industri pangan yang meliputi :
 - 1) industri pengolahan bahan baku pengolahan makanan, minuman dan cemilan dan/atau keripik bahan baku buah-buahan;
 - 2) industri olahan daging ternak;
 - 3) industri pengolahan bawang goreng;
 - 4) industri bahan baku ikan air tawar;
 - 5) industri pengolahan gula aren; dan
 - 6) industri pengolahan biji kopi.
- b. industri pendukung merupakan industri tekstil, kerajinan, kulit, alas kaki aneka, dan jasa yang meliputi :
 - 1) industri meubel dan anyaman serta barang lainnya dari kayu, rotan dan bambu;
 - 2) industri batako dan batu bata; dan
 - 3) Industri jasa perbengkelan dan alat elektronik.
- c. industri hulu merupakan industri hulu agro yang meliputi :
 - 1) industri pengolahan kelapa terpadu;
 - 2) industri pengolahan kakao;
 - 3) industri pengolahan minyak atsiri; dan
 - 4) industri pengolahan kemiri.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN 2019 – 2039

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2019 – 2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen RPIK Tahun 2019 – 2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPIK Sigi 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Sigi 2019-2039 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Industri unggulan kabupaten memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan Kabupaten skala besar.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK Sigi 2019-2039.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 10

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerahan tenaga kerja sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019 - 2039 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2019 – 2039 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 91, 07/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019 - 2039

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan Pemda untuk mendorong kemajuan industri nasional terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Sigi mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015 - 2035 yaitu "Indonesia menjadi negara industri tangguh" dan melaksanakan misi pemerintah Kabupaten Sigi "Peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan" melalui visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu: terwujudnya industri Kabupaten Sigi yang maju, berbasis pada pengolahan hasil sumberdaya pertanian.

Penyusunan RPIK Sigi 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 118

LAPORAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019 - 2039



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039

DAFTAR ISI	DI-i
DAFTAR TABEL	DT-i
DAFTAR GAMBAR	DG-i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Landasan Hukum	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	8
.....	
2.1 Kondisi Daerah.....	8
2.2 Sumberdaya Industri	52

2.3 Sarana dan Prasarana	67
2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	76
BAB III VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	79
3.1 Visi dan Misi Pembangunan Industri.....	79
3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sigi.....	98
3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sigi.....	98
BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI	
KABUPATEN SIGI.....	104
4.1 Strategi Pembangunan Industri.....	104
4.2 Program Pembangunan Industri.....	108
4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan/Prioritas Kabupaten Sigi.....	108
4.2.2 Penetapan Pembangunan Industri Unggulan/Prioritas.....	112
4.2.3 Program Perwilayahan Industri.....	196
4.2.4 Pembangunan Sumber Daya Industri.....	237
4.2.5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	245
4.2.6 Pemberdayaan Industri.....	250
BAB V PENUTUP	251

DAFTAR TABEL

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039

Tabel 2.1	Luas Kabupaten Sigi menurut Kecamatan Tahun 2017	10
Tabel 2.2	Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2017.....	11
Tabel 2.3	Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2013-2017.....	12
Tabel 2.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030.....	15
Tabel 2.5	Alokasi Lahan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi Hingga 2030.....	17
Tabel 2.6	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi	21
Tabel 2.7	Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Sigi 2010-2030.....	25
Tabel 2.8	Luas Genangan Banjir di Kabupaten Sigi.....	30
Tabel 2.9	Tren Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sigi, Tahun 2010-2017	33

Tabel 2.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Sigi Tahun 2017	34
Tabel 2.11	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2017	35
Tabel 2.12	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sigi Menurut Kecamatan Tahun 2017	36
Tabel 2.13	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Di Kabupaten Sigi, Tahun 2017	37
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017	38
Tabel 2.15	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017 (Persen)	40
Tabel 2.16	Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2017 Kabupaten Sigi.....	41
Tabel 2.17	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sigi Tahun 2012-2016	43
Tabel 2.18	Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017	44
Tabel 2.19	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2017 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Sigi.....	45
Tabel 2.20	PDRB Perkapita ADHK dan ADHB Periode 2013–2017 Kabupaten Sigi.....	46
Tabel 2.21	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi Tahun 2017	54
Tabel 2.22	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2012-2017	56
Tabel 2.23	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2017	58

Tabel 2.24	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017	59
Tabel 2.25	Potensi dan Sebaran Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tengah	60
Tabel 2.26	Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan Kabupaten Sigi Tahun 2017	62
Tabel 2.27	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sigi Tahun, Tahun 2013-2017	64
Tabel 2.28	Jumlah Bank dan Cabangnya Menurut Jenis Bank Di Kabupaten Sigi, Tahun 2017	65
Tabel 2.29	Banyaknya Kejahatan Terhadap Jiwa/Badan dan Harta Benda Menurut jenisnya tahun 2013-2017	66
Tabel 2.30	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kabupaten Sigi Berdasarkan Kondisi Tahun 2013-2017	68
Tabel 2.31	Kondisi Panjang Jalan yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Sigi 2017	69
Tabel 2.32	Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tahun 2017.....	74
Tabel 2.33	Rasio Elektrifikasi Yang Di bawah 50% Kabupaten Sigi Tahun 2017	75
Tabel 2.34	Jumlah Industri Kecil dan Menengah dan Industri Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2017	77
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sigi Tahun 2012-2017	78
Tabel 2.36	Jumlah Industri, Tenaga Kerja dan Investasi di Kabupaten Sigi Tahun 2018	79
Tabel 3.1	Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021	

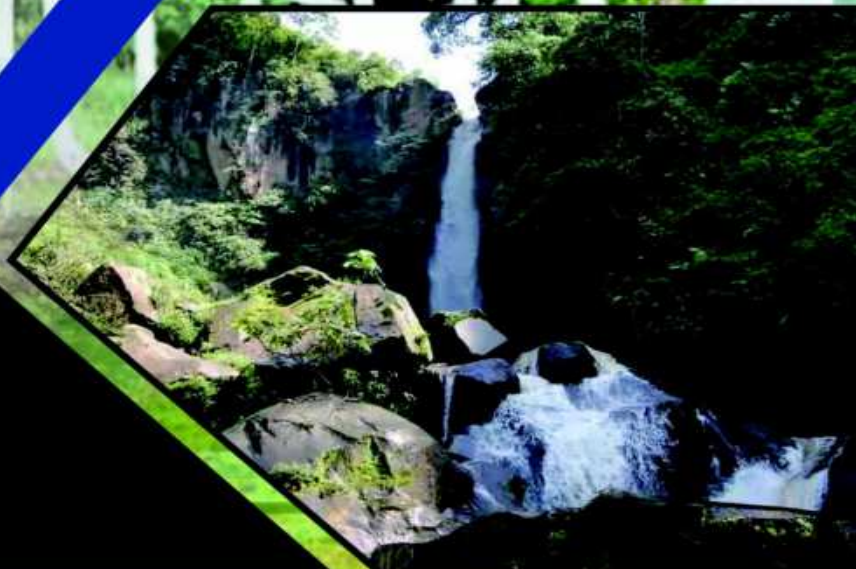
	83
Tabel 3.2	Perumusan Penjelasan Visi Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039
	86
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi dan Misi RPIK Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039
	88
Tabel 3.4	Industri Prioritas Pengembangan WPPI kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi
	92
Tabel 3.5	Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sigi 2019-2039
	99
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi 2019-2039
	106
Tabel 4.2	Faktor-Faktor yang Digunakan Untuk menentukan Industri Prioritas Kabupaten Sigi
	110
Tabel 4.3	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Tanaman Pangan
	113
Tabel 4.4	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Sayuran
	114
Tabel 4.5	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – komoditas Perkebunan
	115
Tabel 4.6	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – komoditas Peternakan
	116
Tabel 4.7	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – komoditas Unggas
	117
Tabel 4.8	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – komoditas Perikanan
	118
Tabel 4.9	Daftar Industri Prioritas Nasional Berdasarkan RIPIN
	119
Tabel 4.10	Industri prioritas Provinsi Sulawesi Tengah.....
	121
Tabel 4.11	Industri Prioritas Kabupaten Sigi
	127

Tabel 4.12	Sasaran dan Strategi Industri Pengolahan Pangan	133
Tabel 4.13	Rencana Aksi Industri Pengolahan Pangan Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	136
Tabel 4.14	Sasaran dan Strategi Industri pengolahan Hulu Agro	156
Tabel 4.15	Rencana Aksi Industri Pengolahan Hulu agro Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	158
Tabel 4.16	Sasaran dan Strategi Industri Mebel dan Kerajinan Kayu, Rotan dan Bambu serta Batako/Batu Merah, tekstil tenun dan batik lokal	156
Tabel 4.17	Rencana Aksi Industri Mebel dan Kerajinan Kayu, Rotan dan Bambu serta Batako/Batu Merah Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	174
Tabel 4.18	Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	199
Tabel 4.19	Lokasi IKM Kecamatan Sigi Biromaru	205
Tabel 4.20	Lokasi IKM Kecamatan Palolo	208
Tabel 4.21	Lokasi IKM Kecamatan Nokilalaki	210
Tabel 4.22	Lokasi IKM Kecamatan Dolo	212
Tabel 4.23	Lokasi IKM Kecamatan Dolo Barat	214
Tabel 4.24	Lokasi IKM Kecamatan Dolo Selatan	216
Tabel 4.25	Lokasi IKM Kecamatan Marawola	218
Tabel 4.26	Lokasi IKM Kecamatan Kinovaro	220
Tabel 4.27	Lokasi IKM Kecamatan Marawola Barat	222
Tabel 4.28	Lokasi IKM Kecamatan Tanambulava	224
Tabel 4.29	Lokasi IKM Kecamatan Gumbasa	226

Tabel 4.30	Lokasi IKM Kecamatan Kulawi	228
Tabel 4.31	Lokasi IKM Kecamatan Lindu	230
Tabel 4.32	Lokasi IKM Kecamatan Kulawi Selatan	232
Tabel 4.33	Lokasi IKM Kecamatan Pipikoro	234
Tabel 4.34	Program Pembangunan SDM Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	237
Tabel 4.35	Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	239
Tabel 4.36	Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri Prioritas Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	241
Tabel 4.37	Program Pembiayaan Pengembangan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	243
Tabel 4.38	Program Penyediaan Energi Listrik Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	244
Tabel 4.39	Program Penyediaan Lahan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	245
Tabel 4.40	Program Penyediaan Sumberdaya Air, telekomunikasi dan Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	246
Tabel 4.41	Program Penerapan Sistem Informasi Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039	248

DAFTAR GAMBAR

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039



Gambar 1.1 Hubungan Antar Perencanaan Industri.....	3
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Dalam Kabupaten Sigi.....	9
Gambar 2.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi.....	9
Gambar 2.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sulteng Tahun 2017	41
Gambar 2.4 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Sulteng Tahun 2017	46
Gambar 2.5 Persentase Masyarakat Miskin Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2013-2017	

.....	48
Gambar 2.6 Perbandingan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017	49
.....	49
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sigi, Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2013-2017	51
.....	51
Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017.....	51
.....	51
Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017	53
.....	53
Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sigi dan Kab/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017	54
.....	54
Gambar 2.11 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017	57
.....	57
Gambar 2.12 Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum Kabupaten Sigi Tahun 2017	62
.....	62
Gambar 2.13 Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Sigi Tahun 2017	63
.....	63
Gambar 2.14 Jaringan Irigasi Kabupaten Sigi Menurut Kecamatan, Tahun 2017.....	70
.....	70
Gambar 2.15 Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Kabupaten Sigi Tahun 2012-2016	71
.....	71
Gambar 2.16 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam) Di Kabupaten Sigi, Tahun 2013-2017	72
.....	72

Gambar 2.17 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Sigi Tahun 2017	73
Gambar 2.18 Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017	74
Gambar 3.1 Peta Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Sigi.....	95
Gambar 3.2 Pentahapan Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039.....	102
Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Prioritas Kabupaten Sigi.....	109
Gambar 4.2 Bangun Industri Kabupaten Sigi.....	127
Gambar 4.3 Lokasi KPI Kabupaten Sigi.....	204
Gambar 4.4 Lokasi KPI Kecamatan Sigi Biromaru.....	207
Gambar 4.5 Lokasi KPI Kecamatan Palolo.....	209
Gambar 4.6 Lokasi KPI Kecamatan Nokilalaki.....	211
Gambar 4.7 Lokasi KPI Kecamatan Dolo	213
Gambar 4.8 Lokasi KPI Kecamatan Dolo Barat.....	215
Gambar 4.9 Lokasi KPI Kecamatan Dolo Selatan.....	217
Gambar 4.10 Lokasi KPI Kecamatan Marawola.....	219
Gambar 4.11 Lokasi KPI Kecamatan Kinovaro	221

Gambar 4.12Lokasi KPI Kecamatan Marawola Barat	223
Gambar 4.13Lokasi KPI Kecamatan Tanambulava	225
Gambar 4.14Lokasi KPI Kecamatan Gumbas	227
Gambar 4.15Lokasi KPI Kecamatan Kulawi.....	229
Gambar 4.16Lokasi KPI Kecamatan Lindu	231
Gambar 4.17Lokasi KPI Kecamatan Kulawi Selatan	233
Gambar 4.17Lokasi KPI Kecamatan Pipikoro	235

BAB 1

PENDAHULUAN

**RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)
KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019 - 2039**



1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini, isu utama, urgen dan kekinian berkaitan dengan permasalahan pembangunan di sektor perindustrian adalah bagaimana mengatasi dan mengurai permasalahan pembangunan industri seperti masih lemahnya daya saing industri nasional dan daerah, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri baik nasional maupun daerah termasuk Industri kecil menengah (IKM). Struktur perindustrian saat ini masih terfokus pada industri ekstraktif yang outputnya masih berupa barang setengah jadi sehingga nilai tambah yang didapat baik daerah maupun nasional belum maksimal, pada industri kecil menengah juga banyak gulung tikar akibat arus barang murah masuk tidak terfilterisasi dengan baik, kemudian suku bunga yang masih cukup tinggi membuat pelaku IKM terkendala dalam segi permodalan, sehingga wajar saat ini jika sektor pertanian masih menjadi sektor yang memberi kontribusi paling tinggi dalam struktur perekonomian daerah maupun nasional. Sektor perindustrian harus di dorong oleh pemerintah karena salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu bergesernya

perekonomian dari sektor tradisional atau pertanian ke sektor modern atau industri.

Alternatif solusi dalam rangka meningkatkan sinergitas secara komprehensif Pembangunan Industri antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah, melalui Kementerian Perindustrian RI yang telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 sebagai amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian. Sedangkan setiap Gubernur/Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)/ Kabupaten/Kota (RPIK) sesuai amanat pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.

Dokumen perencanaan RPIK harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta di susun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.

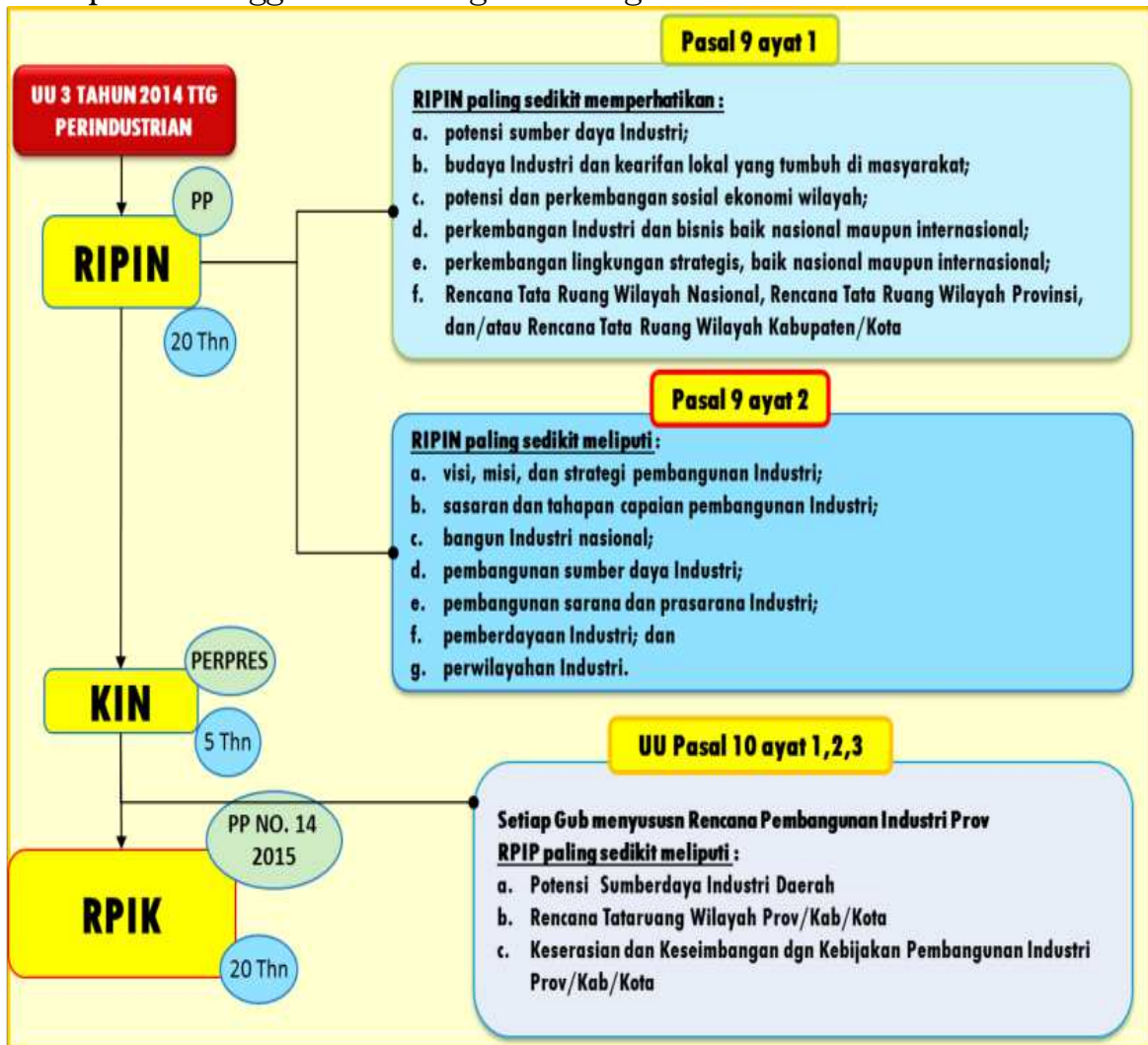
Sebagai konsekuensi logis, Pemerintah Kabupaten Sigi pada tahun 2018 akan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan industri berupa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sigi yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah 2017-2037, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk mewujudkan Visi Pembangunan Industri Nasional yaitu Indonesia ***Menjadi Negara Industri Tangguh***.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional dan daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri daerah yang sistematis, komprehensif dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Sigi 2019-2039.

RPIK Sigi disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sigi, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pembangunan industri masa depan, lebih di prioritaskan melalui pembangunan industri hijau (green industry) antara lain melalui regulasi pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan. Untuk itu, RPIK

Sigi sangat dibutuhkan untuk disusun sebagai rencana induk yang mengintegrasikan seluruh rencana pengembangan industri di wilayah Kabupaten Sigi mengingat Kabupaten Sigi termasuk kedalam kawasan hutan lindung. Dalam RIPIN 2015-2035 Kabupaten Sigi tidak termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, namun termasuk dalam satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Kota Palu bersama Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Perencanaan Industri

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Adapun maksud dari RPIK Sigi Tahun 2019-2039 adalah menyusun pedoman yang dapat dijadikan acuan pembangunan industri di Kabupaten Sigi hingga tahun 2039 yang mampu mengintegrasikan

kepentingan para *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sigi Tahun 2019-2039 adalah;

1. Merumuskan arah Kebijakan dan strategi pembangunan industri Kabupaten Sigi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037 Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-3035 dan Kebijakan Industri Nasional (KIN).
2. Merumuskan indikasi program dan pentahapan perencanaan pembangunan industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039.

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan RPIK Sigi Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut :

1. Perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan industri Sigi;
2. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri Kabupaten Sigi, serta indikasi program dan pentahapannya mencakup penyiapan, penumbuhan, penguatan dan pemantapan pembangunan industri.

1.3 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sigi Tahun 2019-2039 berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4873);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah di evaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2017-2037;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 Tahun 2015 tentang OTK Kemenperin;
18. Permenperin Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2016 – 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPIK harus mengacu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sesuai dengan aturan tersebut RPIK Sigi tahun 2019-2039 disusun dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Gambaran umum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Sigi Tahun 2019-2039 dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Kabupaten.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.3. Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri

2.1 Kondisi Daerah

Menguraikan kondisi daerah yang terkait dengan sektor industri secara kuantitatif meliputi aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri lima tahun terakhir.

2.2 Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

2.3 Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

2.4 Kondisi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Sigi

Sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

BAB 3 Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Merumuskan visi misi RPIK yang mengacu pada visi Misi RPIN, RPIP dan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Sigi.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri.

BAB 4 Strategi Dan Program Pembangunan Industri Kabupaten

4.1. Strategi Pembangunan Regional

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif. Menjelaskan tentang pembagian wilayah klaster pembangunan berdasarkan pada potensi dan fungsi kewilayahan.

4.2. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Perwilayahan Industri
3. Pembangunan Sumber Daya Industri
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5. Pemberdayaan Industri

BAB 5 PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Kabupaten Sigi.

BAB 2

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019-2039



2.1 KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Sigi

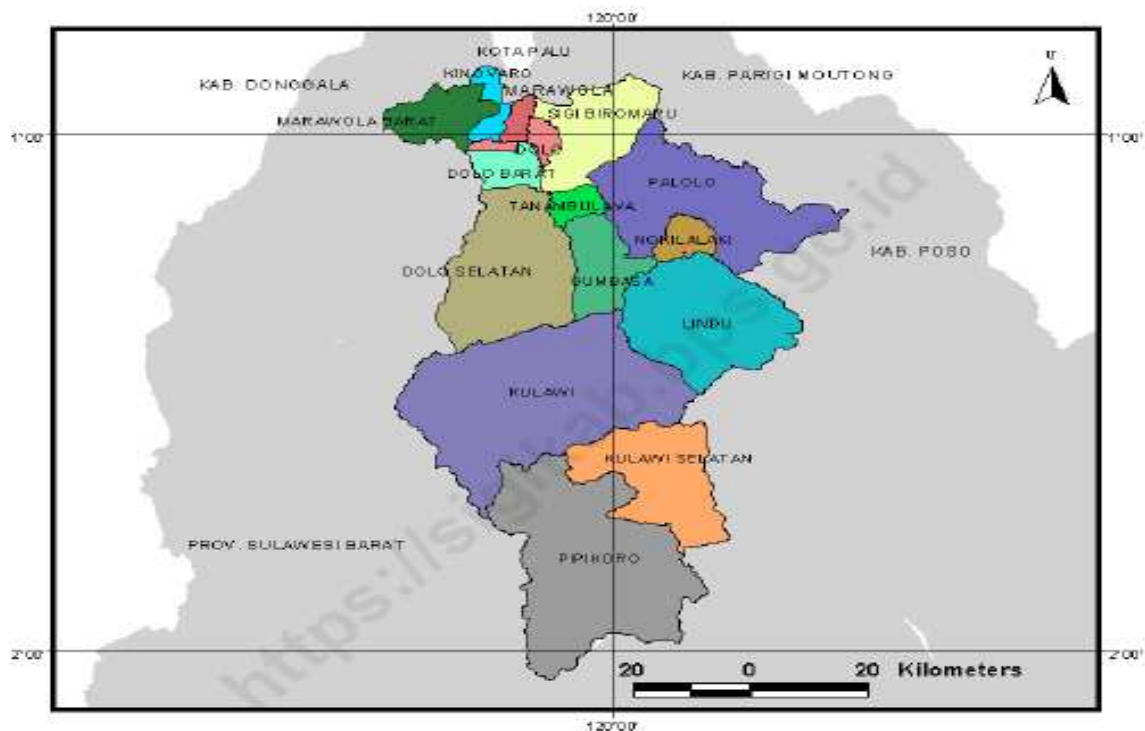
Wilayah Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi memiliki wilayah geografis terbentang pada koordinat 0°52' 16" - 2°03' 21" Lintang Selatan dan 119°38' 25" - 120°21'24" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Sigi adalah 5.196,02 Km² atau sekitar 8,40 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sigi berbatasan dengan beberapa daerah lainnya adalah:

- Sebelas utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat

➤ Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

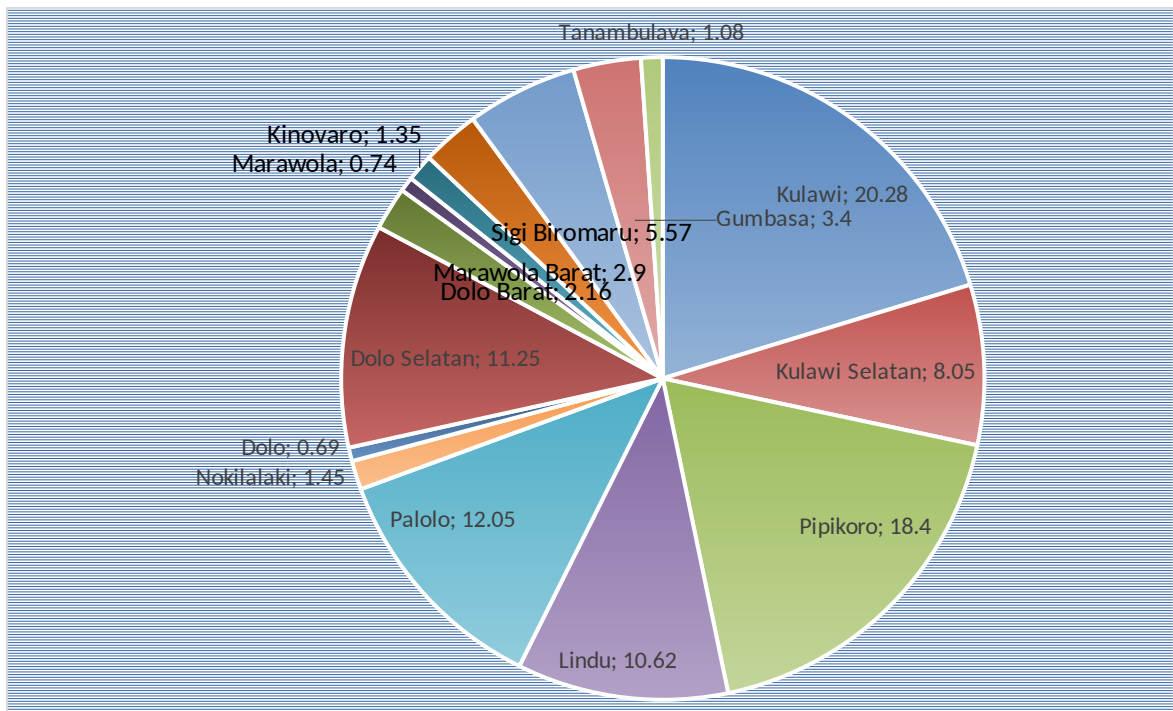
Secara administratif pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 15 kecamatan yang seluruhnya terletak disekeliling garis khatulistiwa, dengan 176 desa dan 1 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), persentase luas wilayah Kabupaten Sigi berdasarkan kecamatan tersaji pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Dalam Kabupaten Sigi



Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2018

Gambar 2.2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sigi



Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data proporsi wilayah terluas di Kabupaten Sigi adalah Kecamatan Kulawi dengan luas 1,053.56 atau sebesar 20,28 persen dari total wilayah kabupaten, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Dolo hanya 0,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Sigi atau seluas 36,05 Km². Secara lengkap data luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Sigi tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Luas Kabupaten Sigi menurut Kecamatan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kulawi	1,053.56	20.28
2.	Kulawi Selatan	418.12	8.05
3.	Pipikoro	956.13	18.40
4.	Lindu	552.03	10.62
5.	Palolo	626.09	12.05
6.	Nokilalaki	75.19	1.45
7.	Dolo	36.05	0.69

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
8.	Dolo Selatan	584.71	11.25
9.	Dolo Barat	112.18	2.16
10.	Marawola	38.65	0.74
11.	Kinovaro	70.38	1.35
12.	Marawola Barat	150.51	2.90
13.	Sigi Biromaru	289.60	5.57
14.	Gumbasa	176.49	3.40
15.	Tanambulava	56.33	1.08
Kabupaten Sigi 2016		5,196.02	100.00

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2018

B. Kondisi Geografis

Kabupaten Sigi terletak antara 0° 52' 16" LS – 2° 03' 21" LS dan 119° 38' 45" BT–120° 21' 24" BT yang terdiri atas dataran, hutan dan lembah pegunungan, sehingga dapat dipetakan menjadi dua kawasan yakni: wilayah lembah dan pegunungan. Wilayah dataran atau lembah meliputi 7 (tujuh) kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah lembah yaitu Kecamatan Marawola, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Gumbasa dan Kecamatan Tanambulawa. Sedangkan kecamatan berada di wilayah pegunungan yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu: Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Palolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Marawola Barat dan Kecamatan Kinovaro.

C. Kondisi Topografi

Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan kawasan pegunungan dan perbukitan, dengan ketinggian wilayah umumnya berada antara 60 meter sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan tanah/lereng antara datar sampai sangat curam. Kondisi topografis tersebut mempengaruhi wilayah permukiman desa dimana dari 176 desa sebagian besar berada di daerah dataran dan pegunungan.

Tabel 2.2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan dan Jarak Ibukota
Kecamatan Di Kabupaten Sigi Tahun 2017

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota kabupaten (Km)
1.	Kulawi	Bolapapu	16	62
2.	Kulawi Selatan	Lawua	12	96
3.	Pipikoro	Peana	19	123
4.	Lindu	Tomado	5	89
5.	Palolo	Makmur	22	25
6.	Nokilalaki	Kamarora A	5	35
7.	Dolo	Kota Pulu	11	7
8.	Dolo Selatan	Bulubete	12	12
9.	Dolo Barat	Kaleke	12	7
10.	Marawola	Binangga	11	18
11.	Kinovaro	Porame	10	20
12.	Marawola Barat	Dombu	12	33
13.	Sigi Biromaru	Mpanau	18	14
14.	Gumbasa	Pakuli	7	32
15.	Tanambulava	Sibalaya Utara	5	17
Jumlah Desa			177	-

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2018

D. Kondisi Klimatologi

Suhu udara di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya wilayah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Dengan kondisi wilayah yang berada tepat di garis khatulistiwa, menjadikan wilayah Kabupaten Sigi memiliki suhu udara yang cukup panas. Berdasarkan hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, sepanjang tahun 2016, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Maret yakni 29,2 °C dan terendah pada bulan Juli

dengan suhu 27,7 °C. Sedangkan rata-rata kelembaban udara pada tahun 2016 mencapai 28,8 persen.

Selama tahun 2016, intensitas curah hujan beragam setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 280 mm, sedangkan terendah terjadi di bulan Desember sekitar 31,4 mm. Penyinaran matahari tertinggi sekitar 83,3 persen terjadi di bulan Maret. Sementara itu, arah angin terbanyak selama tahun 2016 yaitu dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata berkisar 5,3 knots. Ditahun berikutnya rata-rata suhu udara mencapai 28,3 °C, kemudian tekanan udara 1.011,10 mb, kelembaban udara sebesar 75%, kemudian penyinaran matahari 59%, dan curah hujan 32 mm, serta kecepatan angin 4 knts, dan terakhir arah angin berasal dari barat laut.

Tabel 2.3
Rata-Rata Parameter Cuaca Stasiun Meteorologi
Mutiara Palu Tahun 2013-2017

No	Parameter Iklim	Satuan	Rata-rata Per Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Suhu Udara	°C	27,65	26,66	29,49	28,8	28,3
	<i>Temperature</i>						
2	Tekanan Udara	mb	10.010,18	1.011,07	1.010,05	1.012,50	1.011,10
	<i>Air Pressure</i>						
3	Kelembaban Udara	%	76,42	77,56	68,39	75,2	75
	<i>Humidity</i>						
4	Penyinaran Matahari	%	57,38	63,48	72,9	73,4	59
	<i>Length of Daylight</i>						
5	Curah hujan	mm	62,33	58,76	64,6	251,1	32
	<i>Rain Falls</i>						
6	Kecepatan Angin	Knots	3,57	3,92	14,39	5,3	4
	<i>Wind Velocity</i>						
7	Arah Angin		Utara	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut
	<i>The Most of Wind Velocity</i>						

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2014-2018, diolah kembali

E. Penggunaan Lahan

Pola ruang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Kawasan Non Budidaya dan Kawasan Budidaya. Kawasan Non Budidaya atau yang lebih dikenal sebagai Kawasan Lindung merupakan wilayah kendala dan wilayah limitasi dalam pemanfaatan ruang. Kawasan Lindung ini kemudian digolongkan lagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009, Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas:

- a) kawasan hutan lindung;
- b) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- c) kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan

- perlindungan terhadap air tanah; dan
- g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Terkait dengan Kabupaten Sigi pola ruang kawasan lindung terdiri atas hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana alam (banjir dan longsor), kawasan rawan bencana geologi (zona patahan).

Sementara itu, untuk kawasan budidaya didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan yang terdiri dari:

- a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- b) kawasan hutan rakyat;
- c) kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;
- d) kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- e) kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: perikanan tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan ikan;
- f) kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;
- g) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
- h) kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- i) kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman

perdesaan sebagai kawasan budi daya, maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya; dan

j) kawasan peruntukan lainnya.

Kabupaten Sigi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kawasan hutan lebih dari 70 persen luas wilayah, baik berupa kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional. Selain itu, Kabupaten Sigi merupakan wilayah hulu dari WS Palu Lariang yang memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi bagi PKN Palu.

Sedangkan pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sigi diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang tidak hanya mengedepankan pada fungsi produksi tetapi juga pengolahan pasca panen, sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat petani. Alokasi lahan pertanian di Kabupaten Sigi tersebar pada beberapa kecamatan, terutama yang berada di sepanjang Sungai Gumbasa. Sedangkan kawasan perkotaan masih mengumpul pada wilayah utara Kabupaten Sigi, sedangkan wilayah perdesaan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi. Adapun gambaran pola ruang di Kabupaten Sigi secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Persentase (%)
Kawasan Lindung		268.837,60	51,74
1	Hutan Lindung	136.910,91	26,35
2	Kawasan Tahura dan Hutan Wisata Wera	3.114,45	0,60
3	Kawasan Taman Nasional Lore Lindu	112.792,08	21,71
4	Kawasan Lindung Setempat	12.561,41	2,42
5	Tubuh Air	3.458,75	0,67
Kawasan Budidaya		250.764,4	48,26

No	Rencana Pola Ruang	Luas	Persentase (%)
		0	
1	Hutan Produksi	3.118,27	0,60
2	Hutan Produksi Terbatas	123.787,00	23,82
3	Kawasan Pertambangan	7.950,00	1,53
4	Kawasan Pertanian Lahan Basah	23.697,00	4,56
5	Kawasan Pertanian Lahan Kering	20.452,67	3,94
6	Kawasan Perkebunan	55.718,95	10,72
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	10.418,00	2,00
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	4.740,00	0,91
9	Kawasan Pariwisata	882,51	0,17
	Jumlah	519.602,00	100,00

Sumber : Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

F. Potensi pengembangan wilayah

f1. Kawasan Lindung

Tujuan penetapan Kawasan lindung Kabupaten adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Adapun kriteria yang dipakai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, UU Nomor 26 Tahun 2007 dan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Mengacu pada hasil analisis dan arahan pola ruang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan 50,48 persen dari luas lahan Kabupaten Sigi sebagai kawasan berfungsi lindung, maka Pola Ruang Lindung di Kabupaten Sigi minimal adalah 50 persen dari luas Kabupaten Sigi. Namun, berdasarkan hasil kajian ternyata masih terdapat kawasan lindung yang dapat ditambah dalam rencana pola ruang kawasan lindung yaitu kawasan lindung bencana geologis berupa kawasan lindung setempat yang dalam Dokumen RTRW Provinsi belum dialokasikan. Berdasarkan penambahan kawasan lindung setempat bencana geologi total luas kawasan lindung di Kabupaten Sigi dapat menjadi 52,12 persen, dengan rincian sebagai berikut:

f.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.

a. Kawasan Hutan Lindung

Dasar pertimbangan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sigi adalah UU Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, dan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 20013-2033. Sebagaimana arahan RTRW Provinsi luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi adalah sebesar 26,35 persen dan luas wilayah Kabupaten Sigi. Kriteria penetapan kawasan hutan lindung adalah:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menurut surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/11/1980 ;
2. Kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih ;
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Penentuan luas lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan lindung menggunakan acuan RTRW Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu seluas 136.910,91 Ha. Sebaran Hutan Lindung di Kabupaten Sigi tersebar pada 10 Kecamatan di Kabupaten Sigi. Kecamatan Kulawi adalah Kecamatan dengan luas hutan lindung paling besar yaitu Kecamatan Kulawi sebesar 38.306,09 Ha, sedangkan Kecamatan Kulawi Selatan adalah kecamatan yang memiliki luas hutan lindung paling kecil, gambaran selengkapnya Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5.

Alokasi Lahan Hutan Lindung di Kabupaten Sigi Hingga 2030

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pipikoro	19.659,86	14,00
2.	Kulawi Selatan	110,11	0,00
3.	Kulawi	38.306,09	26,00
4.	Dolo Selatan	28.498,34	21,00

5.	Marawola Barat	9.585,40	7,00
6.	Kinovaro	3.668,37	3,00
7.	Palolo	20.837,18	15,00
8.	Dolo Barat	10.034,15	7,00
9.	Sigi Biromaru	5.967.65	4,00
10.	Marawola	243,76	0,00
	Jumlah	136.910,9	
		1	

Sumber : Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

b. Kawasan Resapan Air (Catchment Area)

Sebagian besar kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan resapan air merupakan bagian dari Hutan Lindung atau Suaka Alam, dengan fungsi untuk menampung air yang jatuh dan meresap ke dalam tanah dan menahan tanah dari laju erosi. Arahan pengelolaan kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan atau bahkan meniadakan hal-hal yang berpotensi menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah. Dengan demikian, kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
2. Mengarahkan kegiatan budidaya penduduk dalam bentuk pengusahaan tanaman tahunan dan tanaman semusim yang disertai dengan upaya-upaya pelestarian berkelanjutan. Kegiatan budidaya lain yang dapat dikembangkan adalah pengusahaan hutan produksi terbatas dan pengembangan agrowisata.

f1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan Sungai dan area sekitar danau/waduk.

a. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia

yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi. Mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi adalah wilayah dengan karakter perdesaan dan tidak bertanggung, dan dengan luas daerah aliran sungai >500 km², maka penetapan garis sempadan sungai ditetapkan adalah sebesar 50-100 m (Permen PU Nomor 63/1993). Wilayah sempadan sungai di Kabupaten Sigi tersebar secara merata di seluruh wilayah. Sungai Orde 1 yaitu Sungai Gumbasa dan Sungai Lariang direncanakan memiliki sempadan sungai hingga 100 meter. Sedangkan sungai lainnya yang memiliki orde lebih kecil direncanakan memiliki sempadan sungai selebar 50 meter dari tepi sungai yang ditetapkan.

b. Sempadan Danau/Waduk

Kawasan sekitar danau adalah kawasan di tepian danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Tujuan perlindungan tepian danau adalah untuk melindungi danau dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air danau, mengamankan kuantitas air danau dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran danau. Kawasan sekitar danau yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sekitar danau antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi, kayu putih, kemiri, dan coklat.

Untuk mengantisipasi dampak buruk dan tidak terkendalinya pola ruang di kawasan sekitar Danau Lindu, maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu segera melakukan tindakan untuk mengamankan kawasan sempadan danau dari aktivitas budidaya. Masyarakat masih dapat

menggunakan kawasan sekitar sempadan danau hanya untuk aktivitas budidaya perkebunan tanaman keras. Upaya penertiban kawasan sekitar danau agar tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Upaya penertiban ini tentu saja harus berkoordinasi dengan BB TNLL selaku pengelola utama kawasan Taman Nasional Lore Lindu, mengingat kawasan Danau Lindu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.

f.1.3 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

a. Taman Nasional Lore Lindu

Kabupaten Sigi memiliki peran strategis secara nasional dengan ditetapkannya kawasan sekitar Danau Lindu sebagai Taman Nasional Lore Lindu. Kawasan Taman Nasional ini tersebar di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso. Kawasan Taman Nasional Lore Lindu sendiri memiliki luas sebesar 217.991,18 Ha. Sedangkan yang berada di Kabupaten Sigi seluas lebih kurang 122.435,37 Ha atau lebih dari 50 persen wilayah TN Lore Lindu berada di Kabupaten Sigi. Sebagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 464/kpts-II/99 dan ditetapkan pula dalam PP Nomor 26 Tahun 2008, maka pengelolaan Taman Nasional berada pada kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan.

Adapun sebaran lokasi Taman Nasional di Kabupaten Sigi mencakup Kecamatan Palolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Lindu, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Kulawi, dan Kecamatan Kulawi selatan.

b. Taman Hutan Raya Dan Hutan Wisata

Terdapat dua buah Hutan Wisata di Kabupaten Sigi yang terletak di Kecamatan Dolo (Hutan Wisata Wera) dan Taman Hutan Raya di Kecamatan Sigi Biromaru yang merupakan satu kesatuan dengan Tahura di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Keberadaan Taman Hutan Raya dan Hutan Wisata ini perlu terus dipertahankan sebagai salah satu upaya dalam rangka perlindungan kekayaan alam di Kabupaten Sigi. Daya tarik

utama dari keberadaan hutan wisata ini adalah keindahan alam dan juga jenis tanaman hutan tropis yang terdapat di dalamnya. Keberadaan pengelolaan kawasan seperti Hutan Wisata Wera berperan penting dalam mewujudkan keseimbangan hidup semua makhluk hidup, penanganan yang disertai tindakan yang kurang tepat dalam pengelolaan mengakibatkan berkurangnya nilai dan fungsi kawasan serta kelangkaan hingga musnahnya jenis flora dan fauna.

c. Kawasan Cagar Budaya (Permukiman Tradisional)

Salah satu bentuk permukiman tradisional yang terdapat di Kecamatan Kulawi adalah bangunan perumahan yang biasa disebut Lobo. Lobo di masa pemerintahan raja-raja berfungsi sebagai pusat kesatuan adat, pemerintahan dan kebudayaan. Para bangsawan (maradika) sebagai pemegang tampuk pemerintahan, para ahli cendekiawan adat dan orang-orang penting mengadakan musyawarah di dalam bangunan ini untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan:

1. Perumusan suatu undang-undang, peraturan-peraturan adat;
2. Pelaksanaan pemerintahan yaitu dalam hal-hal memberangkatkan dan menerima pasukan perang;
3. Pemutusan/mengadili perkara-perkara terhadap setiap pelanggaran, penyelewengan dan kejahatan. Pelaksanaan hukuman dapat dilaksanakan di Lobo atau di tempat lain misalnya di pohon kayu ditengah hutan atau di pinggir-pinggir kali, menurut jenis dan macamnya perbuatan;
4. Dalam hal-hal yang menyangkut perekonomian: kapan dimulai membuka kebun, sawah atau ladang; kapan dimulai bertanam, menuai, pengaturan perairan, dan sebagainya;
5. Di samping hal-hal tersebut Lobo juga menjadi tempat dilaksanakannya pesta-pesta adat, sehubungan dengan :
 - a. Keselamatan kampung, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit menular, bala serta kutukan dewa akibat adanya perbuatan sumbang ;
 - b. Pengucapan syukur berhubungan dengan hasil panen yang baik;
 - c. Menyambut/memberangkatkan pasukan perang;
 - d. Menyambut tamu-tamu terhormat dari luar daerah.

Kawasan-kawasan yang memiliki permukiman tradisional di Kabupaten Sigi yang perlu dilakukan tindakan preservasi antara lain: Desa Namo, Desa Boladangko, Desa Tangkolowi dan Desa Toro.

F2. Kawasan Budidaya

f2.1 Kawasan Peruntukkan Hutan

Kawasan budidaya kehutanan terbagi menjadi atas hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, ekspor dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil perhitungan dengan perangkat lunak GIS luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi lebih kurang sebesar 123.787 Ha.

Pengelolaan terhadap kawasan hutan produksi terbatas dilakukan untuk memanfaatkan ruang beserta sumberdaya hutan, dengan cara tebang pilih dan tanam untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman. Persebaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi mencakup wilayah Kecamatan Marawola Barat, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Pipikoro.

Tabel 2.6

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Sigi

No	Kecamatan	Luas	%
1.	Marawola Barat	4.735,22	4
2.	Palolo	4.155,91	3
3.	Kulawi	40.055,71	32
4.	Pipikoro	68.171,20	55
5.	Kulawi Selatan	6.668,98	5
Jumlah		123.787,0	2

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap dimana eksploitasinya dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan pada dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan Penetapan Tata Guna Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 116.393Ha. Persebaran hutan produksi tetap di Kabupaten Sigi berada di Kecamatan Kulawi dan Kulawi Selatan.

f2.2 Kawasan Peruntukkan Pertanian

a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah, yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Gumbasa, Sigi Biromaru, Tanambulava, dan Dolo, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kawasan pengembangan pertanian lahan basah diarahkan pada desa-desa berlokasi di Kecamatan-kecamatan tersebut di atas dengan alokasi lahan untuk 20 tahun mendatang seluas 23.697,00 Ha.

Pengembangan budidaya usahatani merupakan usaha budidaya integral, dan bersifat universal, dimana memandang kawasan sebagai titik sentral pembangunan komoditas dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sumberdaya lahan. Dalam pelaksanaan untuk pengembangan budidaya usahatani, perlu untuk memperhatikan

faktor usahatani sebagaimana dinyatakan dalam Fadholi (1996), antara lain adalah:

1. tanah atau sumberdaya lahan ;
2. tenaga kerja ;
3. modal usaha ;
4. pengelolaan usaha tani.

Tanah sebagai sumber unsur utama usahatani, sebagai tempat tumbuhnya vegetasi, tentu saja harus memiliki suatu ukuran yang nyata sehingga akan dicapai suatu ukuran tingkat optimalisasi pertumbuhan tanaman untuk menghasilkan suatu produk. Untuk menilai keberhasilan tumbuh, suatu bentang lahan harus dilihat dari unsur internal tanah maupun unsur pendukung agroklimatik. Ukuran internal tanah antara lain:

1. kesuburan tanah ;
2. luas pertanian utama (komoditas unggulan) ;
3. luas pertanian tanaman penyangga.

Kesuburan tanah yang mencukupi dan luas tanah yang memadai dapat diprediksikan produksi dari bentangan lahan yang diolah, untuk menilai kesuburan tidak dapat dilepaskan dari kesesuaian tanaman atas sumberdaya lahan yang tersedia.

Faktor sumberdaya manusia berdasarkan kemampuan dan keahlian adalah merupakan program yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tenaga kerja dalam sektor pertanian. Dalam konteks pengembangan budidaya pertanian, maka tenaga kerja yang dimaksud adalah masyarakat lokal yang sudah dibina dan dilatih untuk menggarap lahan yang tersedia. Faktor modal kerja bagi petani merupakan penghambat utama, maka diperlukan adanya campur tangan dari pemerintah sebagai fasilitator membuka akses pasar baik untuk komoditas penyangga, maupun komoditas unggulan. Faktor pengelolaan usaha tani, tentunya perlu dimiliki oleh petani dari mulai perencanaan usahatani sampai pasca panen. Dengan demikian, daya saing usaha taninya akan kompetitif. Unsur teknologi menjadi signifikan untuk dimengerti oleh petani, utamanya untuk jenis usahatani skala besar, sebagai contohnya adalah budidaya padi sawah. Sementara itu, di samping pengembangan kemitraan, upaya membina usahatani di tingkat rakyat perlu dilakukan.

Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

- (1) Dapat dilakukan melalui sistem penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani ;
- (2) Pengelolaan pertanian lahan basah di Kabupaten Sigi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor di bawah ini, yaitu:
 - a. Faktor-faktor sosio-ekonomis:
 1. Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas ;
 2. Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk kredit/sarana produksi dan penyuluhan.
 - b. Usaha-usaha produksi:
 1. Tanaman semusim yang dapat dikembangkan, antara lain: padi-padian ;
 2. Pengaturan jadwal tanam.
 - c. Rumah tangga petani:
 1. Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dimiliki rumah tangga petani ;
 2. Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan ;
 3. Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan kebun dan pemanfaatan limbah ternak sebagai bagian dalam pengembangan sumber energi serta pupuk organik dan pestisida organik yang telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanah serta memiliki biaya produksi yang lebih murah.

b. Peruntukkan Pertanian Lahan Kering

Dalam merencanakan peruntukkan lahan untuk kawasan budidaya pertanian lahan kering, maka prinsip pengembangan yang digunakan juga relatif sama dengan perencanaan untuk kawasan pertanian lahan basah, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan untuk komoditi pertanian lahan kering, kondisi topografi dan pengairan, status lahan, dan bukan merupakan bagian dari kawasan lindung.

Kawasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering memiliki juga memiliki kemungkinan pengembangan menjadi Kawasan Perkebunan, khususnya untuk kebun buah-buahan. Hal ini disebabkan karena kawasan perkebunan memiliki kesesuaian lahan yang hampir sama dengan pertanian lahan kering.

Walaupun lahan yang dialokasikan untuk pertanian lahan kering dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan, akan tetapi prioritas penggunaan lahan tetap merupakan alokasi lahan untuk Pertanian Lahan Kering. Berdasarkan pada arahan RTRW Provinsi alokasi lahan untuk pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebesar lebih kurang 16 ribu Ha. Tetapi dengan melihat ketersediaan lahan yang ada, pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi dapat dikembangkan hingga 20.452,67 Ha yang tersebar secara merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Sigi.

Adapun arahan pengembangan usaha masyarakat pertanian lahan kering di Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan ekstensifikasi pertanian dilakukan pada lahan-lahan yang terdapat di zona wilayah dataran tinggi dan dataran rendah dan dapat diintegrasikan dengan pengembangan tanaman perkebunan ;
- (2) Intensifikasi lahan pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan, terutama untuk desa-desa yang basis kegiatan usaha masyarakatnya adalah petani ;
- (3) Faktor-faktor pengelolaan usaha masyarakat lahan kering di Kabupaten Sigi yang harus dipertimbangkan, yaitu:
 - a. Faktor-faktor sosio-ekonomis:
 1. Memberikan kemudahan pemasaran, baik dalam bentuk pemasaran lokal dan eksternal, pedagang dan koperasi, dan aksesibilitas ;
 2. Memberikan kemudahan jasa-jasa pendukung, baik dalam bentuk kredit/sarana produksi dan penyuluhan ;
 3. Pemerintah dapat memberikan kebijakan insentif dan beberapa peraturan yang mendorong berkembangnya kegiatan usaha tani.
 - b. Usaha-usaha produksi:

1. Vegetasi tetap yang dapat dikembangkan, antara lain: pohon penghasil pakan, pohon buah-buahan, tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis ;
 2. Tanaman semusim/tahunan yang dapat dikembangkan antara lain: padi-padian, umbi-umbian, sayur-sayur/jamur, tanaman palawija.
- c. Rumah tangga petani:
1. Pembinaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan yang dimiliki rumah tangga petani.
 2. Pengembangan pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan ;
 3. Sumber-sumber penghasilan lain, seperti dari kegiatan ternak dan kebun.

f2.3 Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan Kawasan Perkebunan diarahkan tersebar secara merata di seluruh Kabupaten Sigi. Alokasi luas lahan kawasan perkebunan di Kabupaten Sigi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033 adalah sebesar 55.718 Ha. Pengembangan secara ekstensif untuk perkebunan masih dimungkinkan sepanjang komoditasnya adalah tanaman yang mempunyai fungsi perlindungan terhadap air dan tanah.

Pengembangan kawasan perkebunan memiliki arti penting dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, mengingat kontribusi sektor perkebunan yang cukup berarti dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Sigi, serta fungsi perlindungan terhadap lingkungan, maka upaya secara ekstensif masih dapat dilakukan. Gambaran selengkapnya mengenai potensi lahan untuk perkebunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.7

Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Sigi 2010-2030

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Dolo Barat	1.157,88	2,08
2.	Dolo Selatan	5.750,33	10,32

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
3.	Gumbasa	4.035,84	7,24
4.	Kulawi	9.616,78	17,26
5.	Kulawi Selatan	5.303,43	9,52
6.	Palolo	14.198,92	25,48
7.	Pipikoro	10.649,55	19,11
8.	Sigi Biromaru	4.391,50	7,88
9.	Tanambulava	614,64	1,10
Jumlah		55.718,86	100,00

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi No. 21 Tahun 2011

f2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Berdasarkan pada arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dan analisis potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Sigi, terdapat lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan, yaitu kawasan pertambangan mineral logam dan kawasan pertambangan panas bumi. Alokasi ruang untuk pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru dengan luas kawasan sebesar 7.950 Ha. Sedangkan potensi panas bumi terdapat di sepanjang sesar aktif Palu Koro yang membujur dari utara menuju selatan Kabupaten Sigi. Wilayah-wilayah yang diperkirakan memiliki potensi panas bumi di Kabupaten Sigi antara lain Kecamatan Dolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava, dan Kecamatan Sigi Biromaru.

Untuk pengembangan dan upaya eksploitasi potensi mineral yang ada di Kabupaten Sigi membutuhkan sebuah studi yang mendalam terkait dengan kemanfaatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan mengingat kabupaten ini merupakan kabupaten yang berfungsi lindung bagi kabupaten di sekitarnya.

f2.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat

istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan Pariwisata mengikuti Konsep pengembangan 3A (*Access, Accommodation, Attraction*). Konsep 3A mengungkapkan pentingnya mengembangkan Objek Wisata dengan mendukung faktor-faktor wisatawan yang datang ke Objek Wisata seperti Aksesibilitas ke Objek wisata, Akomodasi untuk para wisatawan, dan penjagaan nilai-nilai Atraksi dari sebuah Objek Wisata. Kriteria Penetapan pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

- a) kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata, serta tidak mengganggu kelestarian lingkungan ;
- b) kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan pariwisata secara ruang dapat memberikan manfaat:
 1. meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
 2. mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
 3. tidak mengganggu fungsi lindung;
 4. tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam;
 5. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 6. meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
 7. meningkatkan kesempatan kerja;
 8. melestarikan budaya lokal;
 9. meningkatkan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep 3A di atas, maka rencana pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Sigi dilakukan melalui:

- a) Pengembangan paket wisata alam di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Hutan Wisata Wera, Air Terjun Wera, Pemandian Air Panas Bora (Atraksi);
- b) Pengembangan kawasan wisata tradisional di Kecamatan Kulawi (Atraksi);
- c) Pengembangan Kawasan Wisata Pakuli (habitat perkembangbiakan burung Maleo);
- d) Pengembangan jaringan jalan ke objek wisata tersebut yang saat ini sebagian besar masih dalam kondisi yang kurang bagus (Aksesibilitas);

- e) Pengembangan angkutan persewaan khusus ke tempat-tempat wisata (Akomodasi).

f2.6 Kawasan Peruntukan Permukiman

a. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Dalam rencana permukiman perkotaan ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Perumahan harus dilayani oleh satu sistem permukiman yang didasarkan pada karakteristik fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang layak, sehingga dapat menunjang dan menyatukan kehidupan penduduk di dalamnya ;
2. Permukiman perkotaan harus bersifat mandiri, dalam artian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum harus disediakan di kawasan permukiman tersebut ;
3. Untuk perkembangan sebuah permukiman menjadi suatu pusat kegiatan maupun menjadi suatu kota, permukiman tersebut harus melalui suatu tahapan. Contohnya permukiman menjadi desa, desa menjadi kota kecil, kota kecil menjadi kota menengah, kota menengah menjadi kota besar dan seterusnya.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan diarahkan untuk menopang kegiatan-kegiatan distribusi, koleksi dan pelayanan umum serta produksi komoditas berbasis pertanian, dimana kedekatan jarak antara permukiman dan kegiatan produksi merupakan kebutuhan yang perlu difasilitasi. Penyediaan lahan permukiman yang disediakan berdasarkan struktur pusat pertumbuhan yang luasannya diarahkan sesuai dengan satuan wilayah yang dilayani.

Ketersediaan areal pemukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana investasi yang ada di daerah sekitarnya sehingga dapat mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya. Persyaratan lain dari pengembangan permukiman perkotaan ini adalah pengembangan permukiman tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengganggu upaya kelestarian sumberdaya alam. Perhitungan luas areal kawasan permukiman yang disediakan adalah dengan asumsi setiap kepala keluarga membutuhkan luas lahan permukiman rata-rata sebesar 500 m², sehingga diperkirakan kebutuhan lahan permukiman perkotaan di

Kabupaten Sigi adalah sebesar 10.418 Ha, yang tersebar di Kecamatan Marawola, Sigi Biromaru, Palolo, dan Kulawi. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana: pendidikan, kesehatan, kerohanian, air bersih, listrik, dan komunikasi pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kebutuhan rencana. Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan perkotaan yang direncanakan di Kabupaten Sigi terdiri dari:

1. Kawasan perkotaan untuk menunjang kegiatan perdagangan skala regional sebagai ekstensi dari perkotaan Palu yang diarahkan di Kalukubula;
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi pusat pemerintahan skala kabupaten yang direncanakan berlokasi di Bora dengan wilayah pengaruh mencakup kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Gumbasa;
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kawasan yang tersebar di Kecamatan Marawola, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Kulawi ;
4. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sigi.

b. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Permukiman Perdesaan di Kabupaten Sigi terdiri dari permukiman transmigrasi dan permukiman penduduk lokal. Permukiman ini walaupun umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni. Permukiman perdesaan tersebar secara merata di masing-masing desa di Kabupaten Sigi. Keberadaan kawasan permukiman yang ada saat ini sebagian berlokasi di kawasan lindung atau sekitar kawasan lindung jika masih memungkinkan dapat dipertahankan dan perkembangannya dibatasi sehingga tidak merusak kawasan lindung. Upaya-upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan yang berada di Kawasan Lindung mutlak dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Berdasarkan pada kondisi lereng dan struktur geologi kawasan Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sensitivitas terhadap bencana yang tinggi. Keberadaan patahan yang ada di Kabupaten Sigi yang membentang dari utara hingga selatan merupakan satu faktor pembatas dalam pengembangan kawasan budidaya.

I. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Daerah rawan longsor sebaiknya dijadikan areal dengan fungsi lindung, fungsi budidaya terbatas masih dapat dilakukan dengan aturan main yang ketat. Penduduk (permukiman) yang sudah ada perlu mendapatkan pendidikan kebencanaan, sehingga mereka dapat memiliki kepekaan tinggal pada kawasan rawan bencana, yang dapat mengancam keselamatan penduduk di daerah tersebut dan di sekitarnya. Penerapan teknik pengendalian longsor diarahkan ke daerah rawan longsor yang sudah terlanjur dijadikan lahan pertanian. Areal rawan longsor yang belum dibuka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi vegetasi permanen, seperti cagar alam, dan hutan lindung. Selain itu, karakter jenis tanah yang sensitif terhadap erosi, ditambah dengan lereng yang curam dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan kawasan ini juga sangat rentan dengan bencana kelongsoran. Daerah yang memiliki potensi kelongsoran sedang sebagian besar berada pada wilayah-wilayah perbukitan Kabupaten Sigi, yang secara fisik berbukit-bukit dengan kelerengan >40 persen.

II. Kawasan Rawan Banjir

Kabupaten Sigi sebagai satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikarunia potensi sumberdaya air yang berlimpah, juga memiliki potensi untuk mendapat daya rusak air. Salah Potensi daya rusak yang sudah dirasakan oleh wilayah ini adalah kejadian banjir yang terjadi pada beberapa wilayah di Kabupaten Sigi.

Kejadian ini tidak terlepas dari kerusakan alam yang terjadi di Kabupaten Sigi, dimana adanya kecenderungan untuk mengeksploitasi hutan secara berlebih, yang menimbulkan erosi dan sedimentasi pada Sungai Palu. Sebagai akibatnya daya tampung sungai menjadi menurun

dan tidak mampu lagi menampung secara optimal limpasan air hujan saat debit puncak.

Potensi kekeringan juga dimiliki oleh Kabupaten Sigi, sebagai indikasinya adalah terdapatnya beberapa sungai di Kabupaten Sigi yang mengalami kekeringan pada musim kemarau. Apabila kondisi ini tidak segera diambil tindakan pemecahan masalah, bukan mustahil kekeringan juga akan terjadi pada masa mendatang.

Tabel 2.8

Luas Genangan Banjir di Kabupaten Sigi

No	Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)	Persentase (%)
1	Dolo Barat	Bobo	256.83	1.18
		Pesaku	454.57	2.09
		Rarampadende	201.11	0.93
2	Dolo Selatan	Balongga	781.24	3.60
		Baluase	336.46	1.55
		Bulubete	317.64	1.46
		Jono	55.31	0.25
		Pulu	537.83	2.48
		Rogo	231.33	1.07
		Sambo	495.81	2.28
		Walatana	8.42	0.04
		Wisolo	158.79	0.73
3	Gumbasa	Kalawara	321.91	1.48
		Pakuli	452.83	2.08
		Pandere	1,935.71	8.91
4	Kulawi	Boladangko	199.83	0.92
		Bolapapu	169.08	0.78
		Lonca	1,140.15	5.25
		Mataue	536.30	2.47
		Sungku	2,459.01	11.32
		Tangkulowi	25.66	0.12
		Toro	2,509.34	11.55
	Winatu	3,783.37	17.42	

No	Kecamatan	Desa	Luas Genangan (Ha)	Persentase (%)
5	Kulawi Selatan	O'o	0.02	0.0001
6	Nokilalaki	Kadidia	0.22	0.0010
		Sopu	25.30	0.12
7	Palolo	Ampera	172.57	0.79
		Bahagia	677.48	3.12
		Berdikari	58.15	0.27
		Bunga	21.80	0.10
		Kapiroe	225.38	1.04
		Makmur	360.18	1.66
		Petimbe	194.82	0.90
		Ranteleda	167.70	0.77
		Sejahtera	839.13	3.86
		Tanah Harapan	376.31	1.73
		Uwenuni	262.02	1.21
8	Sigi Biromaru	Sidondo I	190.78	0.88
		Sidondo II	205.41	0.95
9	Tanambulava	Lambara	182.15	0.84
		Sibalaya Utara	391.04	1.80
Jumlah			21,718.99	100.00

Sumber: Perda Dokumen RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2011

III. Kawasan Rawan Gempa

Wilayah gempa bumi di Kabupaten Sigi mengacu pada peta daerah rawan terhadap guncangan gempa, yaitu Peta Bahaya Guncangan Gempa Bumi Indonesia (Peta Percepatan Gempa Bumi) adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan jenis *basement* batuan tertentu. Banyaknya daerah patahan di Kabupaten Sigi memberikan resiko kegempaan menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data resiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Sigi memiliki resiko cukup tinggi yaitu 0,15 – 0,35g. Keberadaan patahan

Palu-Koro membentang di bagian tengah Kabupaten Sigi. Peta frekuensi kejadian gempa bumi di Kabupaten Sigi berfokus dangkal dan bersifat merusak tampak gempa bumi berkekuatan ≥ 6 mmi yang berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sulawesi.

Berdasarkan pada data resiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Sigi (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki resiko yang cukup tinggi yaitu antara 0,15 – 0,35g. Keberadaan patahan Palu Koro yang membentang pada bagian tengah Kabupaten Sigi semakin memberikan gambaran yang jelas tentang resiko bencana kegempaan di Kabupaten Sigi.

IV. Kawasan Rawan Bencana Sosial

Kabupaten Sigi yang didiami berbagai rumpun suku Kaili merupakan potensi bagi pengembangan wilayah, namun sekaligus juga merupakan potensi konflik atau bencana sosial apabila tidak diantisipasi secara dini. Konflik-konflik sosial baik atas konflik SARA atau konflik komunal seperti konflik tapal batas dan lainnya rawan terjadi di sejumlah wilayah Kecamatan di kabupaten Sigi yakni Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Kulawi Selatan dan Kecamatan Lindu.

2.1.1.2 Kondisi Demografi

Permasalahan kependudukan adalah merupakan topik yang tetap menarik untuk dibahas, karena berbagai aspek kependudukan yang saling terkait dengan berbagai aspek pembangunan lainnya. Jumlah penduduk suatu daerah dapat berarti positif dan dapat pula berarti negatif bila dilihat dari dimensi waktu dan daerah yang berbeda. Pada waktu jumlah penduduk masih sedikit dan disertai dengan kualitas sumber daya manusia rendah merupakan suatu masalah kependudukan tersendiri yang mengakibatkan lambatnya perkembangan peradaban manusia. Pada waktu yang berbeda ketika perkembangan jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan

penduduk itu sendiri karena berhubungan dengan masalah- masalah sosial dan ekonomi.

Suatu daerah yang jumlah penduduknya sudah sangat tinggi merupakan masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, misalnya sulitnya menyiapkan lapangan kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang berakibat munculnya pemukiman-pemukiman kumuh, timbulnya masalah gangguan keamanan dan masalah sosial lainnya. Sementara itu pada daerah-daerah yang mempunyai wilayah luas dengan sumber daya alamnya yang cukup potensial justru masih kekurangan penduduk (tenaga kerja) untuk mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi kehidupan. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lain jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk serta komposisi penduduk.

A. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk akan terus bertambah yang disebabkan oleh tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian dan migrasi masuk (*in migrastion*) lebih besar dari pada migrasi keluar (*out migration*). Selanjutnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk Kabupaten Sigi Tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sigi sebanyak 215.030 jiwa pada tahun 2010 meningkat sebesar 7,97 persen pada tahun 2015 menjadi 229.474 jiwa, yang kemudian meningkat menjadi sebanyak 232.174 jiwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 1,18 persen selama periode Tahun 2015-2016 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2010-2015 sebesar 7,97 persen.

Data terbaru untuk jumlah penduduk tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten sigi sebanyak 234.588 jiwa. Peningkatan penduduk tahun 2017 sebesar 1,11%. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Sigi tahun 2010-2017 menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Tren Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Kabupaten Sigi, Tahun 2010-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		
		Tahun 2010	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	2010-2016	2015-2016	2015-2017
1	Pipikoro	7.817	8.346	8.445	8.533	8,03	1,19	1,11
2	Kulawi Selatan	8.473	9.042	9.149	9.244	7,98	1,18	1,11
3	Kulawi	14.172	15.125	15.303	15.462	7,98	1,18	1,11
4	Lindu	4.690	5.028	5.088	5.141	8,49	1,19	1,12
5	Nokilalaki	5.626	6.005	6.076	6.139	8	1,18	1,11
6	Palolo	27.385	29.183	29.527	29.834	7,82	1,18	1,11
7	Gumbasa	11.682	12.467	12.613	12.744	7,97	1,17	1,10
8	Dolo Selatan	14.448	15.420	15.601	15.763	7,98	1,17	1,11
9	Dolo Barat	12.576	13.442	13.577	13.718	7,96	1,15	1,10
10	Tanambulava	7.866	8.396	8.495	8.585	8	1,18	1,12
11	Dolo	20.591	21.973	22.232	22.463	7,97	1,18	1,11
12	Sigi Biromaru	42.857	45.736	46.274	46.754	7,97	1,18	1,11
13	Marawola	20.991	22.404	22.668	22.904	7,99	1,18	1,11
14	Marawola Barat	6.382	6.814	6.894	6.966	8,02	1,17	1,11
15	Kinovaro	9.474	10.113	10.232	10.388	8	1,18	1,35
Sigi		215.030	229.474	232.174	234.588	7,97	1,18	1,11

Sumber: Kabupaten Sigi dalam Angka, Tahun 2018

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru, dimana pada tahun 2017 tercatat berjumlah 46.754 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Palolo sebanyak 29.834 jiwa, Kecamatan Marawola sebesar 22.904 jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Dolo sebanyak 22.463 jiwa, berikutnya Kecamatan Dolo Selatan sebanyak 15.763 jiwa, Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil pada Kecamatan Lindu sebesar 5.141 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk yang merupakan profil dari tingkat perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Sigi bervariasi antar

kecamatan. Rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2017 sekitar 1,11 persen. Selengkapnya data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Sigi menurut Kecamatan terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Sigi Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Persentase
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Pipikoro	4.373	4.160	8.533	3,64
2	Kulawi Selatan	4.849	4.395	9.244	3,94
3	Kulawi	7.951	7.511	15.462	6,59
4	Lindu	2.723	2.418	5.141	2,19
5	Nokilalaki	3.114	3.025	6.139	2,62
6	Palolo	15.642	14.192	29.834	12,72
7	Gumbasa	6.590	6.154	12.744	5,43
8	Dolo Selatan	8.164	7.599	15.763	6,72
9	Dolo Barat	6.953	6.765	13.718	5,85
10	Tanambulava	4.402	4.183	8.585	3,66
11	Dolo	11.649	10.814	22.463	9,58
12	Sigi Biromaru	23.805	22.949	46.754	19,93
13	Marawola	11.460	11.444	22.904	9,76
14	Marawola Barat	3.503	3.463	6.966	2,97
15	Kinovaro	5.240	5.098	10.338	4,41
Sigi		120.418	114.170	234.588	100,00

Kabupaten Sigi dalam Angka, Tahun 2017

Seperti pada tabel di atas, Persentase Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Sigi adalah Kecamatan Sigi Biromaru sebagai ibukota Kabupaten Sigi dengan persentase sebesar 19,93 persen dari total penduduk Kabupaten Sigi secara keseluruhan, diikuti oleh Kecamatan Palolo sebesar 12,72 persen, Kecamatan Marawola sebesar 9,76 persen, dan selanjutnya Kecamatan Dolo sebesar 9,58 persen, berikutnya Kecamatan Dolo Selatan sebanyak 6,72 persen, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya di Kabupaten Sigi adalah Kecamatan

Lindu yang hanya sebesar 2,19 persen dari total penduduk Kabupaten Sigi.

Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Sigi mengalami peningkatan menjadi 234.588 (statistik daerah Provinsi Sulawesi Tengah). Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Sigi dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi
Dengan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bangkep	113,025	114,003	114,98	116,011	116,80
Banggai	342,698	348,477	354,402	360,022	365,60
Morowali	108,873	111,002	113,132	115,199	117,30
Poso	225,379	230,521	235,567	240,812	246,00
Donggala	287,921	290,915	293,742	296,38	299,20
Toli-Toli	220,612	223,318	225,875	228,496	231,00
Buol	142,585	145,889	149,004	152,296	155,60
Parigi Moutong	441,02	449,157	457,707	465,883	474,30
Tojo Una-una	143,788	145,817	147,536	149,214	150,80
Sigi	224,214	226,876	229,474	232,174	234,60
Banggai Laut	66,722	68,124	69,514	70,886	72,30
Morowali Utara	112,372	114,982	117,67	120,322	123,00
Palu	356,279	362,202	368,086	374,02	379,80
Sulawesi Tengah	2.785.488	2.831.283	2.876.689	2.921.715	2.966

Statistik Daerah Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2018 (diolah kembali)

Secara umum pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.921.715 jiwa. Meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.966 juta Jiwa. Kabupaten Sigi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 234.588 jiwa atau berada pada peringkat ke enam dari 13 kabupaten/kota ; Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk sebanyak 474,30 ribu jiwa kemudian Kota Palu dengan jumlah penduduk sebanyak

379,80 ribu jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 365,60 ribu jiwa, peringkat keempat Kabupaten Donggala sebanyak 299,20 ribu jiwa. Sedangkan, Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Banggai Laut yakni sebanyak 72.30 ribu jiwa.

B. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan Penduduk seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Sigi tidak merata jumlahnya pada semua wilayah kecamatan, dimana Kecamatan Sigi Biromaru sebagai pusat pemerintahan dan pusat pemerintahan Kabupaten Sigi memiliki luas Wilayah Kecamatan sebesar 289,60 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 46.754 mencapai kepadatan penduduk sebanyak 161 jiwa per km². Kecamatan dengan Tingkat Kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Dolo dengan tingkat kepadatan mencapai 623 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lindu dan Kecamatan Pipikoro dengan tingkat kepadatan sebesar 9 Jiwa per km². Lebih lengkap mengenai data rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sigi tahun 2017 disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sigi
Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Penduduk		Kepadatan (Org/Km ²)
		Km2	%	Total	%	
1	Pipikoro	956,13	18,4	8.533	3,64	9
2	Kulawi Selatan	418,12	8,05	9.244	3,94	22
3	Kulawi	1.053,56	20,28	15.462	6,59	15
4	Lindu	552,03	10,62	5.141	2,19	9
5	Nokilalaki	75,19	1,45	6.139	2,62	82
6	Palolo	626,09	12,05	29.834	12,72	48
7	Gumbasa	176,49	3,4	12.744	5,43	72
8	Dolo Selatan	584,71	11,25	15.763	6,72	27
9	Dolo Barat	112,18	2,16	13.718	5,85	122

10	Tanambulava	56,33	1,08	8.585	3,66	152
11	Dolo	36,05	0,69	22.463	9,58	623
12	Sigi Biromaru	289,6	5,57	46.754	19,93	161
13	Marawola	38,65	0,74	22.904	9,76	593
14	Marawola Barat	150,51	2,9	6.966	2,97	46
15	Kinovaro	70,38	1,35	10.338	4,41	147
Sigi		5.196,0 2	100	234.58 8	100,0 0	45

Kabupaten Sigi dalam Angka, Tahun 2018

C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang selanjutnya disebut dengan "Sex Rasio" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.13

**Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Di Kabupaten Sigi, Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki- Laki	Perempua n	Total	
1	Pipikoro	4.373	4.160	8.533	105
2	Kulawi Selatan	4.849	4.395	9.244	110
3	Kulawi	7.951	7.511	15.462	106
4	Lindu	2.723	2.418	5.141	113
5	Nokilalaki	3.114	3.025	6.139	103
6	Palolo	15.642	14.192	29.834	110
7	Gumbasa	6.590	6.154	12.744	107
8	Dolo Selatan	8.164	7.599	15.763	107
9	Dolo Barat	6.953	6.765	13.718	103
10	Tanambulava	4.402	4.183	8.585	105

11	Dolo	11.649	10.814	22.463	108
12	Sigi Biromaru	23.805	22.949	46.754	104
13	Marawola	11.460	11.444	22.904	100
14	Marawola Barat	3.503	3.463	6.966	101
15	Kinovaro	5.240	5.098	10.338	103
Sigi		120.418	114.170	234.588	105

Sumber : Kabupaten Sigi dalam Angka, Tahun 2018

Jika dilihat dengan cermat tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Lindu merupakan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Sigi pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 113 sedangkan kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terendah adalah kecamatan Marawola dengan rasio sebesar 100. Secara keseluruhan terlihat sex rasio pada tingkat kecamatan di Kabupaten Sigi relatif bervariasi antara 100 sampai 113. namun secara komulatif pada tingkat Kabupaten Sigi dalam tahun terakhir komposisi penduduk laki-laki dan perempuan telah relatif berbeda (sex rasio = 100) dengan angka rasio sebesar 105 dan bahkan terdapat kecenderungan sex rasio tetap diatas 100.

D. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur penduduk Kabupaten Sigi. Pada Tahun 2016 penduduk di bawah usia 15 tahun mencapai 66.465 jiwa atau sebesar 28,19 persen dari total penduduk Kabupaten Sigi yang berjumlah 234.174 jiwa. Selanjutnya kondisi pada tahun 2017, mayoritas penduduk di Kabupaten Sigi berada pada usia di bawah 15 tahun mencapai 65.684 Jiwa atau sebesar 27,99% dari total penduduk 234.588 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Sigi mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun mendekati angka 30 persen, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi
Menurut Kelompok Umur, Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	11.753	10.984	22.737
5 – 9	11.350	10.806	22.156
10 – 14	10.776	10.015	20.791
15 – 19	10.764	9.701	20.465
20 – 24	10.156	9.417	19.573
25 – 29	9.312	8.724	18.036
30 – 34	9.488	9.022	18.510
35 – 39	9.644	9.192	18.836
40 – 44	8.937	8.615	17.552
45 – 49	7.787	7.432	15.219
50 – 54	6.238	6.179	12.417
55 – 59	5.010	4.836	9.846
60 – 64	3.689	3.407	7.096
65+	5.510	5.840	11.350
Sigi	120.414	114.170	234.588

Sumber : Kabupaten Sigi dalam Angka, Tahun 2018

Seperti yang terlihat pada Tabel di atas, Komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Sigi selama tahun 2017 sebesar 60,65 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sigi dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio Ketergantungan Anak (*Child Dependency Ratio*) di Kabupaten Sigi Tahun 2017 tercatat sebesar 42 yang berarti bahwa terdapat sekitar 42 orang anak menjadi beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. Disisi lain penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (*Old Dependency Ratio*) Tahun 2017 di Kabupaten Sigi sebesar 7,05. Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut digabungkan maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (*Dependency Ratio*) sebesar 49,09. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 49 orang penduduk yang belum/tidak produktif.

2.1.2 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perkembangan ekonomi secara nasional dan regional selalu mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peningkatan baik aspek ekonomi, teknologi serta kemampuan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya disajikan dalam beberapa ukuran antara lain:

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menjelaskan kemajuan atau perkembangan ekonomi dari suatu wilayah atau daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi bila dilihat dari angka-angka PDRB terus mengalami peningkatan dari Tahun 2012-2017. Hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan ADH Konstan maupun ADH Berlaku. Sampai dengan 2015 PDRB ADH Konstan mencapai Rp. 5.180.386 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 mencapai Rp. 5.471.464,-, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 5.773.688,-. Sedangkan untuk PDRB ADH Berlaku mencapai Rp. 6.735.071,- di tahun 2015 dan di tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 7.371.944,-. Dan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 7.931.264,-. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi selama periode tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2017 (Persen)

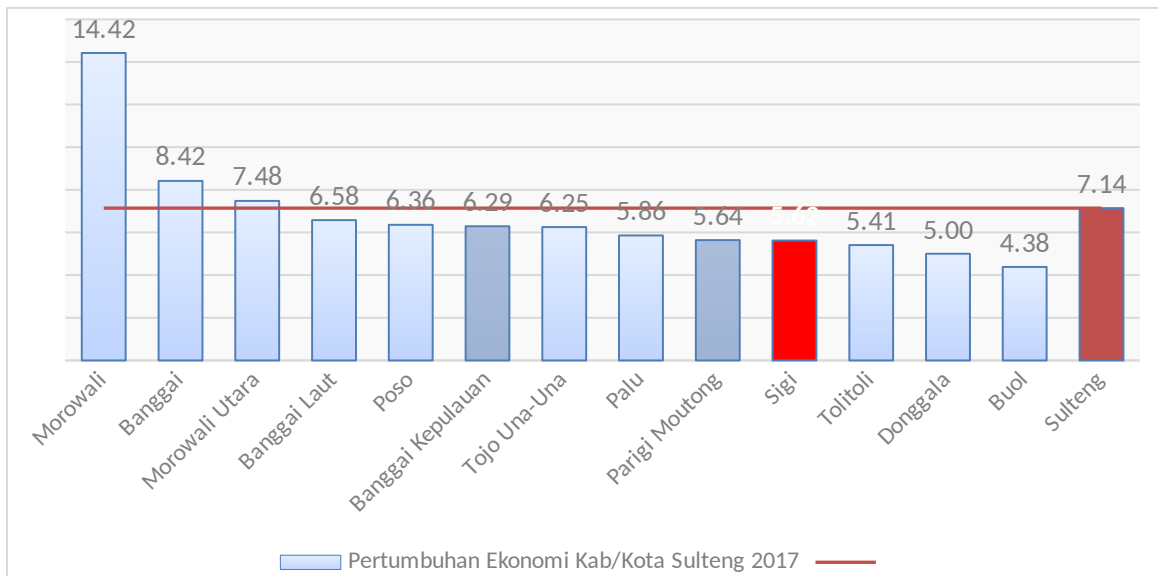
PDRB	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ADH BERLAKU	4.823.589	5.401.524	6.119.245	6.735.071	7.371.944	7.931.264
PERTUMBUHAN (%)	10,33	11,98	13,28	10,06	9,45	7,59
ADH KONSTAN	4.276.605	4.571.361	4.859.734	5.180.386	5.466.444	5.773.688
PERTUMBUHAN (%)	6,83	6,89	6,31	6,6	5,62	5,62

Sumber BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2018, diolah kembali

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sigi Tahun 2012-2017 mencapai 7,59 persen untuk perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 5,62 persen untuk perhitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Jika dilihat dari pertumbuhan setiap tahunnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya untuk PDRB ADH Konstan, sedangkan PDRB AHD Berlaku mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi masih berada diatas rata-rata pertumbuhan Nasional. Artinya masih cukup tinggi, stabil khususnya pada beberapa tahun belakangan ini.

Tahun 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi berada pada urutan kesepuluh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62%. Kabupaten Morowali adalah kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 14,42%, diikuti Kabupaten Banggai di urutan kedua dengan pertumbuhan ekonomi 8,42%. Sebaliknya Kabupaten dengan Pertumbuhan ekonomi Terendah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Buol dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,38%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sulteng
Tahun 2017



Sumber; Sulteng Dalam Angka, 2018 (data diolah)

B. Pertumbuhan PDRB Persektor

Secara keseluruhan pada tahun 2016-2017 PDRB Persektor Atas Dasar Harga Konstan tidak mengalami perubahan, sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Namun ada beberapa sektor yang tetap tumbuh selama tahun 2017 yaitu pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 15,49 persen, disusul sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 10,23 persen. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan tertinggi ketiga ditahun 2017 adalah sektor informasi dan komunikasi yakni sebesar 8,91 persen. Adapun sektor yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya sektor Jasa Perusahaan dengan penurunan sebesar 3,74 persen. Lebih jelasnya pertumbuhan PDRB berdasarkan kontribusi sektoral berdasarkan ADH Konstan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Pertumbuhan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sigi

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,67	4,54	4,76	0,31	4,67
Pertambangan dan Penggalian	9,14	9,46	8,94	-1,36	7,34
Industri Pengolahan	5,65	6,12	5,11	-2,11	6,60

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengadaan Listrik dan Gas	12,02	10,46	8,73	0	5,79
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	4,92	5,16	5,35	0	6,90
Konstruksi	9,68	10,67	7,3	-4,05	8,47
Perdagangan Besar dan Eceran	6,24	6,21	6,76	0,5	4,05
Transportasi dan Pergudangan	7,08	6,69	6,73	0,55	6,82
Penyediaan Akomodasi	7,41	7,68	7,19	0	4,89
Informasi dan Komunikasi	7,66	8,21	9,33	1,02	8,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,79	4,59	8,12	13,97	10,23
Real Estat	8,22	8,56	7,44	-1,19	5,98
Jasa Perusahaan	7,53	8,12	8,29	-8,33	7,00
Administrasi Pemerintahan	10,27	10,7	9,79	0,26	3,41
Jasa Pendidikan	8,31	8,84	6,96	1,78	5,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,76	10,94	9,56	-1,43	15,49
Jasa lainnya	1,75	8,25	8,01	0	6,69
Total PDRB Konstan	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2018, diolah kembali

C. Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan

Pada tahun 2016, Kontribusi sektor terhadap PRBD ADH Konstan di Kabupaten Sigi antara lain Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor dominan yakni sebesar Rp. 2.624.786,- atau 47,97 persen, kemudian sektor terendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 673,- atau 0,01 persen. Selanjutnya pada tahun 2017 Total PDRB ADH Konstan Kabupaten Sigi sebesar Rp. 5.773.688. Sperti tahun sebelumnya Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga menjadi sektor dominan yakni sebesar Rp. 2.747.484,- atau 47,58% persen (namun menurun dari tahun sebelumnya). Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebesar Rp. 683.895,- atau sebesar 11,84%. Sektor tertinggi ketiga yakni sektor konstruksi yakni Rp.632.708,- atau 10,96%.

Secara lengkap nilai dan kontribusi PDRB ADH Konstan periode 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.260.831	2.363.502	2.475.976	2.624.786	2.747.484
Pertambangan dan Penggalian	159.457	174.542	190.145	197.900	212.426
Industri Pengolahan	88.373	93.783	98.572	101.912	108.641
Pengadaan Listrik dan Gas	492	544	591	673	712
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	5.237	5.507	5.802	5.996	6.410
Konstruksi	484.312	536.099	575.124	583.295	632.708
Perdagangan Besar dan Eceran	545.835	579.744	618.954	657.288	683.895
Transportasi dan Pergudangan	82.518	88.039	93.960	99.360	106.133
Penyediaan Akomodasi	18.001	19.384	20.778	22.086	23.167
Informasi dan Komunikasi	86.299	93.384	102.101	108.848	118.547
Jasa Keuangan dan Asuransi	81.735	85.484	92.427	111.860	123.300
Real Estat	112.183	121.786	130.843	136.600	144.768
Jasa Perusahaan	5.124	5.540	5.999	6.215	6.650
Administrasi Pemerintahan	329.929	365.237	400.978	424.563	439.046
Jasa Pendidikan	225.132	245.033	262.098	282.044	297.895
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59.496	66.007	72.315	75.432	87.119
Jasa lainnya	26.406	28.585	30.874	32.605	34.787
Total PDRB Konstan	4.571.361	4.872.110	5.177.537	5.471.464	5.773.688

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2018, diolah kembali

Pada tahun 2016 Kontribusi dan Nilai PDRB ADH Berlaku didominasi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 3.300.218,- atau 44,77 persen, demikian juga sektor terendah adalah sektor listrik dan gas sebesar Rp. 567,- atau 0,01%. Ditahun berikutnya, masih di Dominasi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan 44,28% dengan nilai Rp. 3.512.156, sebaliknya sektor terendah sektor listrik dan gas sebesar Rp. 699,- atau 0,01%. Gambaran kondisi ini menunjukkan kurang baiknya fondasi ekonomi Kabupaten Sigi yakni pertumbuhan ekonomi masih bertumpu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kemudian sektor ini juga sudah mengalami penurunan kontribusi nilai pada tahun 2016 maupun 2017, sementara sektor-sektor lain juga belum memberikan kontribusi yang signifikan, justru banyak sektor yang mengalami penurunan di tahun 2017 sehingga akumulasinya yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi Mengalami penurunan pada tahun 2017. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.18
Nilai Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha / Industri	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.586.650	2.836.087	3.061.908	3.300.218	3.512.156
Pertambangan dan Penggalian	196.946	230.414	281.059	282.099	306.235
Industri Pengolahan	102.179	113.742	124.064	138.707	149.390
Pengadaan Listrik dan Gas	489	540	490	567	699
Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah	6.046	6.784	7.473	8.046	8.642
Konstruksi	618.028	745.800	825.900	905.255	975.920
Perdagangan Besar dan Eceran	646.998	721.055	796.815	946.203	1.013.707
Transportasi dan Pergudangan	95.762	108.156	116.838	131.446	141.142
Penyediaan Akomodasi	21.830	24.886	27.518	29.603	31.468
Informasi dan Komunikasi	93.888	105.267	119.425	124.524	140.689
Jasa Keuangan dan Asuransi	104.788	111.396	127.231	169.099	192.759

Real Estate	128.447	146.429	162.425	179.832	192.497
Jasa Perusahaan	6.160	7.084	8.103	8.954	9.857
Administrasi Pemerintahan	427.455	491.573	556.904	628.670	686.910
Jasa Pendidikan	261.103	297.657	333.796	368.441	399.548
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.654	84.279	96.065	104.394	118.701
Jasa Lainnya	32.103	35.665	40.750	45.885	50.946
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB-ADHB)	5.401.524	6.066.814	6.686.765	7.371.944	7.931.264

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2018, diolah kembali

Gambaran perkembangan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Sigi selama periode tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
Kabupaten Sigi

Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,75	48,51	45,79	47,82	44,77	47,97	44,28	47,59
Pertambangan dan Penggalian	3,8	3,58	4,2	3,67	3,83	3,62	3,86	3,68
Industri Pengolahan	1,87	1,92	1,86	1,9	1,88	1,86	1,88	1,88
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	12,29	11	12,35	11,11	12,28	10,66	12,30	10,96
Perdagangan Besar dan	11,89	11,9	11,9	11,9	12,8	12,0	12,7	11,8

Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Eceran			2	5	4	1	8	5
Transportasi dan Pergudangan	1,78	1,81	1,75	1,81	1,78	1,82	1,78	1,84
Penyediaan Akomodasi	0,41	0,4	0,41	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40
Informasi dan Komunikasi	1,74	1,92	1,79	1,97	1,69	1,99	1,77	2,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,75	1,9	1,79	2,29	2,04	2,43	2,14
Real Estat	2,41	2,5	2,43	2,53	2,44	2,5	2,43	2,51
Jasa Perusahaan	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12
Administrasi Pemerintahan	8,1	7,5	8,33	7,74	8,53	7,76	8,66	7,60
Jasa Pendidikan	4,91	5,03	4,99	5,06	5	5,15	5,04	5,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,35	1,44	1,4	1,42	1,38	1,50	1,51
Jasa lainnya	0,59	0,59	0,61	0,6	0,62	0,6	0,64	0,60
Total Kontribusi PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2014-2018, diolah kembali

D. PDRB PerKapita

PDRB perkapita merupakan besaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Angka PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat walaupun tidak dapat langsung menggambarkan kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat/penduduk. Naiknya aktifitas ekonomi riil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap PDRB per kapita Kabupaten Sigi.

PDRB perkapita Kabupaten Sigi yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 meningkat dari Rp. 19 Juta,- di tahun 2012 menjadi Rp. 23 Juta,- di tahun 2016. Sementara untuk PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2012 sebesar 21 juta meningkat menjadi sebesar 31 juta pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 baik untuk PDRB ADH Konstan dan ADH Berlaku juga mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 33,8 juta (PDRB ADH Berlaku) dan 24,61 (PDRB ADH Konstan). Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

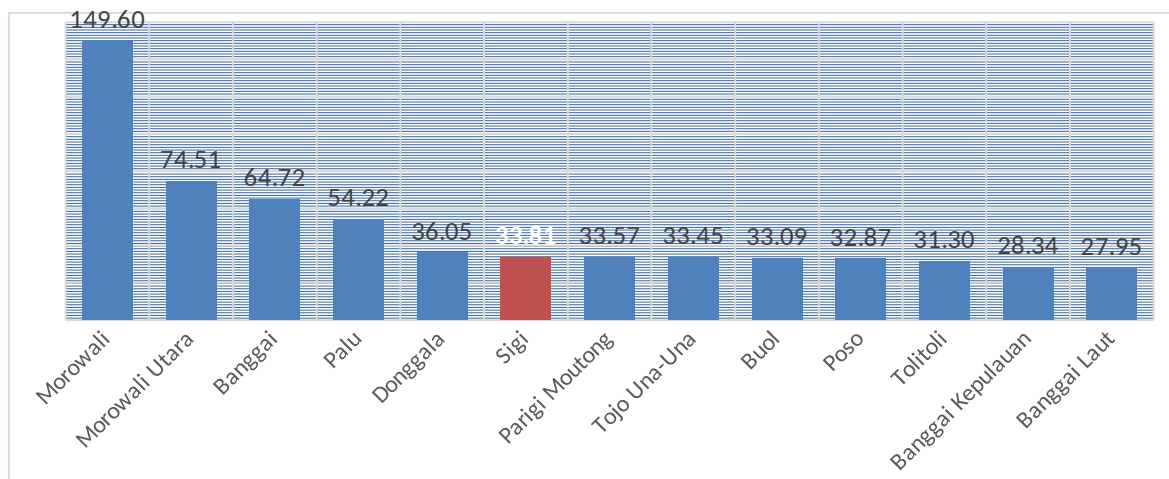
Tabel 2.20
PDRB Perkapita ADHK dan ADHB Periode 2013–2017
Kabupaten Sigi

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB (Jutaan Rupiah)					
- PDRB ADH Berlaku	5.401.52	6.066.8	6.686.7	7.371.9	7.931.2
- PDRB ADH Konstan	4.571.36	4.872.1	5.177.5	5.471.4	5.773.6
PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah)					
PDRB Perkapita ADH	24	26,7	29,1	31,7	33,8
PDRB Perkapita ADH	20,3	21,4	22,5	23,5	24,61

Sumber : BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2018

Selanjutnya posisi Kabupaten Sigi, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulteng
Tahun 2017



Sumber: Sulteng Dalam Angka, 2018

Merujuk pada gambar di atas, Kabupaten Morowali merupakan Kabupaten dengan PDRB Perkapita terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar Rp. 149,60 Juta, kemudian Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp. 74,51 Juta, Ketiga Kabupaten Banggai dengan Rp. 64,72 Juta. Sedangkan Kabupaten Sigi berada pada urutan ke enam dengan

nilai Rp. 33,81 Juta. Kabupaten dengan PDRB terendah di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Laut dengan PDRB Perkapita sebesar Rp. 27,95 Juta.

E. Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Namun, negara-negara miskin menghadapi masalah yang lebih besar. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Perhitungan garis kemiskinan berbeda-beda disetiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari, sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

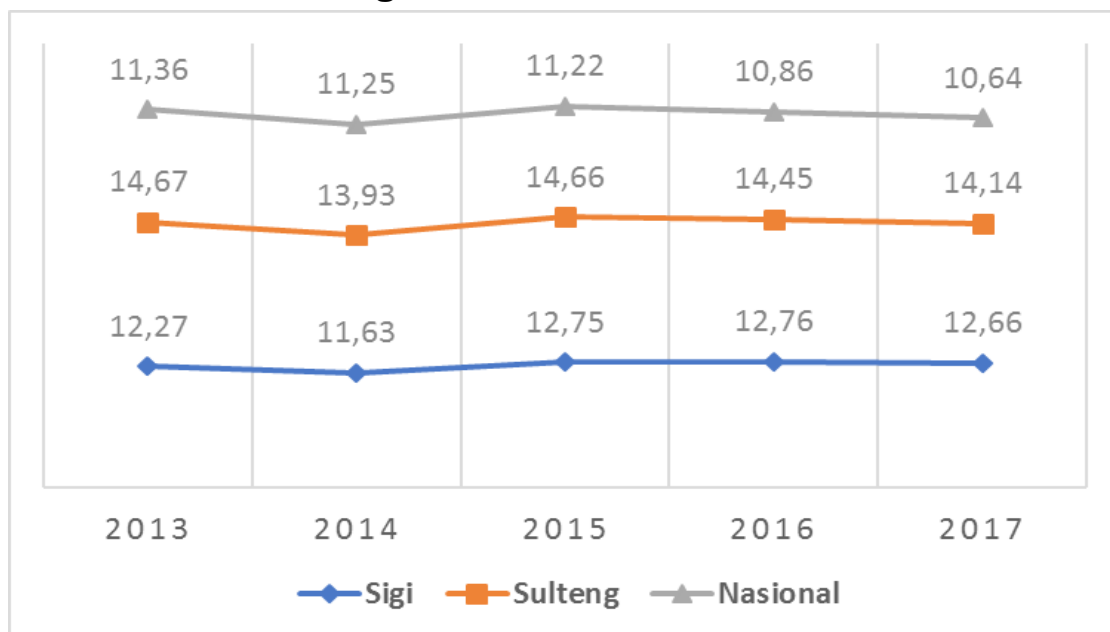
Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang muncul sejak manusia dilahirkan di dunia dan sampai sekarang pun permasalahan kemiskinan masih mengemuka, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Permasalahan kemiskinan di negara maju relatif kecil jumlahnya, sehingga dapat lebih mudah untuk diatasi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Berbagai kebijakan diarahkan untuk perbaikan dibidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga daya beli penduduknya meningkat. Juga peran aktif badan-badan keuangan dunia (IMF), bantuan pinjaman lunak maupun jangka panjang dari negara-negara maju, negara-negara uni eropa dan juga negara-negara asia yang maju diharapkan dapat memacu kemajuan dan perkembangan negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia baik dalam bidang ekonomi, sumberdaya manusia, kemajuan ilmu dan teknologi untuk pemanfaatan sumberdaya alam, kemiskinan penduduk menjadi aspek sangat mendasar yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan/permintaan (*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

Batas garis kemiskinan untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret tahun 2017 sebesar Rp391.763 perkapita sebulan. Artinya setiap penduduk yang memiliki total pengeluaran perbulan (makanan + non makanan) kurang dari Rp391.176 dimasukkan kedalam penduduk miskin. Data persentase masyarakat miskin di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.5

**Persentase Masyarakat Miskin Kabupaten Sigi
Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2013-2017**



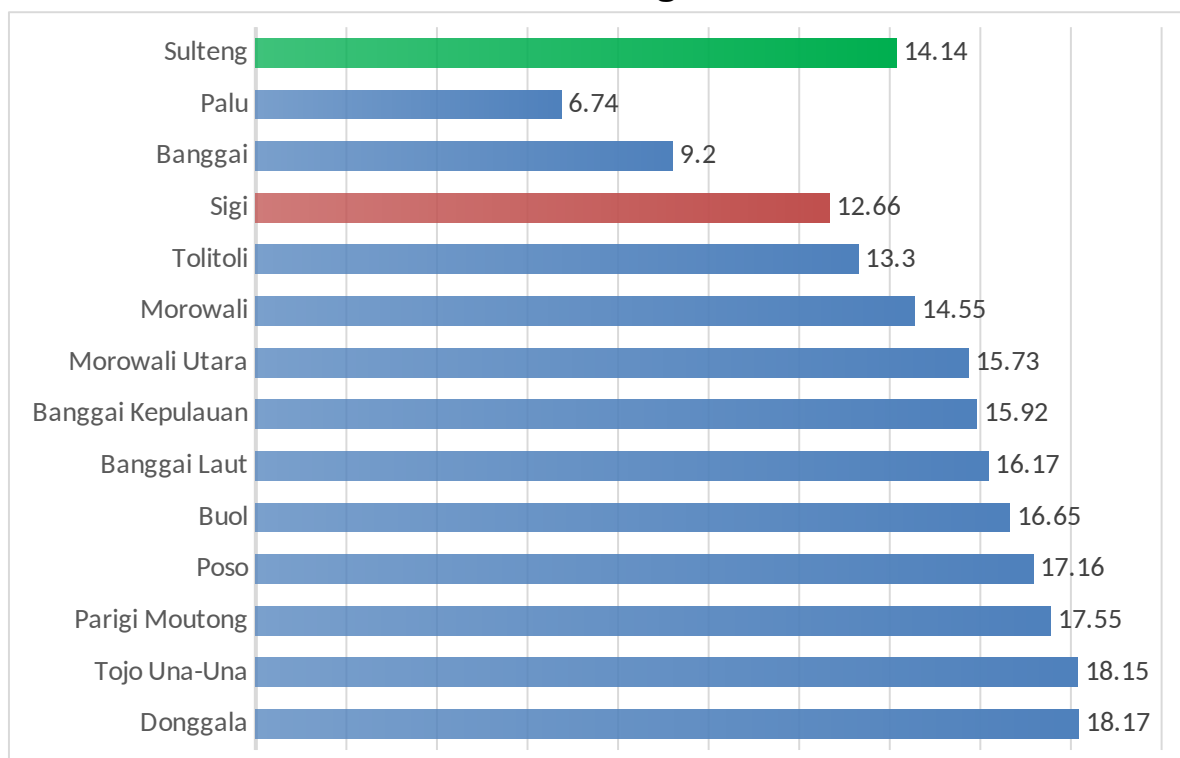
Statistik Kabupaten Sigi, Tahun 2018 (diolah kembali)

Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah pada tahun 2016 mencapai 450,52 ribu jiwa atau sekitar 14,45 persen dari total penduduk Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi sekitar 12,76 persen penduduk

miskin dari total penduduk Kabupaten Sigi yang ada. Angka kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2015 (12,75%) dan naik pada tahun 2016 menjadi (12,76). Kemudian pada tahun 2017 Kemiskinan Kabupaten Sigi menurun menjadi 12,66% atau menurun 0,10% dari tahun 2016. Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami penurunan menjadi 14,14% dan kemiskinan di tingkat nasional juga menurun menjadi 10,64%. Kemiskinan Kabupaten Sigi masih rendah dari rata-rata provinsi namun lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Tengah, dimana kabupaten Sigi merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan terendah ketiga di Sulawesi Tengah, secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini.

Gambar 2.6
Perbandingan Kemiskinan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih tergolong tinggi. Kabupaten Donggala memiliki persentase penduduk miskin terbanyak yakni sebesar 18,17 persen, selanjutnya

Tojo Una-Una sebesar 18,15 persen, dan tertinggi ketiga yakni kabupaten Parigi Moutong sebesar 17,55 persen. Kabupaten Sigi jika diperbandingkan dengan kabupaten/kota di Sulawesi tengah terendah ketiga dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,66 persen. Persentase penduduk miskin terendah yakni Kota palu sebesar 6,74 persen.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli).

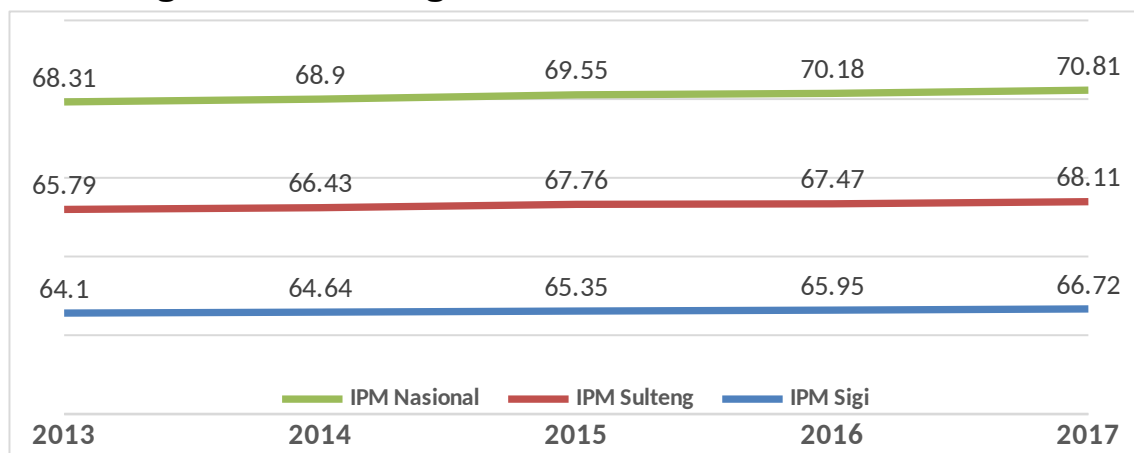
IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (*IMH*), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) Angka Kematian Bayi *IMR*, (2) Angka Harapan Hidup (*el*), dan (3) angka melek huruf (*lit*). salah satu kritik mendasar terhadap *IMH*, bahwa dua komponen utama kurang lebih mengukur hal yang sama.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai dengan semakin meningkatnya IPM yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sigi sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks

kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Sigi, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kondisi IPM Kabupaten Sigi 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, tahun 2015 IPM Kabupaten Sigi sebesar 65,35, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,95. Kembali meningkat menjadi 66,72 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatakan-peningkatan pada angka-angka pembentuk IPM.

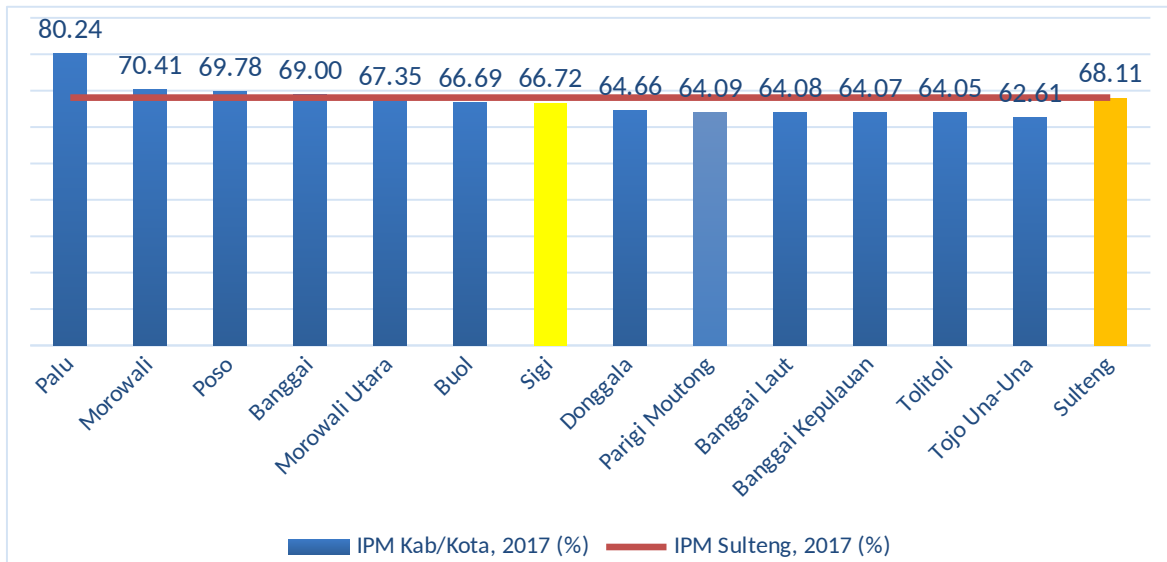
Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sigi, Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2013-2017



Sumber: Statistik Kabupaten Sigi, 2018 (diolah kembali)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pada tahun 2017, Kabupaten Sigi berada pada peringkat ketujuh dengan capaian IPM 66,72. IPM tertinggi dicapai Kota Palu 80,24; lalu Kabupaten Morowali 70,41; ketiga Kabupaten Poso 69,78, dan keempat Kabupaten Banggai sebesar 69,00. Sedangkan, IPM terendah diperoleh Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Tojo una-Una. Gambaran perbandingan IPM Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2017 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2.8
Perbandingan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2017



Sumber: BPS, Tahun 2018

2.2 SUMBERDAYA INDUSTRI

2.2.1 Ketenagakerjaan

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan

pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; yang dijelaskan sebagaimana berikut:

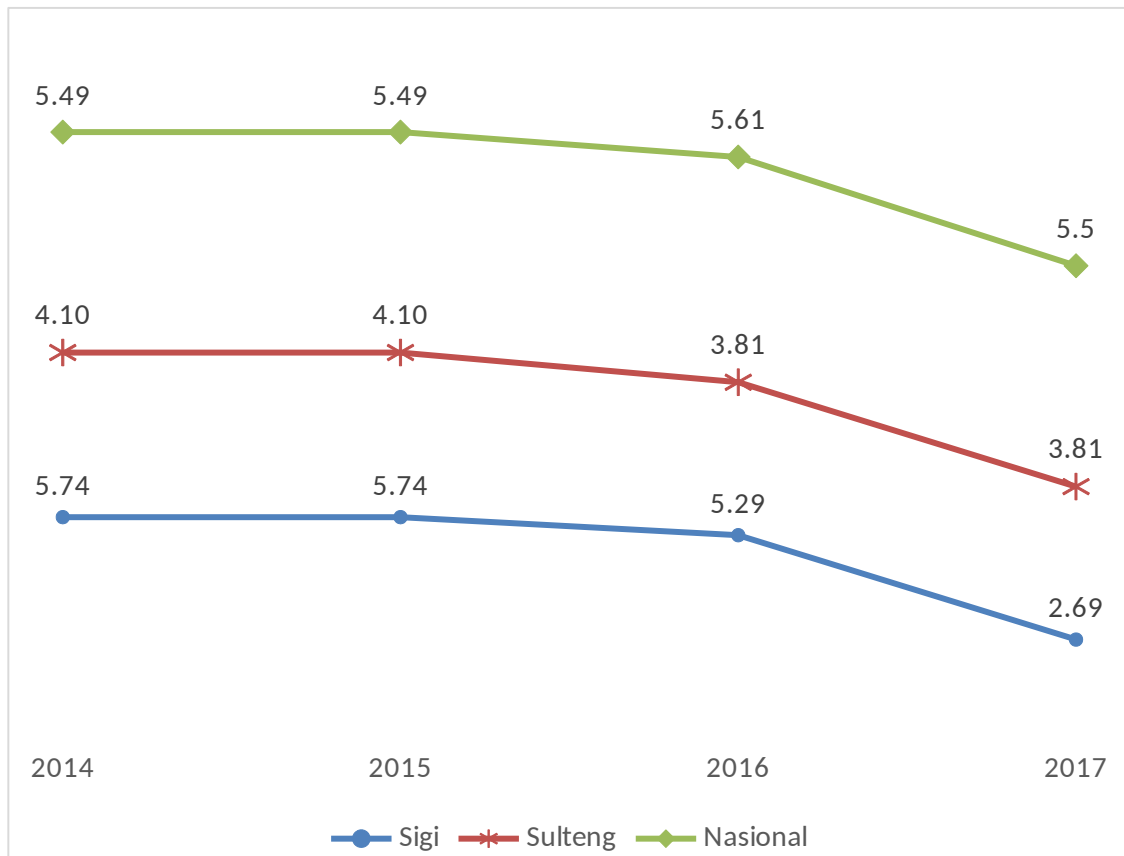
a) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan bagian dari dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Data yang menggambarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sigi kurun waktu 2 tahun terakhir sebagaimana berikut.

Gambar 2.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengan dan Nasional Tahun 2014-2017

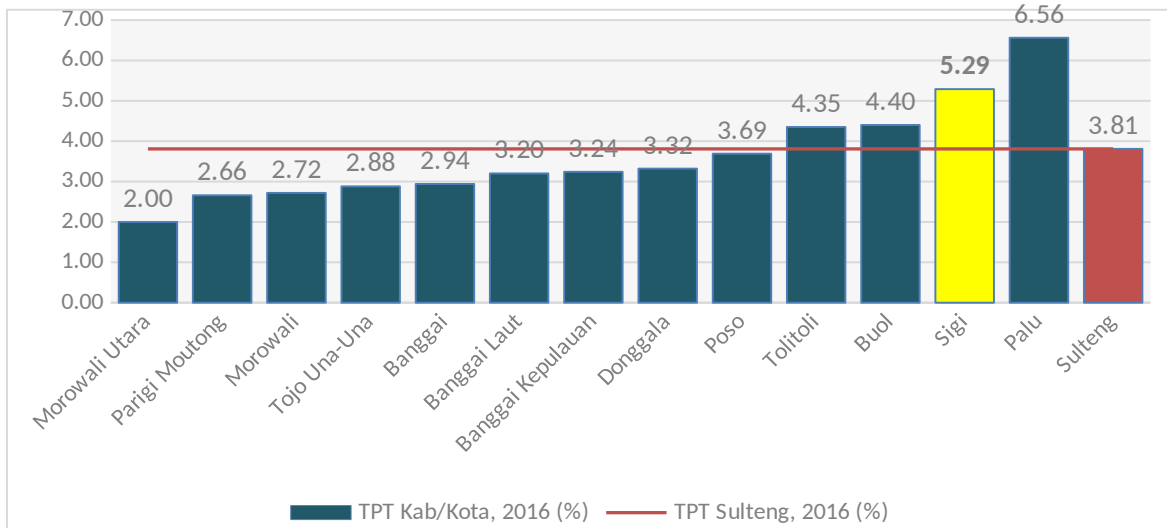


Sumber: BPS, Tahun 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sigi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2017 dengan TPT sebesar 2,69%. Dimana tahun sebelumnya TPT Kabupaten Sigi sebesar 5,29%. Capaian pada tahun 2017 tersebut menempatkan TPT Sigi berada di bawah rata-rata provinsi dan rata-rata nasional, TPT Sulteng di tahun 2017 sebesar 3,81% sedangkan nasional sebesar 5,50%.

Selanjutnya sebagai perbandingan dengan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah, berikut di dijelaskan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sigi dengan 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Gambar 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sigi dan Kab/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017



Sumber: Sulteng Dalam Angka, Tahun 2018

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sigi pada tahun 2015 tergolong tinggi jika di bandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya Kabupaten Sigi tertinggi kedua dengan TPT sebesar 5,74 persen; Kota Palu menjadi Kota dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 8,32 persen. Sedangkan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan dengan TPT paling rendah di Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing 1,38 persen dan 2,22 persen.

Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Sigi sebanyak 114.992 dengan jumlah yang bekerja 108.847 atau sebesar 94,65% sedangkan pengangguran terbuka sebanyak 6.075. Untuk jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 54.571. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 47,45% dan pengangguran terbuka sebesar 2,69%. Selanjutnya gambaran kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sigi tahun 2017:

Tabel 2.21

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Sigi Tahun 2017

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	74.633	40.289	114.922
Bekerja	72.628	36.219	108.847
Pengangguran Terbuka	2.005	4.070	6.075

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Bukan Angkatan Kerja	12.203	42.368	54.571
Sekolah	7.967	8.327	16.294
Mengurus Rumah Tangga	1266	32.647	33.913
Lainnya	2.970	1.394	4.364
Jumlah	86.836	82.657	164.723
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,94	48,74	67,8
Pengangguran Terbuka	5,25	10,1	2,69

Sumber: BPS, 2018

b) Kualitas Tenaga Kerja

Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sigi didasarkan pada ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian. Rata-rata tenaga kerja memiliki pendidikan SD-SMP serta masih adanya tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan atau tidak sekolah. Keterampilan berdasarkan mata pencaharian utama lebih banyak di Sektor Pertanian menjadi petani.

Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sigi didasarkan atas jumlah pencari kerja dan tingkat pendidikan. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Sigi sebagian besar adalah lulusan SLTA, sarjana muda dan sarjana. Untuk lulusan SD dan SLTP, sebagian besar bekerja di Sektor Pertanian terutama di Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan maupun Perikanan. Sebagai konsekuensi dari penambahan jumlah penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan penambahan penyediaan lapangan kerja berakibat pada timbulnya pengangguran.

Data yang diperoleh BPS memperlihatkan bahwa tenaga kerja yang terdaftar Tahun 2017 terbanyak adalah mereka yang berpendidikan SD sejumlah 161 orang, diikuti yang berpendidikan SMA sejumlah 160, kemudian S1 dan S2 sejumlah 102 orang, berpendidikan diploma

sebanyak 71 Orang, SLTP sejumlah 44 orang. Dari komposisi Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Sigi memiliki rasio Lulusan S1/S2/S3 sebesar 0.013 yang artinya setiap 1000 penduduk terdapat 13 orang lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.22
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kecamatan, 2012-2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
SD	Laki-Laki	0	41	87	3	0
	Perempuan	144	431	565	164	161
SMP	Laki-Laki	0	36	47	3	4
	Perempuan	1	65	80	30	40
SMA	Laki-Laki	96	140	103	126	101
	Perempuan	137	190	137	70	59
Diploma I	Laki-Laki	0	8	7	-	5
	Perempuan	3	12	9	-	66
Diploma II	Laki-Laki	21	108	67	-	
	Perempuan	21	108	67	-	
Diploma III	Laki-Laki	21	89	83	8	
	Perempuan	61	108	76	18	
S1 + S2	Laki-Laki	90	37	18	34	40
	Perempuan	147	26	10	42	62
Total	Laki-Laki	213	423	399	174	150
	Perempuan	514	940	944	324	388

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka 2014-2018, diolah kembali

2.2.2 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain; Persentase koperasi aktif; Jumlah UKM non

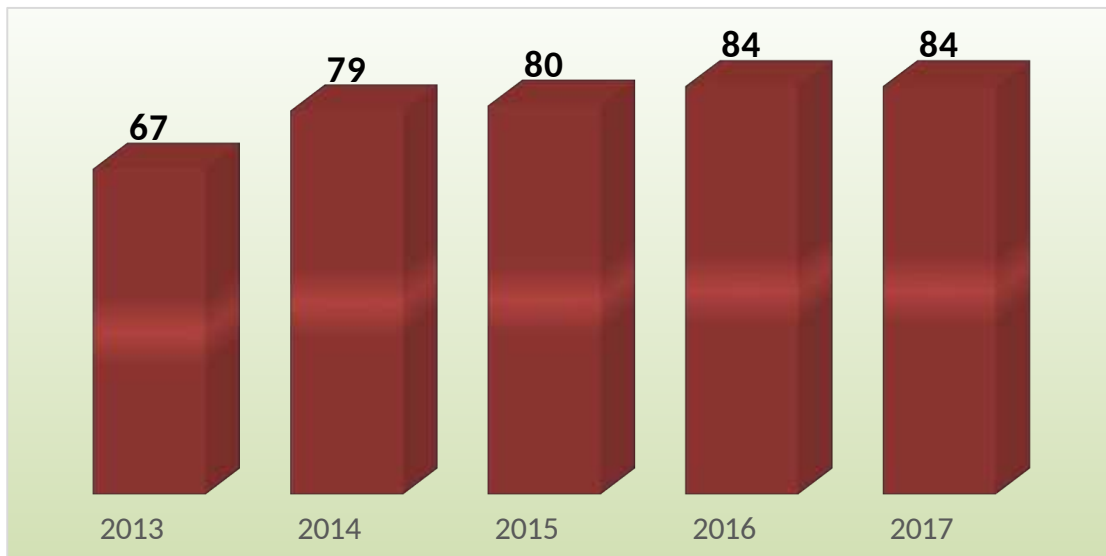
BPR/LKM UKM; Jumlah BPR/LKM dan; Usaha Mikro dan Kecil, yang dijabarkan secara detail sebagaimana berikut.

a) Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi rakyat yang memegang peran penting bagi pemberdayaan masyarakat miskin, terutama yang berada di daerah perdesaan. Sebagai satu diantara pelaku ekonomi, koperasi mempunyai kedudukan yang strategis bagi tatanan perekonomian yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi semestinya bisa menjadi katup penyelamat masyarakat miskin dari jeratan dan lilitan rentenir/lintah darat.

Perkembangan jumlah koperasi dan anggotanya di Kabupaten Sigipada tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah koperasi pada tahun 2016 tercatat sebanyak 84 unit dengan anggota sebanyak 11.495 orang. Tahun 2017 tidak berbeda dengan capain tahun 206. Tidak ada penambahan koperasi atau puengurangn, Selain itu, koperasi juga telah menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sigi. Secara keseluruhan data pertumbuhan jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung naik dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.11
Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017



Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2017 (diolah kembali)

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dapat dilaksanakan dengan baik, apabila semakin banyak koperasi aktif. Semakin aktifnya koperasi tersebut akan mendorong terjadi pergerakan dan perkembangan aktivitas atau usaha ekonomi produktif masyarakat. Jika dilihat pada gambar di atas, koperasi di Kabupaten Sigi tergolong aktif. Dimana hingga tahun 2016 persentase koperasi yang aktif mencapai 94 persen.

Hingga tahun 2017 menurut data BPS yang rilis per september 2017, jumlah koperasi di Kabupaten Sigi sebanyak 84 koperasi, yang terdapat pada setiap kecamatan. Jumlah koperasi di Kabupaten Sigi pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
di Kabupaten Sigi Tahun 2017

N o	Kecamata n	KU D	KS P	KOPK AR	KS U	Lainn ya	Juml ah
1	Pipikoro	-	-	-	-	-	-
2	Kulawi Selatan	1	-	-	-	-	1

3	Kulawi	-	-	-	1	3	3
4	Lindu	-	-	-	1	-	1
5	Nokilalaki	-	-	-	-	1	1
6	Palolo	1	1	-	1	6	9
7	Gumbasa	1	1	-	-	1	3
8	Dolo Selatan	1	-	-	1	-	2
9	Dolo Barat	1	-	-	-	3	4
10	Tanambula	1	-	-	2	1	4
11	Dolo	1	2	-	4	10	17
12	Sigi Boromaru	3	4	1	4	19	31
13	Marawola	2	1	-	1	3	7
14	Marawola Barat	-	-	-	-	-	-
15	Kinovaro	-	-	-	-	1	1
	Sigi	12	9	1	15	47	84

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Petasia merupakan kecamatan Sigi Borimaru dengan jumlah koperasi terbanyak yakni sebesar 31 koperasi, kemudian Kecamatan Dolo sebanyak 17 koperasi, kecamatan dengan jumlah koperasi terkecil yakni Kecamatan Kulawi Selatan, Lindu, Nokilalaki dan Konovaro, dengan jumlah koperasi masing-masing sebanyak 1.

2.2.3 Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Sigi di tinjau dari beberapa indikator capaian kinerja antara lain; Persentase pertambangan tanpa izin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten.

a) Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang belum optimal dalam menyumbangkan pertumbuhan (*engine of growth*) terhadap PDRB Kabupaten Sigi. Berdasarkan data tahun 2018, Persentase kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuatif. Gambaran secara lengkap mengenai kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sigi selama kurun 2013-2017.

Tabel 2.24
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017

Uraian	Dalam Juta Rupiah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian :					
- ADH Berlaku	196.946	230.414	281.059	282.099	306.235
- ADH Konstan	159.457	174.542	190.145	197.900	212.426
Jumlah PDRB :					
- ADH Berlaku	5.401.524	6.066.814	6.686.765	7.371.944	7.931.264
- ADH Konstan	4.571.361	4.872.110	5.177.537	5.471.464	5.773.688
Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB					
- ADH Berlaku	3,65	3,8	4,2	3,83	3,86
- ADH Konstan	3,49	3,58	3,67	3,62	3,68

Sumber: Profil Kabupaten Sigi, Tahun 2018 (diolah)

Persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sigi pada tahun 2016 baik berdasarkan ADH Berlaku maupun ADH Konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2015. Di

mana, pada tahun 2015 persentase kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Sigi ADH Berlaku mencapai 4,20 persen dan ADH Konstan mencapai 3,67 persen. Pada tahun 2016 persentase kontribusi terhadap PDRB ADH berlaku turun menjadi sebesar 3,83%, sedangkan untuk PDRB ADH Konstan turun menjadi sebesar 3,62%. Selanjutnya pada tahun 2017, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian meningkat baik ADH Beralaku (3,86) dan ADH Konstan (3,68%).

Sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor andalan provinsi Sulawesi Tengah dalam memajukan perekonomian daerah. Berikut ini disajikan peta sebaran potensi pertambangan disulawesi tengah dan posisi Kabupaten Sigi.

Tabel 2.25

Potensi dan Sebaran Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tengah

NO	BAHAN GALIAN	CIRI KHAS - LOKASI	KETERANGAN
I.	Batuan Ornamen/poles		
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	<ul style="list-style-type: none"> - Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan. - Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli. 	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM.
2.	Marmer/pualam dan Sarpentin	<ul style="list-style-type: none"> - Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso. - Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai. - Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi 	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.

NO	BAHAN GALIAN	CIRI KHAS - LOKASI	KETERANGAN
		Moutong. - Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II. Batuan Bahan Konstruksi			
3.	Sirtukil	- Terdapat Kota Palu dan disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kab. Donggala dan Kota Palu diantar-pulaukan ke Kalimantan Timur.
III. Mineral Non Logam lainnya			
4.	Batu gamping	- Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5.	Lempung	- Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6.	Pasir Kwarsa	- Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan.	Umumnya mempunyai kadar SiO ₃ kurang dari 75 %.
7.	Gypsum	- Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan
8.	Talk	- Kab. Banggai, dan	Berupa Sisipan

NO	BAHAN GALIAN	CIRI KHAS - LOKASI	KETERANGAN
		Tojo Unauna	pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar MgO3
9.	Dolomit	- Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium) sampai 35 %

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng, 2018.

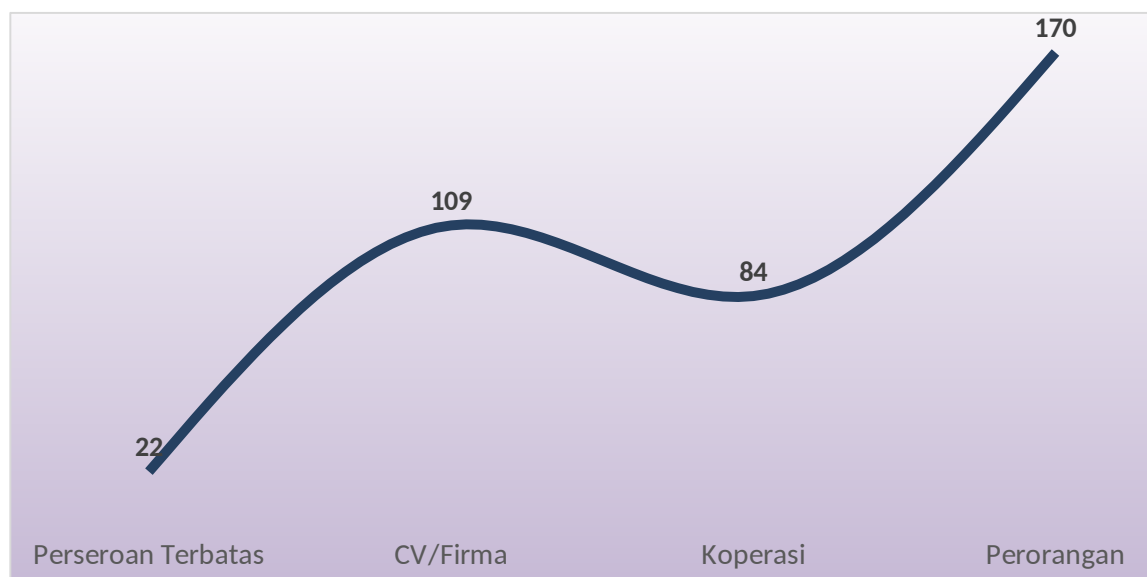
2.2.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar atau kedua setelah sektor pertanian pada perekonomian Kabupaten Sigi, kondisi perdagangan di Kabupaten Sigi digambarkan sebagai berikut:

a). Jumlah Perusahaan menurut Badan Hukum

Kehadiran perusahaan dalam suatu daerah memiliki peran yang positif dalam perkembangan ekonomi daerah melalui kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, serapan tenaga kerja dan lainnya. Mayoritas perusahaan yang berbadan hukum di Kabupaten Sigi adalah usaha Perseorangan sebanyak 170, kemedian Cv/Firma sebanyak 109 dan Koperasi sebanyak 84. Khusus untuk perseroan terbatas jumlahnya masih cukup kecil, yakni sebesar 22 di tahun 2017. Berikut ini digambarkan jumlah perusahaan menurut badan hukum di Kabupaten Sigi tahun 2017:

Gambar 2.12
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum
Kabupaten Sigi Tahun 2017



Sumber: BPS, 2018 (diolah kembali)

b). Jumlah Pedagang

Pedagang berdasarkan ukurannya terbagi atas 3 skala, pedagang skala besar, perdagangan menengah dan pedagang kecil. Sebaran jumlah pedagang di Kabupaten Sigi terdapat diseluruh kecamatan. Jumlah pedagang menurut kecamatan di Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan
Kabupaten Sigi Tahun 2017

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah
1	Pipikoro	3667	1900	63
2	Kulawi Selatan	2065	179	2
3	Kulawi	1089	100	1
4	Lindu	1527	616	39
5	Nokilalaki	801	328	9
6	Palolo	852	354	13
7	Gumbasa	1097	414	14
8	Dolo Selatan	1113	436	32
9	Dolo Barat	974	545	25
10	Tanambulava	1413	377	10
11	Dolo	1158	520	14
12	Sigi Boromaru	1088	521	25
13	Marawola	1385	423	12

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah
14	Marawola Barat	1117	525	20
15	Kinovaro	1300	144	10
Sigi		20646	7382	289

Sumber: BPS, 2018 (diolah kembali)

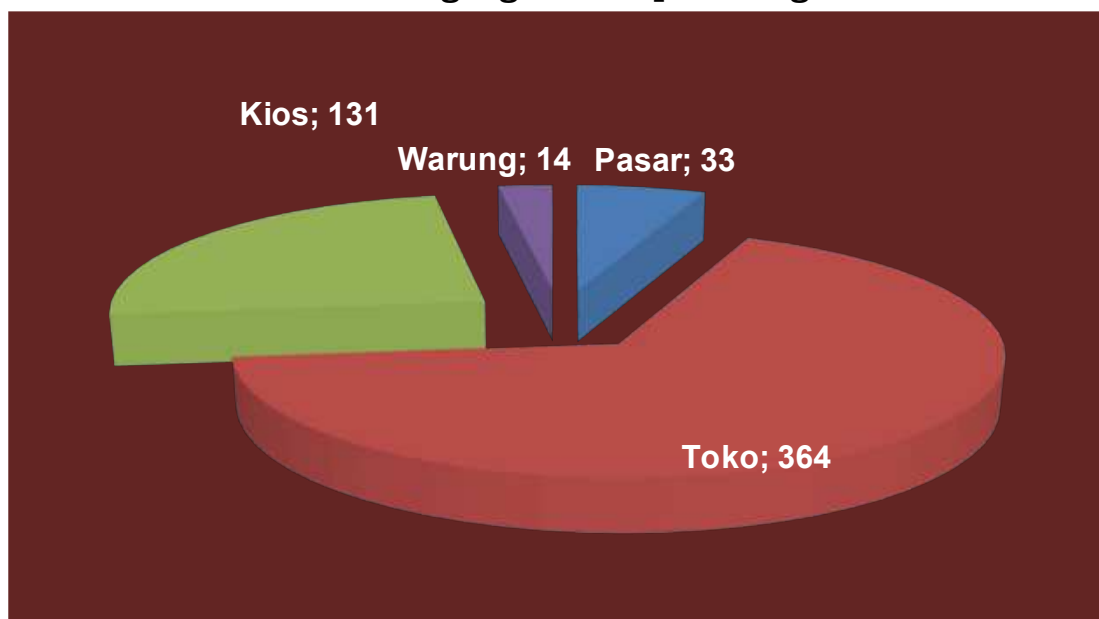
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang di Kabupaten Sigi tergolong kedalam pedagang mikro dengan total 20.646, kemudian pedangan kecil sebanyak 7.382 dan menengah sebanyak 289.

c). Jumlah Sarana Perdagangan

Berikut ini dapat dilihat jumlah sarana perdagangan tahun 2016 di Kabupaten Sigi.

Gambar 2.13

Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Sigi Tahun 2017



Sumber: BPS, 2018 (diolah kembali)

Merujuk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah pasar di Kabupaten Sigi sebanyak 33, toko sebanyak 364 dan kios sebanyak 131 dan warung sebanyak 14.

d). Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor Perdagangan memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sigi. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi kedua tertinggi sehingga termasuk menjadi sektor andalan selain Sektor Pertanian di Kabupaten Sigi. Pada tahun 2015, kontribusi Sektor Perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Sigi berdasarkan ADH Berlaku sebesar Rp 796.815 Juta rupiah dan ADH Konstan 2000 mencapai sebesar Rp 657.288 juta rupiah. Pada tahun 2016 ADH Berlaku sebesar Rp. 946.203 dan ADH Konstan sebesar Rp. 657.288. Selanjutnya pada tahun 2017 Kontribusi sektor perdagangan Untuk ADH Berlaku sebesar Rp.1.013.707,-, sedangkan ADH Konstan sebesar Rp. 683.895,- Secara lengkap mengenai kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sigi selama kurun 2013-2017.

Tabel 2.27
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sigi Tahun, Tahun 2012-2016

Uraian	Dalam Juta Rupiah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perdagangan					
- ADH Berlaku	646.998	721.055	796.815	946.203	1.013.707
- ADH Konstan	545.835	579.744	618.954	657.288	683.895
Jumlah PDRB :					
- ADH Berlaku	5.401.524	6.066.814	6.686.765	7.371.944	7.931.264
- ADH Konstan	4.571.361	4.872.110	5.177.537	5.471.464	5.773.688
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan terhadap PDRB)					
- ADH Berlaku	11,98	11,89	11,92	12,84	12,78
- ADH Konstan	11,94	11,9	11,95	12,01	11,85

Sumber: Profil Kabupaten Sigi, tahun 2018 (diolah kembali)

Persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sigi pada tahun 2015 berdasarkan ADH Berlaku yaitu 11,92

persen sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 sebesar 11,89 persen. Sementara kontribusi sektor Perdagangan berdasarkan ADH Konstan tahun 2015 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi Sektor Perdagangan pada tahun 2014. Di mana, pada tahun 2014 persentase kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sigi ADH Konstan mencapai 11,90 persen kemudian meningkat menjadi 11,95 persen tahun 2015. Kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADH berlaku sebesar 12,84% dan untuk PDRB ADH Konstan sebesar 12,01%. Kemudian di tahun 2017 kontribusi Sektor Perdaganga untuk ADH berlaku sebesar 12,78% dan ADH Konstan sebesar 11,85%. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya terjadi penurunan kontribusi dari tahun 2016.

2.2.5 Otonomi Daerah

Dalam situasi dan kondisi peningkatan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi di Kabupaten Sigi lebih diarahkan pada penataan perekonomian daerah.

a) Jumlah Bank Menurut Jenis dan Cabangnya

Ketersediaan fasilitas bank sangat penting untuk menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas bank tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya yang tersedia dalam suatu daerah. Peranan perbankan di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi sangat besar dalam era pembangunan saat ini, terutama untuk memperlancar arus masuk dan keluarnya uang. Untuk lebih jelasnya mengenai Jumlah Bank dan Cabangnya Menurut Jenis Bank di Kabupaten Sigi tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28

**Jumlah Bank dan Cabangnya Menurut Jenis Bank
Di Kabupaten Sigi, Tahun 2017**

Kelompok Bank	Jenis Bank			Jumlah
	Cabang	Cabang Pembantu	Unit	
Bank Umum	1	2	-	3
Bank Pembangunan Daerah	-	-	-	-
Bank Swasta	-	-	-	-
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-
Jumlah 2017	1	2	-	3

Sumber: Profil Kabupaten Sigi, Tahun 2018

Jumlah kantor bank di Kabupaten Sigi seperti halnya yang tertera dalam tabel diatas sebanyak 3 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang dan 2 (satu) Kantor Cabang. Akses perbankan di Kabupaten Sigi masih kurang maksimal karena masih sedikitnya jumlah bank untuk melayani penduduk yang tersebar di 15 kecamatan.

2.2.6 Fokus Iklim Berinvestasi

a). Angka Kriminalitas

Salah satu indikator untuk menarik iklim investasi adalah adanya kondisi keamanan yang dapat dilihat pada rendahnya tingkat kriminalitas di suatu daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi menunjukkan pada Tahun 2016 jumlah kejahatan menurun drastis dibandingkan tahun 2014. Tahun 2014 tercatat sebanyak 192 kasus sedangkan pada tahun 2016 hanya ada 30 kasus kejahatan terhadap jiwa/badan. Pada tahun 2016 juga kasus kejahatan terhadap barang/benda juga mengalami penurunan tajam dibanding tahun 2014, yaitu dari 225 kasus menjadi 47 kasus, dimana kasus kategori pencurian biasa merupakan yang tertinggi yakni 14 kasus. Untuk tahun 2017 kasus kejahatan terhadap badan sebanyak 289, sedangkan untuk kejahatan terhadap benda sebanyak 731. Tingginya angka kejahatan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Mengingat salah satu faktor meningkatnya iklim investasi di suatu daerah adalah tingkat kemannya. Data kasus kejahatan di Kabupaten Sigi tahun 2013-2017 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29

**Banyaknya Kejahatan Terhadap Jiwa/Badan dan Harta Benda
Menurut jenisnya tahun 2012-2016**

No	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A. Kejahatan Terhadap Badan / <i>Crime Against Soul / Body</i>						
1	Penganiayaan Berat / <i>Hard Assault</i>	16	17	-	1	158
2	Penganiayaan Ringan / <i>Light Assault</i>	36	19	-	14	-
3	Pengeroyokan	30	49	-	3	31
4	Perzinahan	16	13	-	1	14
5	Perkosaan	2	6	-	1	8
6	Pencabulan	13	19	-	2	5
7	Pembunuhan	-	3	-	-	1
8	Pelecehan Seksual	-	19	-	-	-
9	Penculikan Anak	-	-	-	-	-
10	Asusila	-	-	-	-	-
11	KDRT	28	39	-	5	66
12	Kesopanan	-	-	-	1	-
13	Pencurian dengan kekerasan	-	8	-	2	6
14	Percobaan Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah		141	192	0	30	289
B. Kejahatan Terhadap Benda / <i>Crime Against Thing</i>						
1	Perampasan Hak	6	7	-	2	25
2	Pembakaran	3	7	-	3	3
3	Pemalsuan Surat	5	5	-	-	6
4	Pencurian Biasa	61	43	-	14	420
5	Pencurian Berat	9	35	-	-	-
6	Pencurian Kendaraan bermotor	10	3	-	-	73
7	Pencurian Dalam Keluarga	13	-	-	-	-
8	Penggelapan	28	21	-	5	64
9	Penipuan	17	50	-	5	74
10	Perjudian	44	2	-	7	-
11	Pengrusakan	2	42	-	6	43
12	Illegal logging	-	-	-	-	-

No	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
13	Senjata rakitan	3	-	-	3	3
14	Perampasan hak tanah	-	7	-	-	20
15	Narkoba	-	-	-	-	-
16	Penyerobotan tanah	-	3	-	2	-
17	Migas	-	-	-	-	-
18	Penghinaan Bendera	-	-	-	-	-
19	Miras	-	-	-	-	-
20	Pengrusakan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-
21	UU Kesehatan	-	-	-	-	-
Jumlah		201	225	0	47	731

Sumber: BPS, Kabupaten Sigi Dalam Angka Tahun 2018, diolah kembali

2.3 SARANA DAN PRASARANA

2.3.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur fisik terutama pembangunan jalan merupakan prasarana transportasi yang menghubungkan pusat kegiatan di suatu daerah dengan wilayah lainnya. Ketentuan itu bermuara pada pemerataan pembangunan baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan masyarakat sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. Untuk itu, dibutuhkan upaya rehabilitasi jaringan jalan yang mengalami kerusakan dimana rehabilitasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan kondisi jaringan jalan pada keadaannya yang semula.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata

lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Gambaran secara lengkap mengenai panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sigi selama kurun waktu 2012-2016 sebagai berikut.

Tabel 2.30
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kabupaten Sigi
Berdasarkan Kondisi Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan kondisi baik	90,6	58,14	72,8	72,8	194,65
Panjang jalan keseluruhan	634,94	462,92	462,94	462,94	1153,2
Persentase	14,27	12,56	15,73	15,73	16,88

Sumber: BPS Kabupaten Sigi tahun 2018 (diolah kembali)

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Sigi mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 142,16 Km atau 22,39 persen dari panjang jalan keseluruhan 634,94 Km, data tersebut jika dibanding pada tahun 2016 menurun menjadi sepanjang 72,80 Km dari total panjang jalan 462,94 Km. Pada tahun 2017 panjang jalan di Kabupaten Sigi 1.153,2 Km. Dengan persentas jalan dalam kondisi baik sebesar 16,88%, meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 persentase panjang jalan yang dalam kondisi baik sebesar 15,73% dari total 462,94 Km. Panjang jalan dalam kondisi baik mencapai 194,65 km. Atau sebesar 16,88%. Capaian ini masih tergolong sangat rendah, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka membangun industri di Kabupaten Sigi. Berikut ini secara rinci digambarkan kondisi jalan pada setiap di Kabupaten Sigi:

Tabel 2.31
Kondisi Panjang Jalan yang Dikelola Pemerintah
Kabupaten Sigi 2016-2017

Permukaan Jalan	Negara	Provinsi	Kabupaten	
		2017	2016	2017
Baik	-	10,07	70,8	194,65
Sedang	-	173,63	169,95	283,96
Rusak	-	12,4	82,26	251,12
Rusak Berat	-	5,46	173,93	423,42
Jumlah	-	201,56	462,94	1153,15

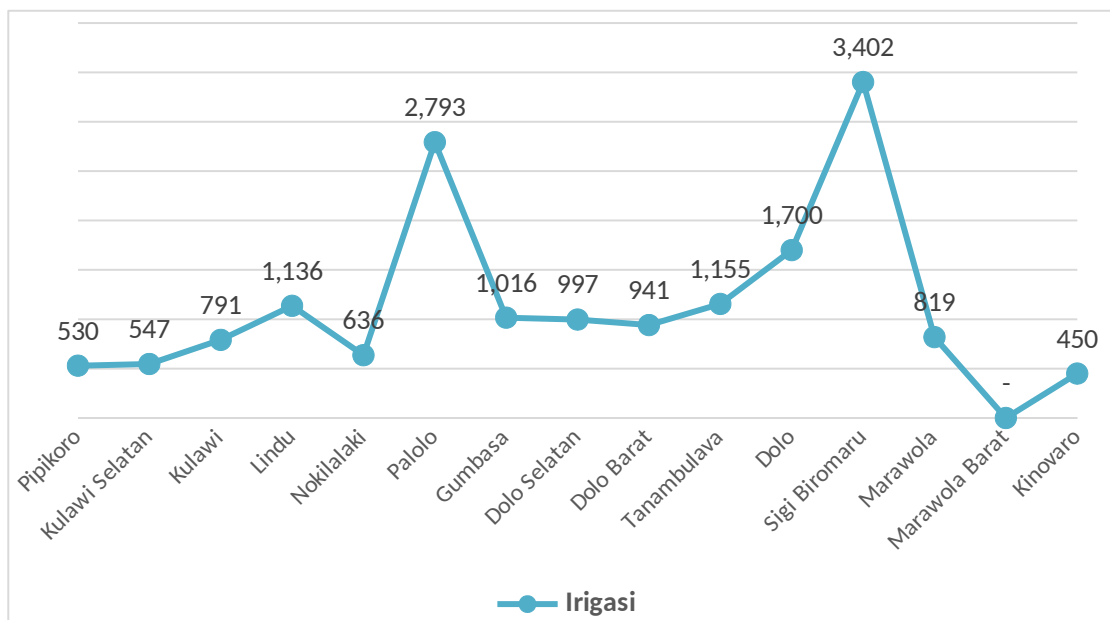
Sumber: BPS, Tahun 2018

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kondisi jalan di Kabupaten Sigi secara umum dalam kondisi rusak berat dengan total 173,94 Km. Selanjutnya jalan kondisi rusak sepanjang 82,26 Km, kondisi sedang 169,95 Km dan dalam kondisi baik 70,80 Km. Selanjutnya pada tahun 2017 total panjang jalan di Kabupaten sigi meningkat signifikan menjadi 1.153,15 km. Dimana jalan dalam kondisi baik mencapai 194,65 km, kondisi jalan dengan status sedang sebesar 283,96 km, jalan dengan kondisi rusak sepanjang 251,12 km. Dan Jalan dalam kondisi rusak berat yakni 423,42 Km. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, mengingat aksesibilitas merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah.

b). Ketersediaan Jaringan Irigasi

Infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan adalah ketersediaan Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaannya. Luas lahan yang beririgasi di Kabupaten Sigi masih terbatas atau kecil jumlahnya, jika dibanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Data persentase ketersediaan irigasi dan luas lahan budidaya di Kabupaten Sigi menurut Kecamatan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Jaringan Irigasi Kabupaten Sigi
Menurut Kecamatan, Tahun 2017



Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2018 (diolah)

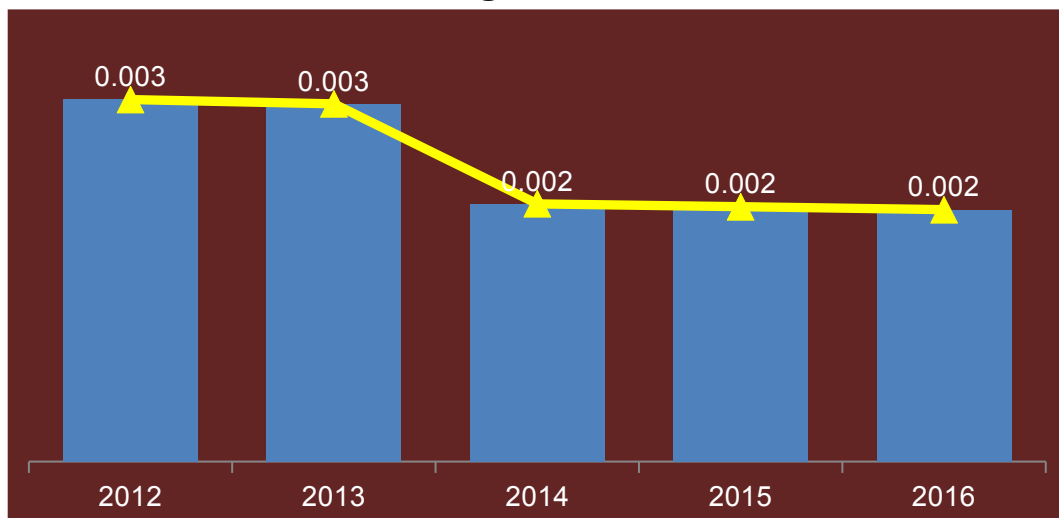
Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, jumlah luas lahan pertanian yang beririgasi di Kabupaten Sigi pada tahun 2016 sebanyak 16.861 Ha. Dimana dapat dilihat luas lahan beririgasi terbesar yaitu pada Kecamatan Sigi Biromaru dengan luas 3.240 Ha, sementara luas lahan beririgasi terkecil terletak pada Kecamatan Kinovaro dengan luas lahan 440 Ha, sementara kecamatan yang tidak memiliki lahan beririgasi tahun 2017 yaitu Kecamatan Marawola Barat.

c). Panjang Jalan Dilalui Roda 4

Ketersediaan panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat memberikan indikasi kuat mengenai pergerakan moda transportasi yang mengangkut orang dan barang/jasa. Semakin panjang jalan yang dilalui kendaraan roda empat, menunjukkan semakin luas daya jangkau kendaraan roda empat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut. Atau sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui kendaraan roda empat menunjukkan semakin pendek daya jangkau kendaraan roda empat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur jalan yang baik menjadi urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gambaran secara lengkap mengenai Rasio panjang Jaringan jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Sigi selama kurun waktu 2012-2016.

Gambar 2.15
Rasio Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
Kabupaten Sigi Tahun 2012-2016



Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2017 (diolah kembali)

Merujuk pada Gambar di atas, memperlihatkan kinerja jaringan jalan berdasarkan ketersediaan jalan yang dikategorikan dengan kondisi jalan baik. Rasio kondisi jalan baik di Kabupaten Sigi terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 sebesar 0,003 namun pada tahun 2016 justru menurun menjadi 0,002.

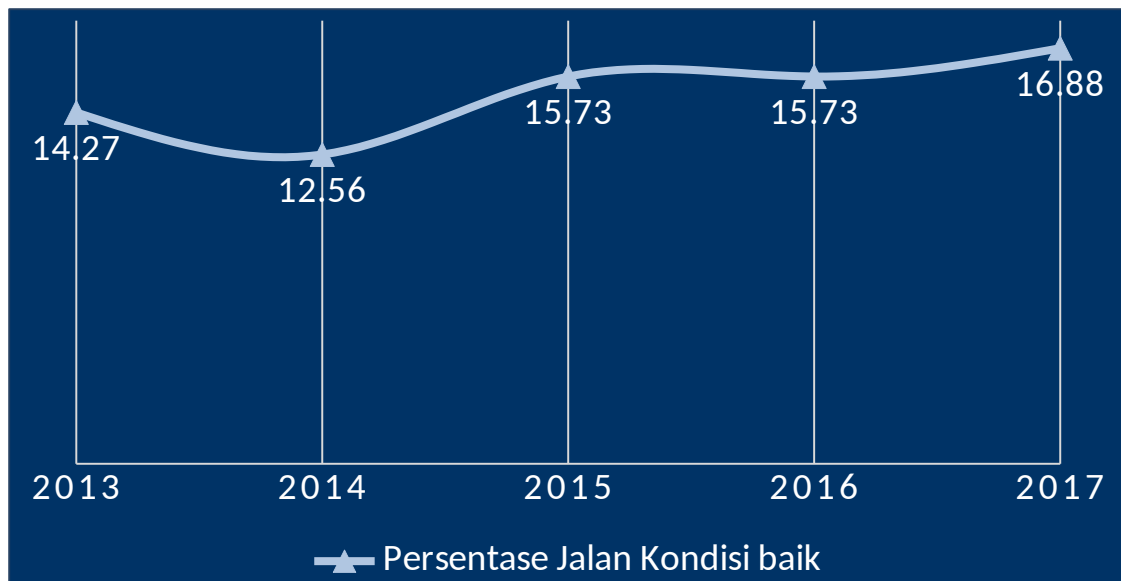
d). Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Panjang jalan Kabupaten merupakan sarana jalan yang dibangun sendiri dan dipelihara sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sigi. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan kemampuan daerah Kabupaten untuk meningkatkan ketersediaan sarana jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah terpencil dan membuka daerah terisolasi, serta untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah (Kecamatan dan desa) di Kabupaten. Semakin panjang jalan Kabupaten semakin tinggi tingkat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sigi, atau

sebaliknya semakin pendek jalan Kabupaten semakin rendah tingkat konektivitas antar wilayah di daerah setempat.

Gambaran umum ketersediaan jalan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten Sigi hingga tahun 2016 sepanjang 72,80 Km atau Jalan 15,73 persen dari panjang jalan keseluruhannya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten sepanjang 462,94 Km. Dari total keseluruhan jalan tersebut sebesar 17,73% jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016, menurun drastis dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan jalan yang belum selesai. Selanjutnya pada tahun 2017 persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 16,88%. Secara lebih jelas data mengenai Kondisi Panjang Jalan dalam kondisi baik Kabupaten Sigi sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.16
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
Di Kabupaten Sigi, Tahun 2013-2017



Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2018 (diolah kembali)

2.3.2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

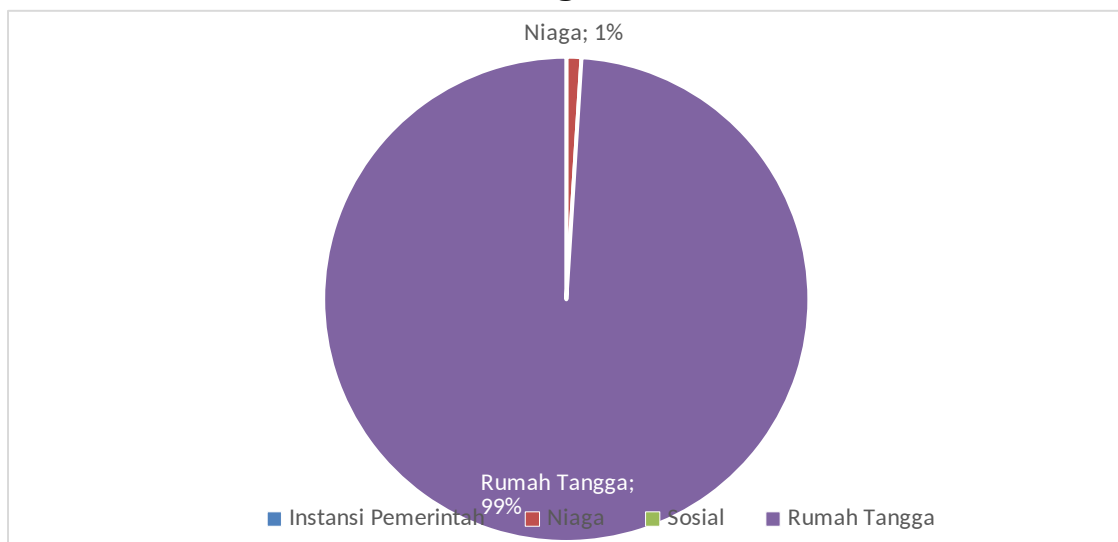
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari indikator kinerja diantaranya; Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rumah Tangga Ber-Sanitasi, Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni.

a) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih yang cukup bagi rumah tangga merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi kesehatan masyarakat. Gambaran umum ketersediaan air bersih dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih (*dean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sumber air bersih dapat dibedakan atas sumur dan air dalam tanah.

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih bertalian erat dengan urusan perumahan. Berdasarkan data perkembangan suplai air bersih atau Air Minum Layak Kabupaten Sigi pada tahun 2016 jumlah air bersih yang terdistribusi 469.045 meter kubik dengan jumlah pelanggan yang tercatat sebanyak 2.485 pelanggan dengan persentase palanggan rumah tangga sebesar 99%, sosial 1% dan instansi 0%. Data detail proporsi rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sigi disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.17
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Sigi Tahun 2017

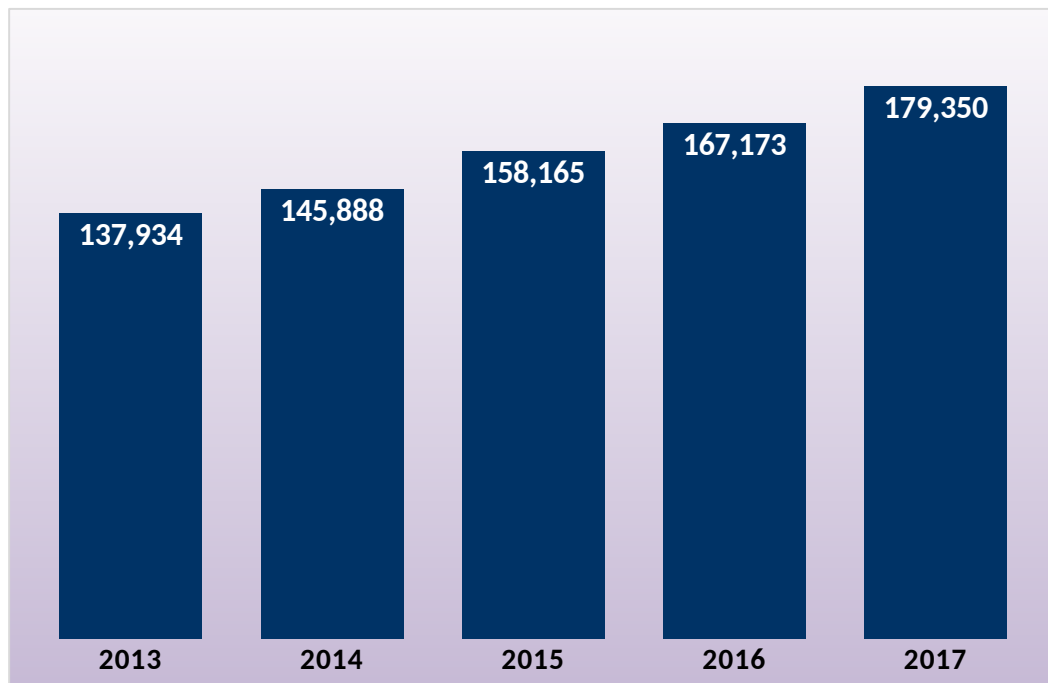


Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2018 (diolah kembali)

b) Jumlah Pelanggan Listrik

Secara umum sumber energi listrik di Kabupaten Sigi dihasilkan menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), selain itu juga terdapat beberapa pembangkit menggunakan tenaga air. Tenaga listrik yang diproduksi oleh PT. PLN Wilayah VII Cabang Palu pada tahun 2016 berhasil didistribusikan kepada pelanggan baik rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain. Data jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sigi disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.18
Jumlah Pelanggan Listrik
Kabupaten Sigi Tahun 2013-2017



Sumber: Profil Kabupaten Sigi tahun 2018 (diolah kembali)

Berdasarkan Gambar di atas, terlihat jumlah pengguna listrik di Kabupaten Sigi hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 158.165. Dan mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi 167.173 pelanggan yang telah menikmati aliran listrik. Ditahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi 179.350 pelanggan, Capaian kinerja terkait elektrifikasi tersebut masih jauh dari capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.

Rasio elektrifikasi Kabupaten Sigi mencapai 84,74% Selanjutnya rasio elektrifikasi Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Rasio Elektrifikasi Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Elektrifikasi Rumah Tangga		Rasio Elektrifikasi
						Berlistrik	Belum	
1	Banggai Kepulauan	12	144	116.218	32.325	22.911	9.414	70,88%
2	Banggai	23	337	351.737	95.325	84.868	10.457	89,03%
3	Morowali	9	133	118.937	30.659	26.903	3.756	87,75%
4	Poso	19	170	229.162	57.563	53.521	4.042	92,98%
5	Donggala	16	167	307.144	76.077	61.535	14.542	80,89%
6	Toli-Toli	10	105	232.726	55.777	48.164	7.613	86,35%
7	Buol	11	115	152.894	35.389	28.616	6.773	80,86%
8	Parigi Moutong	23	257	464.471	111.722	93.303	18.419	83,51%
9	Tojo Una-Una	9	145	145.638	37.552	30.796	6.756	82,01%
10	Sigi	15	177	249.855	63.329	53.665	9.664	84,74%
11	Banggai Laut	7	66	67.199	17.469	13.274	4.195	75,99%
12	Morowali Utara	10	125	118.566	30.417	24.930	5.487	81,96%
13	Palu	8	45	438.247	104.383	104.105	278	99,73%
TOTAL		172	1.986	2.992.794	747.987	646.591	101.396	86,44%

Sumber: Dinas ESDM Sulteng, 2018

Tabel 2.33
Rasio Elektrifikasi Yang Di Bawah 50% Kabupaten Sigi Tahun 2017

NAMA KEC	NAMA_DESA	Jumlah KK	KK Berlistrik	RE Desa
PIPIKORO	KALAMANTA	83	30	36,14%
PIPIKORO	MAMU	77	30	38,96%
PIPIKORO	BANASU	147	25	17,01%
PIPIKORO	MAPAHI	134	14	10,45%
PIPIKORO	PEANA	270	25	9,26%
PIPIKORO	MORUI	103	0	0,00%
PIPIKORO	KANTEWU	257	0	0,00%

NAMA KEC	NAMA_DESA	Jumlah KK	KK Berlistrik	RE Desa
PIPIKORO	LAWE	87	0	0,00%
PIPIKORO	LONE BASA	201	78	38,81%
PIPIKORO	ONU	347	90	25,94%
PIPIKORO	KANTEWU II	255	0	0,00%
PIPIKORO	PORELEA	157	0	0,00%
PIPIKORO	TUWO TANIJAYA	64	18	28,13%
PIPIKORO	PORELEA II	110	39	35,45%
KULAWI SELATAN	MOA	101	14	13,86%
KULAWI SELATAN	PILI MAKUJAWA	142	72	50,70%
KULAWI	BANGGAIBA	115	0	0,00%
KULAWI	RANTEWULU	82	31	37,80%
LINDU	PURO'O	229	115	50,22%
LINDU	ANCA	85	42	49,41%
DOLO BARAT	BALUMPEWA	201	60	29,85%
DOLO	WATURALELE	220	14	6,36%
MARAWOLA BARAT	PANESIBAJA	150	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	WIAPORE	155	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	ONGULERO	112	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	SOI	350	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	WAWUGAGA	354	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	DOMBU	262	72	27,48%
MARAWOLA BARAT	TAIPANGGABE	63	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	WAYU	100	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	MATANTIMALI	166	44	26,51%
MARAWOLA BARAT	LEMOSIRANINDI	127	0	0,00%
MARAWOLA BARAT	WAWUJAI	182	4	2,20%
KINOVARO	RONDINGO	154	33	21,43%
KINOVARO	POBOLOBIA	100	5	5,00%
KINOVARO	DODA	395	198	50,13%
KINOVARO	KAYUMPIA	127	25	19,69%

Sumber: Dinas ESDM Sulteng, 2018

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Saat ini, isu utama, urgen dan kekinian berkaitan dengan permasalahan pembangunan di sektor perindustrian adalah bagaimana mengatasi dan mengurai permasalahan pembangunan industri seperti masih lemahnya daya saing industri nasional dan daerah, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri baik nasional maupun daerah

termasuk Industri kecil menengah (IKM). Struktur perindustrian saat ini masih terfokus pada industri ekstraktif yang outputnya masih berupa barang setengah jadi sehingga nilai tambah yang didapat baik daerah maupun nasional belum maksimal, pada industri kecil menengah juga banyak gulung tikar akibat arus barang murah masuk tidak terfilterisasi dengan baik, kemudian suku bunga yang masih cukup tinggi membuat pelaku IKM terkendala dalam segi permodalan, sehingga wajar saat ini jika sektor pertanian masih menjadi sektor yang memberi kontribusi paling tinggi dalam struktur perekonomian daerah maupun nasional. Sektor perindustrian harus di dorong oleh pemerintah karena salah satu syarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu bergesernya perekonomian dari sektor tradisional atau pertanian kesektor modern atau industri.

Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten dengan potensi industri yang cukup baik di Sulawesi Tengah. Berikut ini gambaran kondisi industri di Kabupaten Sigi.

2.4.1 Pertumbuhan Industri

Trend membaiknya perekonomian nasional dan regional, khususnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor pendorong pertumbuhan Sektor Industri daerah, termasuk kondisi industri di Kabupaten Sigi. Kondisi tersebut menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi daerah yang makin membaik dari tahun sebelumnya, terutama jumlah perusahaan industri dan daya serap tenaga kerja yang naik dari tahun ke tahun. Hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai tambah (*value added*) Sektor Industri terhadap pendapatan regional Kabupaten Sigi. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.34

Jumlah Industri Kecil dan Menengan dan Industri Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi Tahun 2017

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah	Industri Rumah Tangga
1	Pipikoro	10	16
2	Kulawi Selatan	82	19

No	Kecamatan	Industri Kecil dan Menengah	Industri Rumah Tangga
3	Kulawi	15	14
4	Lindu	7	13
5	Nokilalaki	12	10
6	Palolo	3	10
7	Gumbasa	4	11
8	Dolo Selatan	11	16
9	Dolo Barat	4	16
10	Tanambulava	6	12
11	Dolo	6	10
12	Sigi Boromaru	9	10
13	Marawola	2	10
14	Marawola Barat	7	12
15	Kinovaro	56	10
Sigi		234	189

Sumber: BPS, tahun 2018 (diolah kembali)

Seperti yang tersaji pada Tabel di atas, jumlah IKM di Kabupaten sigi sebanyak 234 IKM yang tersebar di seluruh Kecamatan. IKM terbanyak terdapat di Kecamatan Kulawi Selatan, dengan jumlah IKM sebanyak 82 IKM. Kemudian kecamatan Kinovaro sebanyak 56 IKM. Kecamatan Marawola merupakan kecamatan dengan jumlah IK terkecil di Kabupaten Sigi. Selanjutnya untuk industri Rumah tangga sebanyak 189 di tahun 2017 yang juga tersebar hampir di seluruh kecamatan Kabupaten Sigi. Terbanyak terdapat di Kecamatan Kulawi Selatan yakni 19 industri RT, dan Kecamatan pipikor, Dolo Barat dan Dolo Selatan dengan jumlah Industri RT sebanyak 16.

2.4.2 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor kunci (*key sector*) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Sigi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan PDRB Kabupaten Sigi. Gambaran lengkap persentase kontribusi Sektor Industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sigi selama kurun 2012-2017 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Sigi Tahun 2012-2017

Uraian	Dalam Juta Rupiah					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan						
- ADH Berlaku	91.521	102.179	113.742	124.064	138.707	149.390
- ADH Konstan	83.650	88.373	93.783	98.572	101.912	108.641
Jumlah PDRB :						
- ADH Berlaku	4.823.589	5.401.524	6.066.814	6.686.765	7.371.944	7.931.264
- ADH Konstan	4.276.605	4.571.361	4.872.110	5.177.537	5.471.464	5.773.688
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan						
- ADH Berlaku	1,9	1,89	1,87	1,86	1,88	1,88
- ADH Konstan	1,96	1,93	1,92	1,9	1,86	1,88

Sumber: BPS, tahun 2018 (diolah kembali)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, persentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Sigi berdasarkan ADH Berlaku tahun 2015 mencapai 1,86 persen dan berdasarkan ADH Konstan mencapai 1,90 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (kurun 2012-2016) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan ADH Berlaku maupun ADH Konstan. Hingga tahun 2016 kontribusi sektor industri masih terbilang sangat rendah, yakni hanya pada kisaran 1% saja. Kontribusi terhadap PDRB berlaku sebesar 1,88% dan PDRB Konstan sebesar 1,86%. Pada tahun 2017 persentase kontribusi sektor industri pengolahan masih sangat rendah, masing-masing hanya sebesar 1,88%.

Selanjutnya gambaran konsisi industri hingga tahun 2017 di Kabupaten Sigi ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.36

Jumlah Industri, Tenaga Kerja dan Investasi Di Kabupaten Sigi tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS INDUSTRI									JUMLAH TOTAL INDUSTRI PERKECAMATAN	JUMLAH TOTAL TENAGA KERJA PERKECAMATAN	JUMLAH TOTAL INVESTASI PERKECAMATAN (Rp.000)
		INDUSTRI HASIL PERTANIAN			INDUSTRI HASIL LOGAM, MESIN & ANEKA			INDUSTRI HASIL HUTAN BAHAN BANGUNAN DAN KERAJINAN					
		JI	TK	J.INV (Rp.000)	JI	TK	J.INV (Rp.000)	JI	TK	J.INV (Rp.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SIGI BIROMARU	63	147	488.491	55	137	611.840	106	835	1.629.380	224	1.119	2.729.711
2	TANAMBULAVA	12	28	138.118	8	9	131.000	6	24	113.700	26	61	382.818
3	DOLO	19	65	201.858	38	77	237.045	47	64	188.470	104	206	627.373
4	GUMBASA	44	67	93.361	7	11	91.000	25	44	241.184	76	122	425.545
5	MARAWOLA	30	125	1.022.492	12	36	299.060	46	182	683.460	88	343	2.005.012
6	KINOVARO	6	11	7.500	9	14	50.440	8	14	64.940	23	39	122.880
7	NOKILALAKI	11	24	270.500	5	12	20.400	8	16	15.000	24	52	305.900
8	PALOLO	38	134	47.954	21	80	231.075	27	108	44.180	86	322	323.209
9	DOLO SELATAN	8	18	45.700	11	24	103.875	14	48	124.000	33	90	273.575
10	KULAWI	3	15	14.000	16	33	101.595	20	72	26.000	39	118	141.595
11	MARAWOLA BARAT	25	25	12.500	13	15	33.000	9	9	9.000	47	49	54.500
12	DOLO BARAT	14	28	61.856	19	57	56.360	6	9	1.000	39	94	119.216
13	KULAWI SELATAN	-	-	-	6	9	134.600	6	27	29.650	12	36	164.250
14	PIPIKORO	4	8	5.000	4	12	76.485	1	2	-	9	22	81.485
15	LINDU	16	60	64.000	-	-	-	8	23	8.000	24	83	72.000
JUMLAH TOTAL		293	755	2.473.330	224	526	2.177.775	337	1.477	3.177.964	854	2.756	7.829.069

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi, tahun 2018

BAB 3

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039



3.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI

Perumusan visi pembangunan industri Kabupaten Sigi mengacu pada visi pembangunan industri nasional, visi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi, dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi. Berikut ini adalah penjelasan tentang telaahan berbagai visi dalam dokumen perencanaan sebelumnya yang dijadikan dasar perumusan visi pembangunan industri Kabupaten Sigi.

3.1.1. Telaahan Visi Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Dalam menentukan arah pembangunan industri Kabupaten Sigi, harus mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi Pembangunan Industri Nasional bercirikan 3 hal sebagai berikut:

- 1) Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
- 2) Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
- 3) Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- 2) Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- 3) Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- 4) Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
- 5) Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
- 6) Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- 7) Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- 8) Melakukan pembangunan industri hijau;
- 9) Melakukan pembangunan industri strategis;
- 10) Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

3.1.2. Visi Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah (RPIP)

Selain visi misi pembangunan industri nasional, yang menjadi pijakan dalam perumusan visi misi pembangunan industri Kabupaten Sigi adalah visi

misi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah yaitu:

“Terwujudnya Industri Sulawesi Tengah yang Tangguh, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Pengolahan Sumber Daya Alam”.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian Misi pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Mengembangkan industri Prioritas/Andalan yang maju
Guna mencapai industri yang berdaya saing, maka Sulawesi Tengah menetapkan prioritas industri Prioritas/Andalan, yaitu industri hulu agro, pangan (buah-buahan, ikan rumput laut), logam dasar dan bahan galian, serta kimia dasar.
2. Memperluas perwilayahan industri yang berdaya saing
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kawasan untuk perwilayahan industri sesuai dengan RTRW nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, dan RTRW kabupaten/kota. Kawasan tersebut telah diperuntukkan untuk WPI, WPPI, KPI, KI, sentra IKM.
3. Membangun sumberdaya industri yang berkelanjutan
Dukungan sumberdaya industri termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan modal yang sangat esensial dalam menunjang keberhasilan pembangunan industri. Olehnya itu pemanfaatan SDA harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan didukung oleh SDM yang berkualitas dan bijaksana.
4. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung industri maju
Pembangunan industri harus didukung oleh infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya akses ke kawasan industri.
5. Mengoptimalkan pemberdayaan industri, teknologi dan inovasi menuju industri tangguh.
Pembangunan industri di Sulawesi Tengah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Olehnya itu harus ada sinergi dalam pemberdayaan industri dari industri besar, menengah, dan kecil. Selain itu, pemerintah mendorong adanya transfer teknologi dan inovasi dari luar atau dari industri besar ke industri kecil, sehingga memajukan perekonomian daerah.

3.1.3. Telaahan Visi RPJPD Kabupaten Sigi

Visi Kabupaten Sigi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2005–2025, yaitu:

“PERTANIAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN BERBUDAYA.”

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi:

1. Peningkatan dan pengembangan sector pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi;
2. Peningkatan dan pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian, budaya, alam dan lingkungan;
3. Peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM/IKM sebagai bagian dari pilar ekonomi;
4. Peningkatan standar kesehatan masyarakat dan pemerataan jaminan layanan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas SDM di segala bidang;
6. Pelestarian dan pengembangan budaya kearifan lokal;
7. Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
8. Peningkatan pembangunan infrastruktur secara ideal dan merata pada seluruh wilayah;
9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada semua jenjang pemerintahan pada seluruh wilayah;
10. Peningkatan dan pengembangan kerjasama anta sektor dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
11. Peningkatan kelestarian hutan dan lingkungan hidup;
12. Peningkatan harmoni social dan kesiagapan bencana.

3.1.4. Telaahan Visi RPJMD Kabupaten Sigi

Mengacu pada visi RPJPD tersebut, maka ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Sigi 2016–2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sigi Yang Maju, mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan”

Penjabaran visi tersebut dapat dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perumusan Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021

Perumusan Penjelasan Visi		
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Terwujudnya Kabupaten Sigi Yang Maju, mandiri	Maju, Mandiri dan Ekonomi Kerakyatan	Maju: berarti suatu kondisi daerah yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi serta antisipatif terhadap berbagai dampak baik positif maupun

Perumusan Penjelasan Visi		
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Berbasis Ekonomi Kerakyatan”		negative yang mungkin akan timbul akibat dari perubahan itu sendiri, sehingga daerah dapat menempatkan diri dan memainkan peran serta secara positif serta sinergis dalam melaksanakan pembangunan.
		Mandiri: adalah gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat mewujudkan kemandirian, yang merupakan rangkaian proses sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk melakukan perubahan lebih baik guna mencapai kesejahteraan.
		Ekonomi Kerakyatan: merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sendiri sebagai kegiatan ekonomi rakyat sendiri sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut usaha mikro kecil dan menengah terutama meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya, ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.
		Maju, Mandiri dan berbasis Ekonomi Kerakyatan menjadi suatu kesatuan utuh untuk mewujudkan Kesejahteraan . Perwujudan kesejahteraan diupayakan melalui pembangunan manusia , yang diukur melalui Indeks

Perumusan Penjelasan Visi		
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>Pembangunan Manusia, yang merupakan indeks komposit yang terdiri dari sektor Pendidikan (indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah), sektor kesehatan (indeks usia harapan hidup) dan sektor ekonomi (indeks daya beli). Pengembangan sektor ekonomi (fokus pada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pendapatan) dengan mengedepankan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh pemerintahan yang baik dan bersih, serta terciptanya ketertiban, keamanan dan keharmonisan di masyarakat,</p>

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
2. Meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan;
3. Menegakan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Supermasi Hukum dan Ham;
4. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial;
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan.

3.1.5. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri daerah perlu mengacu kepada beberapa kebijakan Nasional dandaerah yaitu:

- 1) Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 6 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 3) Rencana Tata Ruang Kabupaten Sigi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 21 tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sigi.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- 5) Arah pembangunan Industri berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2015 yaitu Misi Peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM/IKM sebagai bagian dari pilar ekonomi.
- 6) Prioritas Pembangunan Bidang Perindustrian berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (PERINDAG) Kabupaten Sigi 2016-2021.

Mengacu pada visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, visi pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam dokumen RPIP, visi RPJPD Kabupaten Sigi, dan visi RPJMD Kabupaten Sigi, maka rumusan visi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Industri Kabupaten Sigi yang Maju,
Berbasis pada Pengolahan Hasil Sumberdaya Pertanian.”***

Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam visi tersebut, yaitu Maju dan Sumberdaya lokal dan Pertanian.

Tabel 3.2
Perumusan Penjelasan Visi Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039

Perumusan Penjelasan Visi Industri Kabupaten		
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	<i>Maju</i>	Maju: berarti suatu kondisi Industri daerah yang berkembang melangka kedepan dimana Industri lebih baik dari kondisi saat ini, sehingga daerah dapat menempatkan diri dan memainkan peran serta secara positif serta sinergis dalam melaksanakan pembangunan.

Perumusan Penjelasan Visi Industri Kabupaten		
Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>“Terwujudnya Industri Kabupaten Sigi yang Maju, Berbasis pada Pengolahan Hasil Sumberdaya Pertanian.”</i>	<i>Berbasis Sumberdaya Pertanian</i>	Sumberdaya Pertanian adalah segala potensi sumberdaya yang dimiliki baik manusia maupun sumberdaya alam Pertanian. SDA yang dimaksud adalah hasil Pertanian dalam arti luas adalah semua kegiatan yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan. Pengembangan industri pertanian di Kabupaten Sigi diprioritaskan pada komoditi jagung dari hulu hingga hilir, sehingga sejalan dengan program nasional dalam hal hilirisasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan industri lain yang potensial yaitu Untuk Komuditas Pertanian adalah Jagung, Kacang tanah, kacang hijau. Untuk perikanan yaitu Perikanan air tawar, Budidaya ikan danau, Untuk komoditas Holtikultura (sayur-sayuran) yaitu Umbi-umbian. Untuk komoditas perkebunan yang potensial adalah Kelapa Dalam, Coklat, Cengkeh, Kopi komoditas buah-buahan adalah Buah-Buahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Popaya California dll), Pengolahan Ubi Unggu (Tortila), Pengolahan Biji Kopi (Toratima), ; komoditas peternakan dan unggas Ayam Kampung, Ayam Petelur, Ayam potong, Sapi dan domba ekor gemuk.

Misi yang akan dicapai adalah :

- 1) Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.**
- 2) Memajukan sumberdaya Manusia pelaku industri.**

- 3) **Membangun sarana prasarana industri yang maju**
- 4) **Mengembangkan perwilayahan dan sentra industri kecil menengah (IKM) skala Kabupaten dan kecamatan.**
- 5) **Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta pemanfaatan teknologi platform digital.**
- 6) **Mejudukan industri hijau (sigi hijau) yang maju melalui pemberdayaan dan penataan kelembagaan indutsri.**

Keterkaitan Visi dan Misi Industri Kabupaten Sigi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi dan Misi RPIK Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039

Visi	Misi
“Terwujudnya Industri Kabupaten Sigi yang Maju, Berbasis pada Pengolahan Hasil Sumberdaya Pertanian.”	1. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.
	2. Memajukan sumberdaya Manusia pelaku industri.
	3. Membangun sarana prasarana industri yang maju
	4. Mengembangkan perwilayahan dan sentra industri kecil menengah (IKM) skala Kabupaten dan kecamatan.
	5. Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta Pemanfaatan teknologi platform digital.
	6. Mejudukan industri hijau (sigi hijau) yang maju melalui pemberdayaan dan penataan kelembagaan indutsri.

Penjelasan masing-masing misi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Pembangunan industri di daerah harus mengacu pada prioritas industri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang didasarkan pada *local resources* yang dimiliki oleh daerah. Terdapat sembilan sektor industri yang akan terus dikembangkan dan menjadi Prioritas/Andalan nasional terdiri atas industri berbasis pangan, ikan dan produk olahan hulu agro, tekstil dan produk dan tekstil, alas kaki, kulit, dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar, besi, dan baja.

Sementara itu, akselerasi industrialisasi pun diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagai bagian dari pembangunan industri nasional jangka panjang. Percepatan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Hal tersebut terdiri atas upaya mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah dan sumber energi, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan integrasi pasar domestik.

Misi 2: Memajukan sumberdaya Manusia pelaku industri.

Sumberdaya industri Kabupaten Sigi harus ditingkatkan agar dapat berdaya saing. Sumberdaya industri tersebut mencakup sumber daya manusia (SDM), pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan. SDM industri di Kabupaten Sigi akan memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Olehnya itu berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM lokal agar dapat memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh industri yang dikembangkan.

Memajukan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri harus melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, baik itu dari dunia pendidikan, swasta atau pelaku industri, dan masyarakat. SDM industri yang dimaksud mencakup wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri. Pengembangan skil wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan serta menguasai kompetensi teknis, manajerial, kreatif dan inovatif. Salah satu program penciptaan wirausaha baru dengan program santripreneur mewujudkan kemandirian industri daerah yang berbasis ekonomi syariah. Santripreneur adalah program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di lingkungan pondok pesantren.

Misi 3 : Membangun sarana prasarana industri yang maju

Sarana dan prasarana industri yang maju merupakan elemen kunci dalam mengembangkan industri. Sarana dan prasarana yang menjadi prioritas pembangunan di Sigi adalah infrastruktur industri mencakup pasokan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi dan sumberdaya air (air bersih) serta sanitasi dan jaringan transportasi yang memadai.

Misi 4: Mengembangkan perwilayahan dan sentra industri kecil menengah (IKM) skala Kabupaten dan kecamatan.

Sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah Pusat bahwa pembangunan industri harus dikembangkan berbasis perwilayahan. Selain itu, pengembangan sentra IKM menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, sehingga lokasi pengembangannya harus sudah jelas dan didukung oleh program yang tepat sasaran.

Perwilayahan industri Kabupaten Sigi dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan Pembangunan Kawasan Industri (KI) serta Pembangunan Sentra IKM (SIKIM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 memiliki tujuan: (a) membangun daya saing wilayah; (b) mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; (c) menyerap tenaga kerja. KEK Palu diharapkan dapat bersinergi dengan KAPET Palapas yang terdiri atas: Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dalam hal ini Kota Palu sebagai zona inti kawasan dalam KEK Palu.

KAPET Palapas merupakan satu kawasan pengembangan ekonomi dimana didalamnya terdapat: (a) pusat industri/perdagangan, jasa (sebagai hilir)-zona inti; (b) dihubungkan dengan daerah *hinterland* sebagai daerah produksi bahan baku (sebagai hulu)-zona pendukung. Sehubungan dengan itu, Badan Pengelola KAPET Palapas harus dapat menghubungkan keduanya dengan membangun kolaborasi/kerjasama antara provinsi dengan kabupaten/kota sekitarnya.

Dari uraian tersebut, dengan mensinergikan KEK Palu dan KAPET Palapas diharapkan kawasan ini dalam jangka panjang dapat menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Palapas. Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Palapas didukung oleh:

- a. Dalam Koridor Ekonomi Sulawesi, Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong termasuk dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Koridor Ekonomi Sulawesi, sedangkan Kabupaten Donggala dan Sigi masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi Potensial.

- b. Dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi, Kota Palu sebagai ibu kota provinsi ditetapkan sebagai pusat ekonomi dan klaster industri. Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Sigi sebagai simpul Kakao. Disamping itu, ketiga kabupaten tersebut diharapkan menjadi zona pendukung atau daerah produksi bahan baku (kelapa, perikanan, kakao, dan tambang emas).
- c. Pada Tabel Aglomerasi Indikasi Investasi Koridor Ekonomi Sulawesi, Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Kota Palu dengan kegiatan ekonomi pertanian pangan, perikanan, perkayuan (termasuk rotan) dan kegiatan ekonomi lainnya (emas). Kawasan Perhatian Investasi Prioritas Kabupaten Parigi Moutong dengan kegiatan ekonomi perikanan. Selanjutnya Kawasan Perhatian Investasi Potensial Kabupaten Donggala dengan kegiatan ekonomi perikanan laut dan Kabupaten Sigi dengan kegiatan ekonomi perikanan darat.
- d. Inovasi rotan berupa PIRNas yang merupakan wadah inovasi dan informasi komoditi rotan yang ada di Kota Palu.
- e. Terdapat sebanyak empat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan (kayu, rotan, karet, kopal, getah pinus) yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, karet, kopal (getah damar), dan getah pinus yaitu KPH Dolago Tanggunung, KPH Banawa Lalundu, KPH Kulawi dan KPH Dampelas Tinombo.
- f. Terdapat Industri *Cacao Powder* dan *Cacao Butter*, Industri Pengolahan Ikan Segar, Ikan Beku dan Ikan Fillet, Industri Pengolahan Tepung Ikan, Industri Arang Briket, dan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu.
- g. Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (2013-2033) ditetapkan kawasan agro industri berada di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.
- h. Dalam RTRW Kabupaten Donggala (2011-2031) ditetapkan lokasi pengembangan industri besar di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Labuan.
- i. Dalam RTRW Kota Palu (2010-2030) ditetapkan lokasi kawasan industri ringan di Kelurahan Lambara, Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan Baiya di Kecamatan Palu Utara (sekarang Kecamatan Tawaeli) seluas 1.500 ha.
- j. Dalam RTRW Kabupaten Parigi Moutong (2010-2030) terdapat kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Parigi Utara seluas ± 98 ha dan di Kecamatan Moutong sebagai pendukung kawasan strategis nasional Kapet Palapas.
- k. Rencana Pengembangan Industrialisasi Perikanan: (1) Industri perikanan tangkap di Kabupaten Donggala sebagai Pusat PPI Donggala (Cluster I Selat Makassar-Laut Sulawesi); Industri pengolahan ikan dan industri karaginan di KEK Palu; **Industri komoditas ikan air tawar Kabupaten Sigi (Danau Lindu)**. (2) Industri Karaginan Kabupaten Parigi Moutong (Cluster

II Teluk Tomini: Rumput Laut) yang berpusat di Laemanta Kecamatan Kasimbar.

- l. Pengembangan sarana prasarana transportasi laut pendukung ALKI II yang melintasi Selat Makassar.
- m. Tersedia infrastruktur untuk mendukung kegiatan investasi di Kawasan Perhatian Investasi yaitu jalan, pelabuhan, bandara, dan energi.

Berdasarkan analisis pemilihan industri prioritas berdasarkan potensi SDA dan potensi lokal lainnya di wilayah Sulawesi Tengah dalam analisis WPPI palapas, maka secara keseluruhan, industri prioritas yang akan dikembangkan di wilayah WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-**Sigi** adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Industri Prioritas Pengembangan WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi

Industri Pangan	Industri Pengolahan Hasil Laut dan Budidaya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan 2. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air selain ikan 3. Industri pengolahan rumput laut 4. Industri garam
	Industri Pangan Turunan Kelapa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kopra, minyak mentah dan minyak goreng kelapa, tepung kelapa, dan pelet 2. Industri gula aren dan gula kelapa 3. Industri produk masak kelapa
	Industri Pangan Turunan Kakao	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kakao – mencakup usaha pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao 2. Industri makanan dari coklat dan kembang gula
Industri hulu agro	Industri Oleokimia Berupa Minyak Atsiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri minyak pakanangi 2. Industri minyak nilam
	Industri Oleokimia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kimia dasar organik

	berbasis kelapa	berbasis kelapa (arang kelapa)
Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan	Industri obat, farmasi, dan kimia dasar berbasis kakao	1. Tanin, pektin, oleochemical, fatty acid, dan lain-lain
Industri aneka	Industri Produk Turunan Kayu dan Rotan	1. Industri penggergajian dan pengawetan kayu dan rotan 2. Industri kayu lapis, veneer, dan sejenisnya 3. Industri barang bangunan dari kayu 4. Industri wadah dari kayu 5. Anyaman rotan 6. Industri furnitur dari kayu dan rotan
	Industri aneka berbasis kelapa	1. Industri kerajinan kelapa
Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam	Industri Bahan Galian Non-Logam	1. Industri bahan bangunan dari tanah liat 2. Industri semen, kapur, dan gips 3. Industri barang dari batu marmer dan granit
	Industri logam dasar non besi	1. Industri pengolahan tembaga
	Industri barang-barang logam	1. Industri barang-barang logam non besi 2. Industri perkakas pertanian dan rumah tangga dari logam 3. Industri barang bangunan dari logam 4. Industri furnitur logam
Industri komponen, Industri elektronika, dan Industri alat transportasi	Industri komponen	1. Industri komponen elektronika 2. Industri komponen kendaraan bermotor
	Industri galangan kapal	1. Industri galangan kapal
Industri aspal	Industri aspal	1. Industri aspal

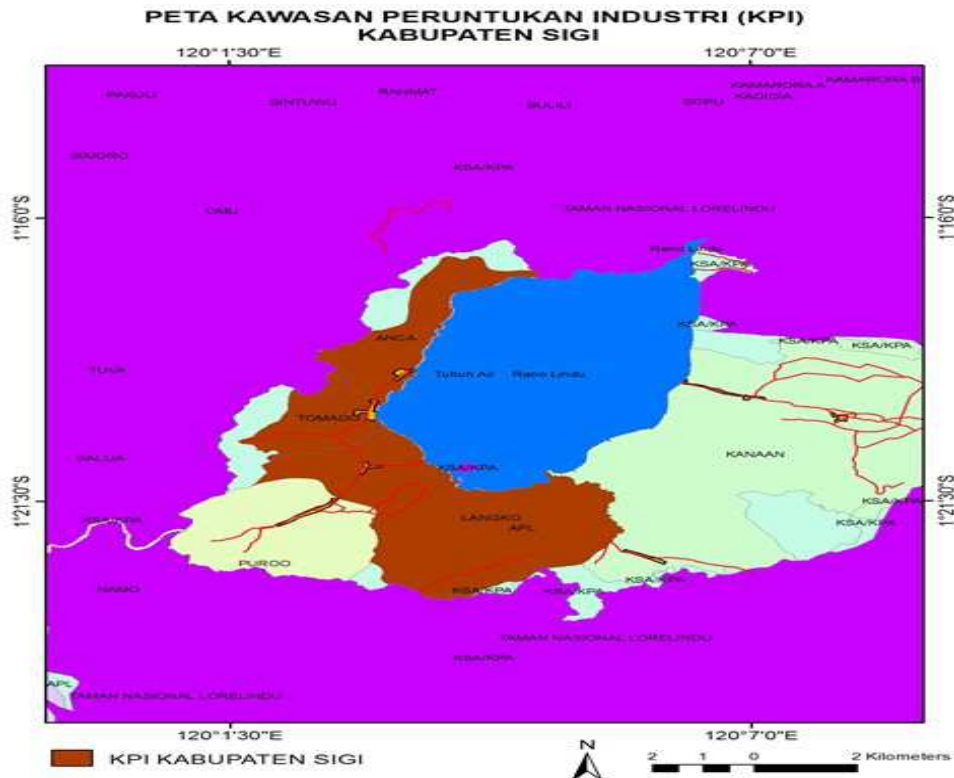
Sumber: Laporan WPPI Palapas, Tahun 2016

Berdasarkan **RIPIN** terdapat 4 industri utama yang diutamakan untuk dikembangkan di WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – **Kabupaten Sigi**, yaitu industri hulu agro, industri pangan, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam dan aneka. Sementara berdasarkan hasil analisis industri prioritas WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi, industri komponen, industri elektronika, dan industri alat transportasi (berupa komponen elektronika, komponen kendaraan bermotor, dan industri galangan kapal) serta Industri obat, farmasi, dan kimia dasar (berbasis kakao) juga termasuk ke dalam industri yang layak diprioritaskan dalam WPPI Palu-Donggala-Parigi Moutong-Sigi. Meskipun begitu, industri-industri ini sesungguhnya juga masuk ke dalam 10 industri prioritas RIPIN. Selain itu, ada 1 industri yang tidak ada dalam RIPIN namun masuk ke dalam industri prioritas WPPI Kota Palu – Kabupaten Donggala – Kabupaten Parigi Moutong – Kabupaten Sigi.

Rencana pengembangan industri didasarkan pada penentuan industri prioritas yaitu industri pokok turunan kayu dan rotan, industri bahan galian non logam, industri produk turunan kelapa, industri pengolahan hasil laut dan budidaya perikanan, industri produk turunan kakao, industri oleokimia, industri aspal, industri komponen, serta galangan kapal yang diambil berdasarkan beberapa kriteria seperti (1) analisis kondisi eksisting industri, terdiri dari: (i) industri basis dan non-basis; (ii) daya saing industri; (iii) kontribusi sektor terhadap PDRB; (iv) jumlah industri IBS eksisting; dan (v) jumlah industri IKM eksisting; (2) analisis daya dukung sumber daya alam untuk bahan baku: (i) komoditi basis dan non-basis; (ii) kontribusi komoditi dan ketersediaan komoditi di wilayah WPPI; dan (3) adanya dukungan kebijakan untuk pengembangan industri terkait, terdiri atas apakah industri merupakan industri prioritas menurut RIPIN dan apakah industri merupakan industri prioritas menurut kebijakan peruntukan industri daerah. Selain itu, dipertimbangkan pula posisi geografis yang strategis untuk mendukung kegiatan industri.

a. Pengembangan KPI menengah

Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kabupaten Sigi masuk dalam kawasan perhatian investasi potensial untuk kegiatan ekonomi perikanan (perikanan air tawar), sekaligus sebagai simpul kakao. Dalam rencana pengembangan industri perikanan, Kabupaten Sigi ditetapkan sebagai lokasi industri ikan air tawar provinsi yang berada di kawasan Danau Lindu, Kecamatan Lindu.



Gambar 3.1
Peta Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Sigi

Rencana pembangunan kawasan IKM di Kabupaten Sigi periode 2019-2039 tersebar pada setiap wilayah kecamatan sesuai dengan RTRW dan RPJMD Kabupaten, hasil survei lapangan tahun 2018. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Sigi Biromaru diperuntukan bagi Sentra Aneka Industri dan IKM hasil Pertanian, Hutan dan Peternakan
- 2) Kecamatan Palolo diperuntukan bagi pengembangan Industri Kecil Menengah Hasil Pertanian.
- 3) Kecamatan Nokilalaki diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan Kehutanan.
- 4) Kecamatan Pipikoro diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan kehutanan.
- 5) Kecamatan Lindu diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil perikanan darat (Ikan air Tawar).
- 6) Kecamatan Kulawi diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan hasil hutan.
- 7) Kecamatan Kulawi Selatan diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 8) Kecamatan Dolo diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan perikanan darat (air Tawar).

- 9) Kecamatan Tanambulava diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 10) Kecamatan Gumbasa diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 11) Kecamatan Dolo Selatan diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan Hasil ternak.
- 12) Kecamatan Dolo Barat diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 13) Kecamatan Marawola diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 14) Kecamatan Kinovaro diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian.
- 15) Kecamatan Marawola Barat diperuntukan bagi pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) hasil pertanian dan kehutanan.

Misi 5: Meningkatkan kreatifitas dalam pengembangan, inovasi serta pemanfaatan teknologi platform digital.

Pemberdayaan industri adalah usaha untuk menjadikan industri Kabupaten Sigi maju dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar. Langkah-langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah perubahan struktur industri, pengalokasian sumber daya industri, penguatan kelembagaan industri, penguasaan teknologi dan informasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Penguasaan teknologi dapat dilakukan dengan cara alih teknologi (*technology transfer*) dari para pelaku industri dari luar Kabupaten Sigi atau bahkan dari luar negeri. Selain itu penguasaan teknologi juga dapat dilakukan dengan cara mengirim pelaku industri untuk mengikuti pelatihan ataupun magang di beberapa kota yang ada di Indonesia maupun di luar negeri melalui berbagai macam program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Perindustrian. Penciptaan SDM industri agar lebih inovatif dan kreatif dapat dilakukan melalui pendidikan yang ada di lembaga pendidikan dan Pendidikan Vokasi di Kabupaten Sigi melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaku Industri.

Misi 6: Mejudukan industri hijau yang maju melalui pemberdayaan dan penataan kelembagaan indutsri.

Industri Hijau adalah sebuah icon industri yang harus dipahami dan dilaksanakan, yaitu industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan hal ini Untuk mengejawantahkan misi V yaitu meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, maka pemerintah Kabupaten Sigi juga menkjalankan program prioritas yaitu Sigi Hijau. Program Sigi Hijau dimaksud tidak hanya melakukan pengelolaan sumberdaya

alam secara berkelanjutan tetapi juga dalam pengertian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak.

Melihat posisi luas Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di dalam wilayah Kabupaten Sigi adalah 115.906,53 ha yang terdiri dari Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). 112.792,08 ha dan Taman Wisata Alam Wera dan Tahura Poboya, dengan luas total 3.114,45 ha. Sesuai dengan tujuannya, penetapan TNLL mengandung maksud untuk melestarikan ekosistem asli. Pemerintah Kabupaten Sigi, memandang bahwa kekayaan sumberdaya alam, dalam bentuk keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang terdapat di Kabupaten Sigi merupakan anugrah bagi Kabupaten Sigi.

Sebagai konsekuensi akan adanya hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Sigi perlu turut serta dalam upaya perlindungan dan pengelolannya secara arif dan berkelanjutan, untuk memastikan dan menjamin agar keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, sebagai pendukung kehidupan manusia. Anugrah tersebut juga perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi di masa yang akan datang. Sehingga bangun industri yang diprioritaskan kabupaten Sigi adalah industri yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penggunaan bahan baku maupun proses produksinya.

3.2 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sigi

memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039 adalah:

1. Terbangunnya industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kuat berbasis Sumberdaya pertanian;
2. Peningkatan produksi dan kualitas produk IKM Prioritas daerah yang Maju;
3. Terbangunnya Sarana prasarana IKM baik didalam Sentra maupun diluar sentra;
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri;
5. Diversifikasi dan inovasi produk dan kemasan IKM Prioritas
6. Peningkatan keterlibatan peran serta pemerintah, akademisi, swasta dan Masyarakat didalam memajukan industri daerah;

3.3 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sigi

a. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif pembangunan industri Kabupaten Sigi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan berbasis pengolahan hasil pertanian yang maju;
2. Meningkatnya peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah;
3. Meningkatnya kualitas, produktivitas, dan efisiensi serta nilai tambah industri pengolahan dari hulu sampai hilir;
4. Berkembangnya kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah;
5. Meningkatnya pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi yang diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan daya saing produk industri pengolahan yang maju;
6. Meningkatnya kesempatan kerja dan kemampuan SDM tenaga kerja di sektor industri melalui Vokasi;
7. Meningkatnya sarana prasarana di kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri;
8. Meningkatkan investasi atau penanaman modal di sektor industri pengolahan pada sentra IKM dan berbasis pewilayahan;
9. Meningkatnya industri yang mengolah sumberdaya alam lokal, khususnya hasil pertanian (*agroindustri*) yang berwawasan lingkungan ;
10. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan industri skala kecil dan menengah;
11. Tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga dan kecil di pedesaan, yang menjadi penggerak utama perekonomian pedesaan;
12. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan dan Konsultan Industri Kecil dan Menengah; dan
13. Tersedianya data dan informasi hal-hal yang berkaitan dengan industri.
14. Mampu menyediakan komoditas pangan utama bagi wilayah industri besar di WPPI Palapas (Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi) khususnya industri besar di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

b. Sasaran Kuantitatif.

Sasaran kuantitatif pembangunan industri Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI	SATUAN	BASE	TAHUN			
			LINE	2019-2024	2025-2029	2030-2034	2034-2039
1	Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,37	6,12	7,97	9,82	11,67

2	Kontribusi Industri Terhadap PDRB	%	1,88	3,9	5,95	7,98	10,02
3	Nilai investasi sektor industri (diluar kawasan industri)	Rp. Milyar	7,80	14,30	20,80	27,30	30
4	Nilai investasi sektor industri di kawasan industri	Rp. Milyar	0	20	40	60	80
5	Jumlah unit usaha sektor industri (Besar dan IKM)	Unit	854	291	341	391	441
6	Jumlah tenaga kerja di sektor industri diluar kawasan industri	Orang	2756	2900	3044	3188	3332
7	Jumlah tenaga kerja sektor industri di kawasan industri	Orang	0	400	800	1200	1400

Sumber: BPS Kabupaten Sigi, 2018, Dinas Perindag, 2018, Bappeda Kab. Sigi, 2018 (diolah)

Sasaran pembangunan industri di Kabupaten Sigi tahun 2019-2039 sebagaimana di atas diperoleh berdasarkan perhitungan trend tahun 2013-2017 dan atau perkembangan untuk masing masing jenis sasaran. Selain itu adanya kawasan industri merupakan salah satu pendorong percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Sigi.

Sasaran di atas disepakati melalui *Focus Group Discussion* (FGD) berdasarkan asumsi makro ekonomi daerah yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk tercapainya Industri Kabupaten Sigi yang Maju sebagai berikut:

- 1) Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi antara 5% (Lima persen) sampai dengan 8% (Delapan persen) per tahun;
- 2) Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor daerah khususnya produk industri di kabupaten Sigi;
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi baik Jalan, Jembatan, Energi, Air Minum, yang memadai dan yang meningkat setiap tahunnya;
- 4) Iklim investasi dan pembiayaan Industri yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri kecil dan Menengah (IKM);
- 5) Kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia industri berkembang pesat dan adanya penggunaan inovasi teknologi di sektor industri ;
- 6) Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7) Koordinasi antar perangkat daerah (OPD)/lembaga dan stakeholder terkait;

- 8) Adanya peran aktif dunia usaha dalam pembangunan IKM di kabupaten Sigi.

3.3.1 Penahapan Capaian Pembangunan Industri.

a. Tahap I (Tahun 2019–2023).

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi pada tahap Kesatu dimaksudkan:

- a. Pembangunan industri Prioritas/Andalan daerah dan industri lainnya secara selektif berdasarkan ketersediaan Bahan Baku yang memadai;
- b. Penyiapan Sarana Prasarana mendukung industri maju khususnya di Kawasan Sentra Kabupaten di wilayah Sigi Biromaru dan diwilayah Kecamatan potensial lainnya.
- c. Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan memanfaatkan Program prioritas Rencana Pembangunan Kawasan Perdesan (RPKP) Magaya dan SIGI HIJAU;
- d. Pembangunan sekolah vokasi industry berbasis pertanian.
- e. Mendorong penciptaan wirausaha IKM baru melalui program Santripreneur.
- f. Fokus pembangunan industri di wilayah Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai sentra Industri dan mendorong tumbuhnya IKM.
- g. Berkembangnya pola pemasaran hasil Industri *platform Digital (Online Shopping)*.
- h. Peningkatan SDM yang berkualitas yang menguasai dan memanfaatkan inovasi dan teknologi;
- i. Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*).
- j. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa khususnya peran Bumdes, dalam menghasilkan produk Industri kecil yang berkualitas dan berkesinambungan.

b. Tahap II (Tahun 2024–2028).

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi pada tahap Kedua diarahkan untuk pada tahun 2039, dengan kondisi Industri Sebagai berikut:

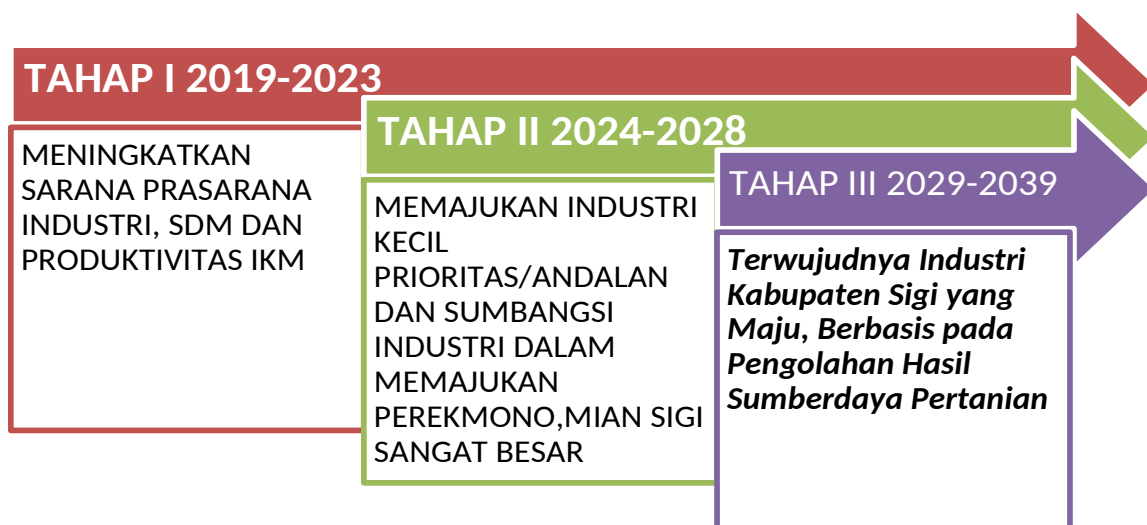
1. Berkembangnya industri pengolahan dengan berbasis sumber daya Pertanian di seluruh kecamatan.
2. Penciptaan lapangan kerja yang luas pada sektor industry di kabupaten Sigi.
3. Sumberdaya Manusia pelaku industry makin berkualitas dan dapat bersaing.
4. Berkembangnya wirausaha muda melalui Santripreneur.

5. Terbentuknya daya saing hasil industri IKM yang maju dengan memasok kebutuhan Sulawesi Tengah dan nasional produk industry pangan.
6. Sarana prasaran industry makin maju.
7. Pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan mendorong industri hijau (*green industri*);

c. Tahap III (Tahun 2029–2039).

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi pada tahap Ketiga diarahkan untuk pada tahun 2039, dengan kondisi Industri Sebagai berikut:

- 1) Majunya industri pengolahan dengan berbasis sumber daya Pertanian sebagai sektor utama;
- 2) Meningkatnya kualitas, produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk industri yang berbasis pertanian;
- 3) Terbentuknya daya saing hasil industri IKM yang maju di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- 4) Terbentuknya Industri Prioritas/Andalan daerah yang maju sebagai motor penggerak utama (*prime mover*) perekonomian.
- 5) Peran dan kontribusi sektor industri yang semakin penting dalam perekonomian Kabupaten Sigi sebagai tumpuan Ekonomi bagi penciptaan nilai tambah dan penciptaan lapangan pekerjaan.
- 6) Pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan mendorong industri hijau (*green industri*);



Gambar 3.2
Pentahapan Pembangunan Industri

di Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039

Agar bisa mencapai target-target tersebut, ditetapkan enam **kebijakan prioritas** untuk mendukung pengembangan industri Sigi. Keenam kebijakan itu adalah:

1. Pengembangan Industri Maju Berbasis Sumber Daya Alam
2. Pendalaman Struktur Industri Melalui Penguatan Rantai Nilai Industri Pertanian
3. Penguatan SDM Melalui Vokasi Industri,
4. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru melalui program Santpreneur.
5. Mendorong Kinerja Industri Padat Karya dan Berorientasi Ekspor Komoditi Pertanian
6. Pengembangan IKM Melalui *Platform Digital*,
7. Pengembangan perwilayahan industri melalui Pembangunan sentra industri di Kecamatan.

BAB 4

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SIGI

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039



4.1 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Industri Kabupaten Sigi.

Pembangunan industri di Kabupaten Sigi dengan berbagai potensi dan prospeknya menghadapi berbagai kendala, sebagaimana telah dirumuskan berikut ini.

- a. Pengembangan industri pangan berbasis sumberdaya potensial daerah yakni tanaman hortikultura dan ikan air tawar merupakan produk yang memiliki nilai tambah (*value added*) namun masih jumlah dan cakupannya masih terbatas serta terpaku hanya pada beberapa jenis produk antara (produk masih terbatas pada tingkat bahan mentah/*raw material*, produk setengah jadi). Pengembangan industri pangan berbasis tanaman hortikultura ini dan ikan air tawar ini belum sampai produk olahan dan belum sampai pada kompetensi inti spesifik daerah Kabupaten Sigi.
- b. Sumberdaya manusia Sektor industri masih terbatas dan jumlah masih sedikit, karena sumberdaya manusia khusus Sektor Industri ini belum berkembang secara baik, pendidikan dan pelatihan khusus Industri masih sangat terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu mengelola sumberdaya dan potensi industri daerah.
- c. Sarana prasarana Industri yang tersedia kondisinya belum memadai dalam mendukung pengembangan industri, khususnya ketersediaan aksesibilitas jalan dan jembatan, air bersih dan sumber energi listrik bagi industri daerah.

- d. Belum terbangunnya sarana prasarana Industri di sentra industri (Sentra IKM) yang berada di UPT Vulupountu, Kecamatan Sigi Biromaru.
- e. Lemahnya akses permodalan dan kelembagaan IKM dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lemahnya akses permodalan ini karena IKM-IKM tidak memiliki jaminan yang menjadi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan tersebut.
- f. Rendahnya akses dan jaringan pemasaran (*marketing networking*) produk-produk hasil industri kecil dan menengah pada pasar yang lebih luas dan besar, sehingga pangsa pasar dari produk-produk IKM masih sangat terbatas.

4.1.2 Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi

Untuk mencapai visi pembangunan industri dan mengimplementasikan berbagai misi untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan industri tersebut, maka perlu ditetapkan berbagai strategi yang tepat. Strategi ini disusun untuk mencapai sasaran kualitatif dan kuantitatif yang ditentukan dalam pembangunan industri Kabupaten Sigi. Strategi ini juga yang dilaksanakan melalui berbagai program meliputi program pembangunan sumber daya industri; program pembangunan sarana dan prasarana industri; program kerjasama dengan pihak swasta dan antar pemerintah daerah kabupaten Sigi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perindustrian dalam pengembangan industri; program pengembangan perwilayahan industri; program pemberdayaan IKM; serta program infrastruktur daerah yang menunjang percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Sigi.

Program-program bidang industri tersebut dilakukan melalui **Strategi** sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri (*supplay chain*) yang berkualitas dan *sustainable* sehingga industri berjalan dengan kontinu;
2. Peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri lokal, khususnya industri prioritas daerah;
3. Penciptaan wirausaha IKM baru melalui program **santripreneur**;
4. Pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM mapuun diluar sentra IKM;

- 5 Peningkatan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku (*raw material*) dan logistik;
- 6 Pengembangan industri andalan pada sentra-sentra IKM berbasis potensi sumber daya alam prioritas masing-masing kecamatan.
- 7 Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok melalui *platform digital* dan *marketplace (e-smart IKM)*.
- 8 Pembangunan industri hijau dengan mengadopsi dan berkolaborasi dengan konsep **Sigi Hijau**, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*)
- 9 Pemberdayaan, pembiayaan kelembagaan IKM dan penguatan konektivitas struktur industri kecil dan menengah.

Sejalan dengan Pembangunan industri Provinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan industri Kabupaten Sigi juga dilakukan secara *holistic, integrative thematic*, dan *spatial* sehingga ada konektivitas dan sinergitas dalam pewilayahan yang berlangsung dari hulu ke hilir.

4.1.3 Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi

Visi, Misi dan Strategi merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dan berhubungan satu dengan yang lain. Strategi yang disusun adalah untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri. Oleh karena itu Visi, Misi dan Strategi adalah saling terkait satu sama lain. Keterkaitan antara Visi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi dengan Misi dan Strategi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Sigi 2019-2039

VISI ; “Terwujudnya Industri Kabupaten Sigi yang Maju, Berbasis pada Pengolahan Hasil Sumberdaya Pertanian.”			
No	MISI	No	STRATEGI
1	<i>Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) Yang Mampu Bersaing Di Pasar Lokal Maupun Nasional.</i>	1	Penguatan pasokan bahan baku industri (<i>supply chain</i>) yang berkualitas dan <i>sustainable</i> sehingga industri berjalan dengan kontinu.

VISI ; “Terwujudnya Industri Kabupaten Sigi yang Maju, Berbasis pada Pengolahan Hasil Sumberdaya Pertanian.”			
No	MISI	No	STRATEGI
2.	Memajukan Sumberdaya Manusia Pelaku Industri.	2	Peningkatan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri lokal, khususnya industri prioritas daerah
		3	Penciptaan wirausaha IKM baru melalui gun industprogram santripreneur ;
3.an	Membangun Sarana Prasarana Industri Yang Maju	4	Pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM mapuun diluar sentra IKM;
		5	Peningkatan infrastruktur strategis daerah yang mendukung majunya industri termasuk aksesibilitas pada sumber bahan baku (<i>raw material</i>) dan logistik;
4.	Mengembangkan Perwilayahan Dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Skala Kabupaten Dan Kecamatan	6	Pengembangan industri andalan pada sentra-sentra IKM berbasis potensi sumber daya alam prioritas masing-masing kecamatan.
5.	Meningkatkan Kreatifitas Dalam Pengembangan, Inovasi Serta Pemanfaatan Teknologi Platform Digital	7	Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok melalui <i>platform digital</i> dan <i>marketplace (e-smart IKM)</i> .
6.	Mewujudkan Industri Hijau Yang Maju Melalui Pemberdayaan dan Penataan Kelembagaan Industri	8	Pembangunan industri hijau dengan mengadopsi dan berkolaborasi dengan konsep Sigi Hijau , yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development goals/SDGs</i>)
		9	Pemberdayaan, pembiayaan kelembagaan IKM dan penguatan konektivitas struktur industri kecil dan menengah.

Industri hilir (hilirisasi industri) lanjutan yang dipilih dan dikembangkan diharapkan menjadi kompetensi inti industri Kabupaten Sigi. Strategi ini merupakan strategi pokok dengan dasar untuk memecahkan kendala utama pembangunan industri di Kabupaten Sigi. Strategi ini dijadikan acuan (referensi) dalam penjabaran rincian program-program pembangunan industri di Kabupaten Sigi.

4.2 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program pembangunan industri di Kabupaten Sigi disusun mengacu pada kondisi *existing* dan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain mengacu pada rencana pembangunan tersebut, program pembangunan industri Kabupaten Sigi juga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah.

Pembangunan sumber daya industri berdasarkan RIPIN dan RPIP dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan. Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Prioritas Kabupaten dengan berbagai analisa dan kriteria, sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Kabupaten Sigi.

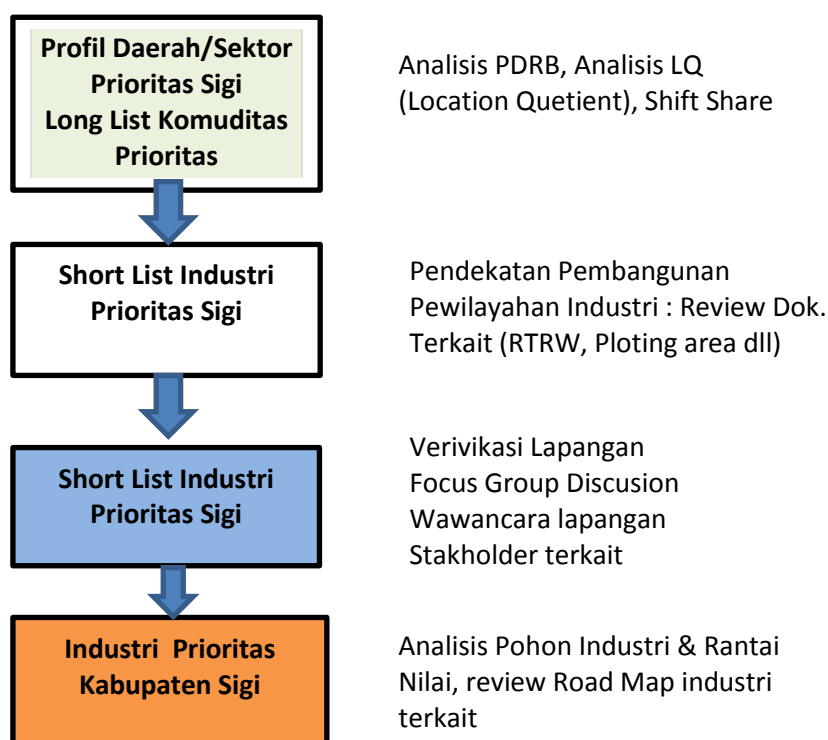
Tahap pertama, yaitu penetapan awal industri Prioritas Kabupaten Sigi. Hal ini dilakukan dengan melakukan identifikasi sektor Prioritas yang dapat memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian Kabupaten Sigi. Tahapan kedua yaitu pemilihan *long list* komoditas Prioritas dari sektor/sub-sektor Prioritas dan sektor/ sub-sektor lainnya. Selanjutnya, pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short list* komoditas Prioritas. Tahapan keempat yaitu penentuan komoditas Prioritas prioritas sebagai komoditas basis dalam RPIK Sigi untuk jangka waktu Tahun 2019-2039 dan tahap terakhir yaitu penentuan industri Prioritas kabupaten.

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan/Prioritas Kabupaten Sigi

Penetapan industri Prioritas Kabupaten Sigi dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor Prioritas yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas Prioritas dari sektor/sub-sektor Prioritas dan

sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas Prioritas dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas Prioritas prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIK ini dan tahap kelima penentuan industri Prioritas Kabupaten.

Secara umum Langkah-langkah penetapan industri Prioritas Kabupaten Sigi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1
Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Prioritas Kabupaten Sigi

Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- 1) Kriteria Prioritas; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- 2) Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi (*value added of economy*), nilai tambah sosial (*value added of social*) dan prestise/kekhasan daerah.
- 3) Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- 1) Nilai tambah ekonomi/peningkatan pendapatan daerah;

- 2) Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- 5) Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) Dukungan sumber daya manusia;
- 7) Kekhasan daerah;
- 8) Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Penetapan industri Prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan sepuluh faktor sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Prioritas Kabupaten Sigi

No. 1	Faktor 2	Penjelasan 3
1.	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah produk; • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang produk; • Dorongan inovasi produk ; • Ketersediaan sarana prasarana.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja; • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat; • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup.
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Produk calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku; • Volume Bahan Baku yang mencukupi; • Kontinuitas pasok bahan baku; • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi; • Rantai pasok; • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai;

No. 1	Faktor 2	Penjelasan 3
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan bahan-bahan penolong; • Dukungan letak geografis kecamatan bagi pengembangan produk Prioritas; • Dukungan kondisi iklim lokal terhadap produk.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari produk ini telah berfungsi sehingga produk tersebut dapat menjadi produk Prioritas daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar lokal; • Jangkauan/akses pasar regional; • Jangkauan/akses pasar nasional; • Kondisi persaingan; • Dukungan infrastruktur pemasaran.
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi produk dalam renstra daerah; • Posisi produk dalam peraturan daerah terkait; • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan produk.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah; • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi;
7.	Prestise Daerah	<p>Produk calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan; • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah.
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	<p>Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap produk terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan dan dukungan masyarakat
9.	KesiKesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	<p>Industri Andalan yang terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap produk terpilih).</p>

No.	Faktor	Penjelasan
1	2	3
10.	Kesiapan dan Kediaan Pelaku Usaha industri	<p>Kabupaten Sigi memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dengan melihat potensi sumberdaya alam yang dimiliki, namun tantangan masa depan dalam persaingan adalah industri dalam bentuk apapun harus terintegrasi dengan teknologi digital di tengah menghadapi era revolusi industri keempat. Apalagi, berdasarkan Peta Jalan Making Indonesia 4.0, aspek penguasaan teknologi akan menjadi penentu utama keberhasilan dalam implementasi Industri 4.0 yang akan memberikan arah yang jelas bagi pergerakan IKM di masa depan, Olehnya Pelaku IKM harus mempunyai kesiapan dan kesiapan didalam kemampuan menerapkan teknologi didalam meningkatkan kualitas produk maupun pemasaran berbasis e-smart IKM. Sehingga mampu menjangkau pasar global. Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima produk dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha; • Kesiapan teknologi; • Kompetensi pengusaha; • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha. • Implementasi Penerapan teknologi digital dan e-Commerce

4.2.2.1 Penetapan Pembangunan Industri Unggulan/Prioritas

Penetapan industri Unggulan/Prioritas haruslah berdasarkan pada ketersediaan bahan baku (*raw material*) yang berkesinambungan, sehingga proses produksi industri dapat berjalan secara kontinu. Selanjutnya, untuk penetapan industri Prioritas Kabupaten Sigi, juga dilakukan berdasarkan data yang dianalisis dengan *Location Quotient* (LQ) Kabupaten dan LQ setiap kecamatan. Analisis LQ ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor prioritas (*base sectors*) dalam suatu wilayah. Hasil analisis LQ bahan baku Kabupaten Sigi yang diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Tanaman Pangan

No	Kabupaten	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Banggai Kepulauan	0,4477	0,0194	0,3885	0,0294	30,9544	0,4139	10,2587	5,4443
2	Banggai	1,0691	1,3438	0,5188	1,0895	0,6970	1,3495	0,8993	0,6443
3	Morowali	1,0260	0,2168	0,3310	0,2227	0,3585	1,1489	2,2999	2,4445
4	Poso	1,0424	0,7467	0,6670	0,3648	0,3260	0,2291	1,1307	1,6402
5	Donggala	1,0608	0,7041	0,7364	0,0891	1,0427	1,1168	0,9246	0,5762
6	ToliToli	1,1791	-	0,1508	0,0654	0,4240	0,4076	0,2435	0,8023
7	Buol	0,8165	3,3950	2,2660	0,5563	1,8312	0,8396	0,6906	1,1306
8	Parigi Moutong	1,0964	-	0,5931	0,2824	0,4372	0,7528	0,6659	0,9052
9	Tojo Una-Una	0,1435	6,3950	5,8762	12,6162	1,0681	2,3560	0,9596	0,5770
10	Sigi	0,9739	0,6696	1,4449	0,1242	1,4131	1,6845	0,6189	0,9672
11	Banggai Laut	-	-	0,3152	-	1,4936	0,5774	23,0297	5,4660
12	Morowali Utara	1,0259	3,7323	0,6429	1,2495	0,8247	0,0363	0,7393	0,6847
13	Kota Palu	0,3694	-	5,0361	-	4,2089	-	3,7186	0,1269
	Sulawesi Tengah	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Tabel 4.4.
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Sayuran

No	Kabupaten	Bawang Daun	Tomat	Bawang Merah	Ketimun	Kacang Merah	Kacang panjang	Cabai Besar	Cabai Rawit	Terong	bayam	Labu Siam	Kangkung
1	Banggai Kepulauan	0,2210	1,0266	0,0991	1,7223	-	2,3807	0,0974	1,0944	2,0503	2,0437	0,1262	4,3343
2	Banggai	0,4974	0,6135	0,9208	1,6437	0,0549	2,2287	0,9616	1,5901	1,6880	1,6149	0,4055	1,9190
3	Morowali	1,4451	0,6259	0,0448	1,2304	-	2,7314	1,3086	1,1597	1,5416	4,0202	0,2410	3,5373
4	Poso	2,4370	1,6508	0,2116	0,8834	0,0331	0,7477	0,1852	0,4442	1,0773	0,2076	1,6991	0,8847
5	Donggala	2,1698	0,5818	2,5201	0,8802	-	1,6953	0,7498	0,9164	0,8080	0,6022	0,2533	0,3947
6	ToliToli	-	0,5838	-	3,5761	-	2,8782	2,0758	0,9337	0,9389	2,6136	0,3923	3,1463
7	Buol	0,2133	0,5357	0,0754	1,4624	-	2,5081	2,3358	3,2086	0,9501	0,2467	0,0242	0,4497
8	Parigi Moutong	0,1870	1,0456	1,1840	1,5645	-	1,0257	2,1972	1,5151	1,3575	1,3082	0,1238	0,8202
9	Tojo Una-Una	1,8852	0,3975	0,1734	1,8533	-	1,9853	1,0216	1,4793	0,8225	8,8961	-	2,4553
10	Sigi	0,1110	0,6880	1,5744	0,4583	3,1958	0,5320	0,9737	0,8343	0,6342	0,1335	1,5135	0,5267
11	Banggai Laut	-	0,7478	-	3,0883	-	3,5165	-	0,6314	3,5630	4,3075	-	1,8124
12	Morowali Utara	0,3028	0,5417	-	1,0122	0,2506	3,5151	0,6128	1,6947	2,4307	1,6536	0,2469	1,6357
13	Kota Palu	0,8073	0,3651	3,1175	0,8131	-	0,3727	0,6401	0,8945	0,4491	2,4805	-	3,4531
	Sulawesi Tengah	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Tabel 4.5.
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Perkebunan

No	Kabupaten	LQ											
		Vanili	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Kopi	Cengkeh	Kapuk	Lada	Pala	Jambu Mete	Kakao	Sagu	Kemiri
1	Banggai Kepulauan	4,8805	-	2,2245	0,0442	2,1381	0,2267	0,1404	6,6957	7,6697	0,4856	-	7,1845
2	Banggai	1,4509	0,7692	1,6048	0,6387	0,2240	0,4501	0,0385	0,2666	2,8230	0,6617	1,5158	1,4474
3	Morowali	-	2,9859	0,0364	0,2038	0,0252	-	0,1268	0,6131	0,5263	0,1531	0,4322	0,0617
4	Poso	-	0,0736	0,3769	6,2416	0,2313	-	2,3671	0,2419	-	2,6698	-	1,4623
5	Donggala	3,1583	0,8089	1,2809	0,9659	0,6911	1,5432	1,7806	1,3412	0,5984	0,9550	0,0204	0,2148
6	ToliToli	-	-	0,9815	1,0172	10,3371	-	3,8553	1,7839	-	1,1528	-	-
7	Buol	4,0069	1,4550	0,9998	1,1320	0,3329	0,3671	0,7946	0,4499	0,0017	0,6152	7,3387	-
8	Parigi Moutong	0,3423	0,0011	1,3087	0,2114	0,5067	4,4690	0,4449	0,4038	0,6489	1,7878	0,0152	1,6642
9	Tojo Una-Una	-	-	2,0720	1,1814	1,3620	0,4912	2,0979	3,8392	0,5062	0,7180	-	-
10	Sigi	-	-	0,3369	3,5375	0,0383	-	-	0,1215	0,0345	2,8338	-	4,8539
11	Banggai Laut	-	-	2,6339	-	1,7595	-	0,1219	3,4896	5,2357	0,1595	0,2132	1,2495
12	Morowali Utara	-	2,2353	0,0355	0,0536	0,0244	-	2,0483	0,1084	0,0488	0,6996	4,1192	0,0895
13	Kota Palu	-	-	2,1580	-	0,0636	-	-	-	4,5976	0,7084	-	23,3805
	Sulawesi Tengah	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Tabel 4.6.
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Peternakan

No	Kabupaten	LQ					
		Sapi Potong	kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Sigi	0,8205	-	2,8155	0,9258	-	1,4713
2	Banggai	1,0831	0,0023	0,1477	1,0244	-	0,8791
3	Morowali	1,0932	2,4880	0,3032	1,1415	0,0860	0,5761
4	Poso	0,5959	6,0483	0,1757	0,2171	-	3,1606
5	Donggala	1,4291	0,0532	0,0951	0,9130	0,2716	0,5396
6	ToliToli	0,8374	0,5549	1,6551	1,5159	-	0,2612
7	Buol	0,9679	-	-	1,4900	-	0,1310
8	Parigi Moutong	0,8633	0,0253	0,8783	0,9069	-	1,4587
9	Tojo Una-Una	1,1942	-	3,2999	1,1837	-	0,3520
10	Sigi	1,1612	2,0927	1,4131	0,9044	4,6138	0,7877
11	Banggai Laut	1,1715	0,1667	4,9592	0,5914	-	1,5571
12	Morowali Utara	1,8225	3,0548	0,0129	0,2636	-	1,1656
13	Kota Palu	0,3939	-	2,5221	1,8632	8,2175	-
Sulawesi Tengah		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Tabel 4.7.
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Unggas

No	Kabupaten	LQ					
		Ayam Kampung	Ayam petelur	Ayam pedaging	Itik/manila	Puyuh	Merpati
1	Banggai Kepulauan	2,9043	1,6626	0,1265	3,4296	-	3,6321
2	Banggai	1,3106	0,4713	0,8393	2,4783	0,0543	0,0863
3	Morowali	2,0381	2,1547	0,5055	1,4239	6,0041	3,5920
4	Poso	2,3481	2,2248	0,3766	1,7639	0,4952	6,9508
5	Donggala	1,0717	2,4572	0,9093	0,3133	1,5060	0,6858
6	ToliToli	1,2564	4,0778	0,4928	3,5890	4,6060	2,2475
7	Buol	2,6654	2,8850	0,2080	1,7063	8,3360	3,3769
8	Parigi Moutong	1,9335	0,3160	0,7235	0,9445	2,5028	3,1605
9	Tojo Una-Una	3,0712	1,1059	0,2845	0,6899	4,3328	1,8801
10	Sigi	3,7761	-	-	2,4177	3,2859	7,8590
11	Banggai Laut	4,0604	-	0,0193	1,0100	-	0,7472
12	Morowali Utara	3,4016	0,9043	0,1848	0,9227	-	0,5262
13	Kota Palu	0,0521	0,8103	1,4119	0,0100	0,4315	0,0638
Sulawesi Tengah		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Tabel 4.8.
Hasil Analisis Location Quotient (LQ) – Komoditas Perikanan

No	Kabupaten	LQ					
		Perikanan Budidaya				Perikanan Tangkap	
		Tambak	Kolam	Jaring Apung	Rumput Laut	Perikanan Laut	Perikanan Umum
1	Banggai Kepulauan	0,0000	0,0000	0,9329	1,1055	1,0104	0,0000
2	Banggai	2,1450	6,2430	30,2773	0,8257	1,0104	0,0000
3	Morowali	0,1252	0,0255	0,0407	1,0938	1,0104	0,0000
4	Poso	2,0757	64,9359	186,1074	0,3207	0,1091	1,8551
5	Donggala	7,4801	0,0334	0,0000	0,3618	0,9984	1,1532
6	ToliToli	0,6284	4,1642	6,8557	1,0125	1,0104	0,0000
7	Buol	6,2949	58,4279	0,0000	0,1356	1,0104	0,0000
8	Parigi Moutong	0,5853	2,1114	0,1614	1,0356	1,0079	0,2397
9	Tojo Una-Una	9,2485	0,1905	0,0000	0,1848	1,0104	0,0000
10	Sigi	0,0000	186,3179	8,2599	0,0000	0,0000	96,9369
11	Banggai Laut	0,0000	0,0000	0,0489	1,1060	1,0104	0,0000
12	Morowali Utara	10,6118	0,4069	0,3161	0,0474	0,6868	31,0434
13	Kota Palu	1,5650	161,3005	0,0000	0,0000	1,0104	0,0000
	Sulawesi Tengah	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Sumber: Data Diolah Tim Ahli, 2018

Analisis LQ di atas, dalam rangkaian penetapan industri Prioritas Kabupaten Sigi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

- a. Identifikasi Potensi Daerah;
- b. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN dan Industri Prioritas Provinsi (RPIP) Sulawesi Tengah;
- c. Usulan Industri Prioritas Kabupaten Sigi berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah Dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Industri Prioritas Provinsi (RPIP); Sulawesi Tengah. Serta Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Kabupaten Sigi.

Tabel 4.9
Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen)
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren
		Industri Makanan dan Minuman
2	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kelapa
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9	Idustri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (industri keramik)
		Semen
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik
		Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainnya

Sumber: RIPIN 2015-2035

Penetapan Industri Andalan Kabupaten Sigi juga berdasarkan penilaian potensi serta didukung potensi bahan baku, pembangunan industri di Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan tahapan pembangunan industri Prioritas seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Industri Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
1.	Industri Pangan	a. Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Buah-Buahan • Pengolahan Daging hasil peternakan • Suplemen dan pangan fungsional berbasis daun kelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplemen dan pangan fungsional berbasis daun kelor • Pengolahan Daging hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Buah-buahan dalam kaleng • Daging dalam kaleng • Sayuran dalam kemasan dan produk turunan lainnya 	Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala
		b. Industri Pengolahan Minyak Nabati			
		<ul style="list-style-type: none"> • Minyak goreng (Kelapa, kelapa sawit) 	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak goreng (Kelapa, kelapa sawit) • Dan produk turunan hasil pengolahan minyak nabati lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak sawit merah • Fortified Cooking oil • Produk Turunan hasil pengolahan minyak nabati lainnya 	Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Unauna
c. Industri berbahan baku Ikan dan Hasil Kelautan					
<ul style="list-style-type: none"> • Industri pembekuan ikan • Industri berbahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung ikan • Ikan kaleng • Minyak Ikan (Omega 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tepung ikan • Ikan kaleng • Minyak Ikan (Omega 3) • Pangan olahan 	Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi,		

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
		baku Ikan dan produk hasil kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil kelautan, • Rumput Laut (carragenan , agar-agar, alginate) • Industri pengolahan minyak ikan, dan suplemen ikan 	fungsional berbasis limbah industri hasil kelautan untuk farmasi, kosmetik dll. Dan berbagai Industri bahan baku Ikan dan produk hasil kelautan turunan lainnya	Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Morowali Utara
		d. Industri olahan coklat			
		<ul style="list-style-type: none"> • Coklat Pasta • Makanan dan minuman dari coklat • Lemak coklat • Diverifikasi produk cokelat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bubuk coklat • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 	<ul style="list-style-type: none"> • Coklat untuk konsumsi rumah sakit • Produk coklat dengan kualitas tinggi 	Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala
		e. Industri Bawang			
		<ul style="list-style-type: none"> • Produk bawang goreng dengan berbagai bentuk kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi Produk bawang goreng 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk bawang goreng dengan kemasan dan kualitas tinggi • Produk bawang goreng organik 	Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala
		f. Industri olahan kopi			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kopi bubuk 	<ul style="list-style-type: none"> • kopi instan • kopi mix 	<ul style="list-style-type: none"> • Aneka macam olahan berbasis kopi organik 	Kabupaten Poso, Kota Palu

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
2.	Industri Hulu Agro	a. Industri Pengolahan Kelapa Terpadu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Air kelapa dalam kemasan • Briket arang • Nata de coco • VCO • Minyak Kelapa 	<ul style="list-style-type: none"> • Santan bubuk dan cair • Tepung kelapa • Asap cair • VCO • Sabun • Handbody • Dan tanaman lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carbon aktif • Sabun • Handbody • Dan tanaman lainnya. 	Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una
		b. Industri Pengolahan Minyak Atsiri (Cengkeh, Pala dan Nilam)			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri penyulingan minyak atsiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi minyak dari cengkeh dan pala dan nilam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri makanan, minuman dan bahan aditif pada minuman non alkohol, es krim, permen karet • Dan produk turunan minyak atsiri dari olahan berbahan baku alternative lainnya. 	Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Touna dan Kabupaten Buol
c. Industri Pengolahan Kelapa Sawit					
<ul style="list-style-type: none"> • Industri margarine • Olein • Dan produk turunan berbahan baku kelapa sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Asam lemak Nabati 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri margarine • Olein • Plastik bio berbasis limbah industri sawit 	Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala,		

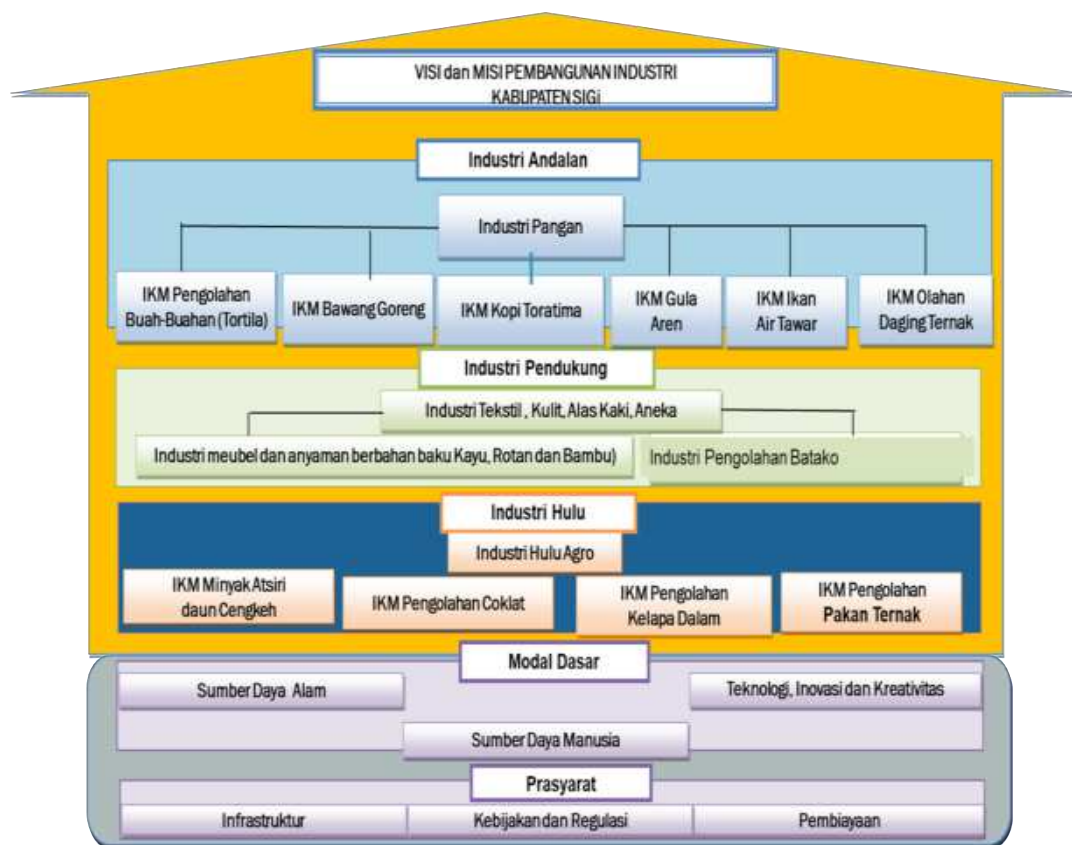
No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
				<ul style="list-style-type: none"> Polimer turunan minyak sawit 	Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una
		d. Industri Karet			
		<ul style="list-style-type: none"> Crumb Rubber 	<ul style="list-style-type: none"> Busa Karet Industri berbahan latex 	<ul style="list-style-type: none"> Engineering natural rubber compound Industri ban kendaraan bermotor dan kendaraan berat. Dan produk turunan berbahan baku karet lainnya 	Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi
		b. Industri Pakan			
		Pakan ternak	Pakan Ternak dalam kemasan	Pakan ternak dalam kemasan	Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)	A. Industri Tekstil			
		<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan Tenun dan Batik 	<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan Tenun dan Batik 	<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan Tenun dan Batik 	Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kota Palu
		B. Industri Furniture			
		<ul style="list-style-type: none"> Furniture rotan dan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture rotan dan kayu. 	<ul style="list-style-type: none"> Furniture rotan dan kayu 	

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
		C. Industri Pengolahan Kayu dan Rotan			
		<ul style="list-style-type: none"> Industri penggergajian kayu Rotan feel thread Penggorengan rotan 	<ul style="list-style-type: none"> Papan rotan Rotan Polis Rotan Spliting 	Papan rotan	
		D. Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan			
		<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan dan ukiran kayu Pengolahan Getah Damar dan Getah Pinus 	<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan dan ukiran kayu Pengolahan Getah Damar dan Getah Pinus 	<ul style="list-style-type: none"> Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan rotan dan kayu Kerajinan rotan dan kayu yang memiliki nilai tinggi 	Seluruh Kabupaten
4.	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Industri Minyak dan Gas			
		<ul style="list-style-type: none"> Industri Gas Alam Cair. Industri kimia (metanol, etilen, propilen, butadien) 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Kimia Organik Industri Plastik Kemasan Industri Pupuk 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Kimia Organik Industri Plastik Kemasan Industri Pupuk Dan produk turunan berbasis Gas lainnya 	Kabupaten Banggai
5.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	a. Industri Besi			
		Industri Biji Besi Dan stainless	Industri Besi dan Stainless steel	Industri Besi dan Stainless steel dan turunannya	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara
		b. Industri Nikel			
		<ul style="list-style-type: none"> Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni) 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Nikel (Feronikel, Nikel Mate, dan Nikel Murni) 	Industri Stainlees steel untuk bahan kontruksi, perabotan, peralatan kesehatan,	Kabupaten Morowali dan Morowali Utara

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
				kawat, peralatan listrik/elektronika dan produk turunannya lainnya	
c. Industri Bahan Galian Bukan Logam					
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Semen • Industri Aspal • Industri pengolahan sirtu 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Semen 	<ul style="list-style-type: none"> • Indutri granit dan marmer • Industri pengolahan kapur 	Morowali Utara, Morowali, Donggala, Palu, Poso, Tojo Unauna

Sumber: Dokumen RPIP Sulawesi Tengah 2017-2037.

Berdasarkan sepuluh faktor tersebut di atas, produk-produk Prioritas kabupaten diseluruh Kabupaten Sigi dianalisis dengan Analisis LQ dan melalui FGD yang melibatkan Pokja dan OPD tingkat Kabupaten dan Dinas Perindustrian Kabupaten Sigi, kemudian dikelompokan sesuai jenis kelompok industri seperti yang tercantum dalam RIPIN, maka ditetapkan Industri Prioritas Kabupaten Sigi, maka ditetapkan Industri Prioritas Kabupaten Sigi yang terdiri dari Industri Andalan, Industri Pendukung dan Industri Hulu sebagaimana dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2
Bangun Industri Prioritas Kabupaten Sigi

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Prioritas Kabupaten Sigi dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI), sebagai berikut :

Tabel 4.11
Industri Prioritas Kabupaten Sigi

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan			
		A. Pengolahan Makanan, Minuman berbahan baku Buah-Buahan, Umbi-Umbian dan Sayur-Sayuran Khas Sigi.			
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Buah-Buahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplemen dan pangan fungsional berbasis bahan baku Buah-Buahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Buah-buahan dalam kaleng • Sayuran organik dalam kemasan dan produk 	Seluruh Kecamatan, (Kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Dolo, Dolo

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
		(Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Pepaya California dll) <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Umbi-umbian • Pengolahan Minum berbahan Baku Buah-Buahan • Pengolahan Rebung bambo • Air mineral dalam kemasan 	(Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Pepaya California dll) <ul style="list-style-type: none"> • Air mineral dalam kemasan (AMDK) 	turunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi pengolahan aneka buah-buahan dan minuman berbahan baku buah-buahan. 	Barat, Dolo Selatan, Marawola, Marawola barat, Kinavaro, Gumbasa, Tanambulava, Lindu, Kulawi Kulawi Selatan, Pipikoro), Palolo, Biromaru
b. Industri Pengolahan Biji Kopi					
		• IKM aneka olahan biji kopi khas Sigi	• IKM Olahan biji kopi khas Sigi	• IKM Olahan biji kopi khas Sigi	Kecamatan Kulawi, Pipikoro, Kecamatan Kulawi selatan dan Lindu
c. Industri Bawang Goreng					
		• Produk bawang goreng dengan berbagai bentuk kemasan	• Diversifikasi Produk bawang goreng	• Produk bawang goreng dengan kemasan dan kualitas tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Produk bawang goreng organik 	Kecamatan Sigi Biromaru, kecamatan Dolo
d. Industri Pengolahan Gula Aren					
		• Gula Merah <ul style="list-style-type: none"> • Gula semut 	• Minuman Sirup berbahan baku Gula aren <ul style="list-style-type: none"> • Aneka panganan berbahan 	• Gula aren cair dalam kemasan. <ul style="list-style-type: none"> • Aneka panganan berbahan baku gula aren. 	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Kulawi

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
			baku gula aren. • Gula Aren cair dalam kemasan.		
e. Industri berbahan baku Ikan Air Tawar					
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri penolahan ikan Danau • Industri berbahan baku Ikan air tawar • Olahan Abon Ikan Mujair • Olahan Ikan Filet. • pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan ikan air tawar menjadi tepung ikan, nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya. • Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil ikan air tawar • Industri pengolahan minyak ikan air tawar dan suplemen ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengolahan minyak ikan, dan suplemen ikan air tawar • Ikan kaleng • berbagai Industri bahan baku Ikan dan produk hasil perikanan darat turunan lainnya 	Kecamatan Dolo, Kecamatan Lindu, Kecamatan Sigi Biromaru,
f. Industri Pengolahan Berbahan baku Daging Ternak					
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan daging ternak (ayam potong, sapi, Domba ekor gemuk • Pengolahan/p enyakan kulit ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan limbah ternak menjadi biogas. • Pengolahan Daging hasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan daging kaleng • 	Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Marawola,

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
			peternakan sapi dan domba ekor gemuk		Kecamatan Gumbasa
2.	Industri Hulu Agro	a. Industri Pengolahan Kelapa Terpadu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Air kelapa dalam kemasan • Briket arang • Nata de coco 	<ul style="list-style-type: none"> • Santan bubuk dan cair • Tepung kelapa • Asap cair 	<ul style="list-style-type: none"> • Carbon aktif • VCO 	Kecamatan Dolo, Kecamatan Dolo Barat, Kecamatan Dolo Selatan, Kecamatan Marawola, Kecamatan Gumbasa, Kecamatan Tanambulava
		b. Industri Pengolahan Minyak Atsiri (Cengkeh)			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri penyulingan minyak atsiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi minyak dari daun Cengkeh, nilam dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Produk turunan minyak atsiri dari olahan berbahan baku alternative lainnya. 	Kecamatan Palolo, Dolo Selatan, Biromaru, Kecamatan Kulawi, Marawola Barat
		c. Industri olahan coklat			
<ul style="list-style-type: none"> • Coklat Pasta • Makanan dan minuman dari coklat • Lemak coklat • Diverifikasi produk cokelat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bubuk coklat • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao 	<ul style="list-style-type: none"> • Coklat untuk konsumsi rumah sakit • Produk coklat dengan kualitas tinggi 	Kecamatan Palolo		
d. Industri Pakan					
<ul style="list-style-type: none"> • Pakan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan Ternak dalam kemasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pakan ternak dalam kemasan 	Kecamatan Sigi Boromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan		

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
					Dolo Barat, Kecamatan Gumbasa
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu, Rotan dan Bambu)	A. Industri Furniture dan pengolahan Kayu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Furniture kayu • Industri penggergajian kayu • Penyamakan Kulit 	<ul style="list-style-type: none"> • Furniture kayu dan kayu kelapa. • Industri penggergajian kayu • Kerajinan kulit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Furniture kayu dan kerajinan lainnya • Furniture kayu kelapa. • Kerajinan kulit. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulawi, Kecamatan Palolo, Kecamatan Nokilalaki, Dolo Selatan, Biromaru, Dolo.
		B. Industri Kerajinan Rotan dan Bambu			
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan furniture berbahan baku Rotan dan Bambu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan dan Meubel Rotan atau bambu • Kerajinan anyaman Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi • Industri kerajinan rotan dan bambu laminasi (press). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan Rotan dan bambu • Kerajinan Rotan dan bambu yang memiliki nilai tinggi • Industri kerajinan rotan dan bambu laminasi (press) 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulawi, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Pipikoro, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki, Dolo Selatan.
		C. Industri Pengolahan Batako			
		<ul style="list-style-type: none"> • Industri Pembuatan Batako, Pavin standar nasional. • Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya berbahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Batako berkualitas tinggi • Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah) • Industri pavin kualitas tinggi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2019-2023	2023 - 2027	2029-2039	
	baku pasir local • Industri Batako standar nasional.	• Industri pavin kualitas tinggi.			
D. Industri Tekstil					
	• Industri tenun dan batik lokal.	• Industri tenun dan batik lokal.	• Industri tenun dan batik lokal.		Kecamatan Kulawi, Biromaru, Dolo, Marawola dan Dolo Barat.

Sumber: Tim Ahli, 2018

4.2.1.2 Sasaran Dan Program serta Rencana Aksi Pembangunan Industri

A. Industri Unggulan/Prioritas Kabupaten Sigi

Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan/prioritas di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Industri Pangan

Industri Pangan di Kabupaten Sigi adalah Industri pengolahan berbahan baku pertanian dan peternakan yang terdiri dari; Pengolahan Makanan dan cemilan/ keripik berbahan baku Buah-Buahan (Buah Naga, pisang, Mangga, Nangka dan Pepaya California), Pengolahan umbi-umbian, Pengolahan Bawang Goreng, Pengolahan Minum berbahan Baku Buah-Buahan, Pengolahan Rebung bambu dan Pengolahan Biji Kopi, juga berbahan baku Pengolahan hasil pertanian dan lainnya. Industri berbahan baku Ikan air tawar seperti; pengolahan ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku, tepung ikan; nugget ikan, bakso ikan, abon ikan, krupuk ikan dan masih banyak produk yang lainnya. dan produk makanan olahan lainnya; pengolahan gula aren dan lainnya. Potensi pengembangan industri pangan ini tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sigi.

Industri Pengolahan umbi-umbian Kabupaten Sigi khususnya ubi ungu juga potensil dikembangkan sebagai industri kecil. Potensi Ubi ungu di kabupaten Sigi sebagai bahan baku industri pangan dapat di diversifikasi atau dikembangkan oleh industri pangan di antaranya diolah menjadi ; kripik ubi, aneka cookies atau kue olahan tradisional khas Sigi lain-lain. Industri Pengolahan Sayur-Sayuran, khususnya di beberapa wilayah Kecamatan, dimana sayur-sayuran

diolah dalam produksi turunannya, sehingga menjadi produk olahan yang bernilai tambah tinggi, dibandingkan dengan sayur-sayuran dijual dalam komoditas tanpa dilakukan pengolahan.

Sejalan dengan hal ini pemerintah kabupaten sigi didalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri khususnya industri pangan maka hal ini akan disinergikan dengan Program RPKP Kawasan perdesaan Agrowisata “Magaya”. Pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Sigi merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu industri pada kelompok ini harus terus didorong pengembangannya. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akan dibangun pada industri pangan di Kabupaten Sigi sebagai berikut.

Tabel 4.12
Sasaran dan Strategi Industri Pengolahan Pangan

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peta potensi Bahan baku IKM pangan di kabupaten Sigi b. Tersedianya bahan baku Industri pengolahan Makanan dan cemilan keripik berbahan baku pisang, manga, sukun, nangka, pepaya dan Buah naga serta berbahan Ubi Ungu. c. Tersedianya bahan baku Industri pengolahan Bawang Goreng. d. Tersedianya bahan baku Industri pengolahan Biji Kopi. e. Tersedianya bahan baku Industri pengolahan Ikan Air tawar khas Sigi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana produksi. b. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri pengolahan buah-buahan. c. Terdiversifikasinya produk olahan Makanan dan cemilan keripik berbahan baku Makanan dan cemilan keripik berbahan baku pisang, manga, sukun, nangka, Pepaya dan Buah naga serta berbahan Ubi Ungu. d. Terdiversifikasinya produk olahan Bawang Goreng dan Gula aren. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya Industri pengolahan Makanan Pangan yang maju dan berdaya saing. b. Adanya produk olahan Industri Olahan Pangan yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi. c. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negri. d. Mengembangkan industri pengolahan Makanan/Cemilan kripik yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku e. Meningkatnya ekspor produk IKM Pangan.

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> f. Tertersedianya bahan baku Industri pengolahan Daging ternak. g. Terbentuknya sentra industri pengolahan pangan. h. Peningkatan ketersediaan produk olahan Pangan. i. Peningkatan SDM Pelaku usaha Industri olahan. j. Berkembangnya wirausaha baru IKM pangan berbasis pesantren (<i>Santripreneur</i>) k. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri. l. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik dalam bentuk online, katalog dan brosur. m. Terbangunnya jejaring pemasaran dengan platform digital (<i>e-smart IKM</i>) n. Terfasilitasinya temu usaha antara pemasok bahan baku, perajin dan buyer. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Terdiversifikasinya produk olahan Biji Kopi khas Sigi, f. Terdiversifikasinya produk olahan Ikan air tawar dan olahan daging ternak g. Adanya produk olahan Industri Olahan Pangan yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi h. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri . i. Tersedianya klaster Industri pengolahan Pangan. j. Peningkatan peran perguruan tinggi negeri Universitas Tadulako, dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya dalam Pengembangan Produk 	<ul style="list-style-type: none"> f. Mendorong Investasi terhadap industri Pangan Prioritas daerah
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi. b. Penguatan Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku (<i>raw material</i>) industri melalui penataan struktur industri, dan dukungan program RPKP Agrowisata “Magaya” dan Sigi Hijau. c. Peningkatan mutu produk pengolahan Pangan. d. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahanbaku dengan industri pengolahan pangan. 		

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
e. Peningkatan wirausaha baru bidang usaha IKM pangan melalui Program Santripreneur. f. Fasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri. g. Fasilitasi promosi melalui media elektronik dalam bentuk online (<i>e-Smart IKM</i>), katalog dan brosur		

Rencana aksi indikatif industri unggulan pengolahan pangan untuk tahun 2019-2039 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Rencana Aksi Indikatif Industri Pengolahan Pangan Kabupaten Sigi 2019-2039

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK Sigi							
A	Pembentukan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya PERDA RPIK Sigi 	Kemenperin	Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, OPD terkait.	Pelaku Usaha	√		
B	Menjalankan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya PERDA RPIK Sigi khususnya industri andalan Pangan 	Kemenperin	Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, OPD terkait	Pelaku Usaha	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Peningkatan pelayanan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya legalitas usaha IKM 		DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku Usaha	√	√	√
D	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap tahun Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak lanjut pengembangan Industri Pangan 	Kemenperin	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku Usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
1.2	Memperkuat Kelompok Usaha Bersama							
A	Mengaktifkan KUB Industri dan penataan kelembagaan serta legalitasnya	Tertatanya kelembagaan KUB aktif	Kemenperin, Kemenkop & UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, KUB, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							
2.1	Menumbuhkan wirausaha baru Sigi							
A	Mengadakan pelatihan kewirausahaan/ peningkatan motivasi usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal khususnya Buah-buahan dan Umbi yaitu (Makanan dan cemilan keripik berbahan baku pisang, manga, sukun, nangka, Pepaya dan Buah naga serta berbahan Ubi Ungu).	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal Bawang Goreng khas Sigi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	khususnya Kopi Toratima Sigi.		Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	dan Swasta Lainnya)			
E	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal khususnya Ikan Air Tawar.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
F	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal khususnya Gula Aren dan Gula semut.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pangan dan Perikanan dan Perikanan				
G	Perbanyak Wirausaha IKM melalui program Santripreneur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah wirausaha berbasis Santri Preneur 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pondok Pesantren	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
H	Mengembangkan inkubator bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
	Pemberdayaan masyarakat miskin utk dapat memiliki usaha mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru dgn memanfaatkan sumberdaya lokal 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Meningkatkan Kompetensi Manajerial							
A	Mengadakan pelatihan manajemen usaha industri pangan	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan manajemen keuangan/pencatatan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi manajerial keuangan para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan manajemen produksi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kompetensi produksi para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan manajemen pemasaran dll	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kompetensi pemasaran para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.3	Meningkatkan Kompetensi Teknis							
A	Mengadakan pelatihan teknik produksi pangan olahan khususnya makanan, minuman dan	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemenperin, Balai Besar Industri Agro,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	keripik berbahan baku buah-buahan dan umbi-umbian		dan Kementrian/ Lembaga Terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
B	Mengadakan pelatihan teknik produksi pengolahan biji Kopi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga Terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan teknik produksi pangan olahan khususnya Bawang Goreng khas Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga Terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan teknik produksi pangan olahan khususnya Gula aren dan gula semut	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lembaga Terkait.	UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
E	Mengadakan pelatihan teknik produksi pangan olahan berbahan baku Ikan Air Tawar	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga Terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
F	Mengadakan pelatihan teknik produksi berbahan baku daging ternak	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga Terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
G	Pemagangan, Studi banding IKM sejenis yang Maju	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lembaga Terkait.		dan Swasta Lainnya)			
H	Pelatihan Tenaga Kerja Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Pudiklat Industri kemenperin, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
I	Fasilitasi perolehan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya Kompetensi teknis para pekerja industri 	Pudiklat Industri kemenperin, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.4	Meningkatkan Kompetensi Kreativitas dan Inovasi							
A	Mengadakan pelatihan dan fasilitasi desain kemasan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya tingkat kreatifitas pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan diversifikasi dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya tingkat inovasi pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar	Dinas Perindustrian dan	Pelaku usaha, BUMN,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	produk berbahan baku pangan olahan		Industri Agro, Kementerian/ Lembaga terkait.	Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan	Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri IKM							
3.1	Meningkatkan Kemampuan Tekonologi Proses Produksi							
A	Memfasilitasi standarisasi/sertifikasi (SNI, ISO, HAKI, GMP, HACCP, Halal) Produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya standarisasi dan sertifikasi 	Kemeperin, Kemenhum & Ham, Balai Besar Industri Agro, dan Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, LPPOM-MUI, Perusahaan Swasta,	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Kemenhum & Ham, Balai Besar Industri Agro, dan Kementerian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, LPPOM-MUI, Perusahaan Swasta,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Mengadakan pelatihan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya pelaku usaha 	Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM, BP-POM Sulteng	Pelaku usaha	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan peningkatan mutu produk/penerapan GKM	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha,	√	√	√
E	Mengadakan pelatihan Barista Kopi, Pengujian Mutu Kopi, Festival Kopi Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha	√	√	√
F	Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi proses industri Ikan air tawar dan industri pengolahan daging ternak	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
3.2	Meningkatkan Kemampuan Teknologi (Mesin/Peralatan)							
A	Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya mesin/peralatan 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga lainnya.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta.	√	√	√
B	Memfasilitasi restrukturisasi mesin	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya restrukturisasi mesin 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga lainnya.n	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, CDinas Koperasi UKM	Pelaku usaha.	√	√	√
C	Kerjasama alih teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya proses transfer/alih teknologi 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, dan Kementrian/ Lembaga lainnya.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3.3	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Pengolahan Limbah							
A	Memfasilitasi pengembangan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Terolahnya limbah industri lainnya 	Kementrian Kehutanan dan	BLH, Dinas Perindustrian dan	Pelaku Usaha	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengolahan limbah industri pangan		Lingkungan Hidup, Kemenperin, Kementriaan/ Lembaga terkait.	Perdagangan, BP4D,				
4	Penataan Struktur Industri							
4.1	Pembinaan keterkaitan industri hulu ke hilir							
A	Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya kerjasama lintas sektor 	Kemenperin, Kementan, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan OPD terkait lainnya	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Intensifikasi (peningkatan (Produktifitas), rejuvenasi (peremajaan), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunya koordinasi OPD terkait 	Kemenperin, Kementan, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan,	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	melalui program Bersama OPD terkait.			Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan OPD terkait lainnya	dan Swasta Lainnya)			
C	Memfasilitasi kemitraan, temu usaha, antara industri kecil dan industri besar	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya kemitraan 	Kemenperin, Kementan, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan kajian pengembangan industri dari hulu ke hilir	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya kajian pengembangan industri 	Kemenperin, Kementan, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi & UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
E	Pembinaan <i>One Distrik One Produk (OVOP SIGI)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya industri di masing-masing desa 	Kemenperin, Kementan, Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku usaha, BUMN,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lembaga terkait.	, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi & UKM	Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
4.2	Pengembangan Sistem Informasi Industri							
A	Pemetaan Potensi Industri pangan.	<ul style="list-style-type: none"> Terpetakannya potensi industri 	Kemenperin, Kemkominfo, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, Desa	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Pemanfaatan Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> Dimanfaatkannya SII 	Kemenperin, Kemkominfo, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri	<ul style="list-style-type: none"> Terawasinya pelaksanaan pembangunan industri 	Kemenperin, Kemkominfo, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kerjsama perguruan Tinggi	√	√	√
5	Sarana Prasarana Industri							
A	Penataan Lokasi sentra IKM yang ada bagi penempatan IKM Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya lokasi sentra IKM Sigi Biromaru 	Kemeperin, Kementerian/ Lembaga terkait.	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan		√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Pembnagunan Infrastruktur di dalam Sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Infrastruktur Dasar (Jalan, Bangunan, jaringan air bersih, Listrik dll) dalam sentra 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PU	Swasta	√	√	√
C	Penyediaan sarana prasarana penunjang sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana sentra 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PU	Swasta	√	√	√
D	Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bantuan peralatan usaha industri (IKM) Prioritas 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PU	Swasta	√	√	√
6.	Penguatan IKM Sentra							
A	Penyediaan sarana informasi sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana informasi sentra 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,		√	√	√
B	Pembinaan/penguatan kelembagan kelompok usaha di dalam sentra dan diluar sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya pelaku usaha di sentra 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Koordinasi lintas sektor untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha di sentra dan diluar Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> Terjalinnnya koordinasi lintas sektor 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Lembaga terkait.		(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
D	Diseminasi teknologi mesin dan tekonologi proses bagi pelaku usaha di sentra dan diluar Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> Tersebar nya informasi teknologi ke sentra 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
7	Program Pemasaran IKM							
A	Penguatan branding produk khususnya Kopi Toratima, Kripipik umbiumbian dan olahan Ikan air Tawar khas Kabupaten Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Brand Produk 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Membuat sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektonik (Brosur, profil usaha, leaflet, baligho, dokumentasi video, e-catalog, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana promosi 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Menyelenggarakan pelatihan dan penyusunan pemasaran platform Digital (e-Smart)	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya pelaku usaha didalam memasarkan produk melalui online 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	Fasiltasi Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran platform Digital (e-Smart)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana yang digunakan oleh pelaku usaha didalam melakukan pemasaran dan promosi usah berbasis daring. 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
E	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti pameran - pameran di beberapa event	<ul style="list-style-type: none"> Terpromosikannya produk IKM 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
F	Memfasilitasi penyelenggaraan pameran,	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pameran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
G	Menjalin Kerjasama dengan pusat-pusat perdagangan, hotel, restoran diluar kabupaten Sigi khususnya di Kota Palu dan diluar daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya kerjasama pemasaran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha, Perusahaan swasta	√	√	√
H	Pembuatan/ peningkatan fasilitas showroom pemasaran di lokasi-lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya showroom pemasaran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/	Dinas Perindustrian dan	Pelaku usaha,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	strategis termasuk di Bandara Sis-Aljufri Palu dan lokasi strategis lainnya (Kopi Toratima dan produk prioritas lainnya)		Lembaga terkait.	Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata				
I	Dioperasionalkannya Showroom Pemasaran sudah yang ada	<ul style="list-style-type: none"> Dioperasionalkannya showroom pemasaran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas pariwisata	Pelaku usaha,	√	√	√
8.	Pembiayaan Industri (IKM)							
A	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya pembiayaan usaha 	Kemenkop & UKM, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan /pendampingan penyusunan proposal kelayakan usaha yang bankable	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelatihan 	Kemenkop & UKM, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
C	Menjalin kerjasama dengan BUMN/Bank SULTENG/ Swasta dalam pemanfaatan <i>dana corporate social</i>	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya kerjasama 	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, Kementrian/	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>responsibility</i> (CSR) bagi pembiayaan usaha industri		Lembaga terkait.					
D	Fasiltasi Dungan BUMDEs didalam pembiayaan IKM Desa	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya kerjasama BUMDes dan IKM 	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, KEMENDES, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BPPMD	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√

2. Industri Hulu Agro

Industri pengolahan hulu agro terdiri atas industri pengolahan kelapa terpadu, industri pengolahan minyak atsiri dan industri olahan coklat dan industri pakan ternak. Sasaran, strategi serta rencana aksi pembangunan industri pengolahan hulu agro dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.14
Sasaran dan Strategi Industri Pengolahan Hulu Agro

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peta potensi Bahan baku IKM Hulu Agro di kabupaten Sigi. b. Tersedianya bahan baku Industri pengolahan Hulu Agro. c. Terbentuknya sentra industri pengolahan Hulu agro didalam dan diluar kawasan. d. Peningkatan ketersediaan produk olahan Hulu Agro. e. Peningkatan SDM Pelaku usaha Industri olahan. f. Berkembangnya wirausaha baru IKM Hulu Agro berbasis pesantren (SantriPreneur) g. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri. h. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik dlm online, katalog dan brosur. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana produksi. b. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri pengolahan buah-buahan. c. Terdiversifikasinya produk olahan Makanan dan cemilan keripik berbahan baku Makanan dan cemilan keripik berbahan baku pisang, manga, sukun, nangka, Pepaya dan Buah naga serta berbahan Ubi Ungu. d. Terdiversifikasinya produk olahan Bawang Goreng dan Gula aren. e. Terdiversifikasinya produk olahan Biji Kopi khas Sigi, f. Terdiversifikasinya produk olahan Ikan air tawar dan olahan daging ternak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya Industri pengolahan Hulu Agro yang maju dan berdaya saing. b. Adanya produk olahan Industri Olahan Hulu Agro yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi. c. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri. d. Mengembangkan industri pengolahan Makanan/Cemilan kripik yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku e. Meningkatnya ekspor produk IKM Hulu Agro. f. Mendorong Investasi terhadap industri Hulu Agro Prioritas daerah

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<ul style="list-style-type: none"> i. Terbangunnya pemasaran platform digital (e-smart) j. Terfasilitasinya temu usaha antara pemasok bahan baku, perajin dan buyer. 	<ul style="list-style-type: none"> g. Adanya produk olahan Industri Olahan Hulu Agro yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi h. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negeri i. Peningkatan peran perguruan tinggi (Untad dan PT. Swasta lainnya) dalam Pengembangan Produk 	
Strategi		
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi. b. Peningkatan mutu produk pengolahan Hulu Agro. c. Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri mealui penataan struktur industri dan mengsinergikan dengan program RPKP Agrowisata Magaya dan Sigi Hijau. d. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahanbaku dengan industri pengolahan Hulu Agro. e. Peningkatan wirausaha baru bidang usaha IKM Hulu Agro melalui Program Santripreneur. f. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri. g. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik dalam online (<i>E-Smart IKM</i>), katalog dan brosur. 		

Tabel 4.15
Rencana Aksi Pembangunan Industri Hulu Agro Tahun 2019-2039

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK Sigi							
A	Pembentukan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya PERDA RPIK Sigi 	Kemenperin	Bupati, BP4D, DPRD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, OPD terkait	Pelaku Usaha	√		
B	Menjalankan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya PERDA RPIK Sigi khususnya industri andalan Hulu Agro 	Kemenperin	Bupati, BP4D, DPRD, Dinas Perindustrian Perdagangan, OPD terkait	Pelaku Usaha	√	√	√
C	Peningkatan pelayanan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya legalitas usaha IKM 	Kemenperin	DPMPSTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku Usaha	√	√	√
D	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap tahun Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak lanjut pengembangan Industri Hulu Agro 	Kemenperin	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku Usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
1.2	Memperkuat Kelompok Usaha Bersama							
	Mengaktifkan KUB Industri dan penataan kelembagaan serta legalitasnya	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya kelembagaan KUB aktif 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, KUB, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							
2.1	Menumbuhkan wirausaha baru Sigi							
A	Mengadakan pelatihan kewirausahaan/ peningkatan motivasi usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal komoditi hulu Agro.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
C	Perbanyak Wirausaha IKM melalui program Santri Preneur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah wirausaha berbasis Santri Preneur 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pondok Pesentren, Dinas Pemuda dan Olahraga	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengembangkan inkubator bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
E	Pemberdayaan masyarakat miskin utk dapat memiliki usaha mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru Tumbuhnya wirausaha baru dgn memenfatakan sumberdaya lokal 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.2	Meningkatkan Kompetensi Manajerial							
A	Mengadakan pelatihan manajemen usaha industri Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
			Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM				
B	Mengadakan pelatihan manajemen keuangan/pencatatan keuangan.	• Terbinanya Kompetensi manajerial para pelaku IKM	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan manajemen produksi	• Terbinanya kompetensi manajerial para pelaku IKM	Kemeperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan manajemen pemasaran dll	• Terbinanya kompetensi manajerial para pelaku IKM	Kemeperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.3	Meningkatkan Kompetensi Teknis							
A	Mengadakan pelatihan teknik produksi hulu agro	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
B	Mengadakan pelatihan teknik produksi hulu agro khususnya minyak atsiri berbahan baku daun cengkeh dll.	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan teknik produksi Hulu Agro olahan khususnya pengolahan coklat, kopi.	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan teknik produksi Hulu Agro olahan Kelapa dalam.	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
E	Pemagangan, Studi banding IKM sejenis yang Maju	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
			Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
F	Pelatihan Tenaga Kerja Industri	• Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM	Pudiklat Industri kementerian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
G	Fasilitasi perolehan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	• Terbinanya Kompetensi teknis para pekerja industri	Pudiklat Industri kementerian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenakerjaan, dan Transmigrasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.4	Meningkatkan Kompetensi Kreativitas dan Inovasi							
A	Mengadakan pelatihan dan fasilitasi desain kemasan produk Hulu Agro.	• Terbinanya tingkat kreatifitas pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
B	Mengadakan pelatihan diversifikasi dan inovasi produk Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya tingkat inovasi pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri IKM							
3.1	Meningkatkan Kemampuan Tekonologi Proses Produksi							
A	Memfasilitasi standarisasi/sertifikasi (SNI, ISO, HAKI, GMP, HACCP, Halal,) Produk IKM Hulu Agro.	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya standarisasi dan sertifikasi 	Kemeperin, Kemenhum & Ham, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, LPPOM-MUI, Perusahaan Swasta,	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, LPPOM-MUI, Perusahaan Swasta,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
C	Mengadakan pelatihan Keamanan Produk hulu agro.	• Terbinanya pelaku usaha	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM, BP-POM Sulteng	Pelaku usaha	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan peningkatan mutu produk/penerapan GKM	• Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha,	√	√	√
E	Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi proses industri hulu agro (minyak atsiri, Kelapa dalam dan coklat)	• Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3.2	Meningkatkan Kemampuan Teknologi (Mesin/Peralatan)							
A	Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan.	• Terfasilitasinya mesin/peralatan	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
B	Memfasilitasi restrukturisasi mesin	• Terfasilitasinya restrukturisasi mesin	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha,	√	√	√
C	Kerjasama alih teknologi.	• Terjadinya proses transfer/alih teknologi	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3.3	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Pengolahan Limbah							
A	Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah industri Hulu Agro	• Terolahnya limbah industri lainnya	Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	BLHD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BP4D,	Pelaku Usaha	√	√	√
4	Penataan Struktur Industri							
4.1	Pembinaan keterkaitan industri hulu ke hilir							
A	Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku industry hulu agro.	• Terjalannya kerjasama lintas sektor	Kemenperin, Kementrian Pertanian, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan,	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
				Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan OPD terkait lainnya	dan Swasta Lainnya)			
B	Intensifikasi (peningkatan (Produktifitas), rejuvenasi (peremajaan), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan melalui program Bersama OPD terkait.	• Terbangunya koordinasi OPD terkait	Kemenperin, Kementerian Pertanian, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dan OPD terkait lainnya	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Memfasilitasi kemitraan, temu usaha, antara industri kecil dan industri menengah.	• Terjalannya kemitraan	Kemenperin, Kementerian Pertanian, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Mengadakan kajian pengembangan industri dari hulu ke hilir	• Tersusunnya kajian pengembangan industri	Kemenperin, Kementerian Pertanian, Kementerian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
			Lembaga terkait.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi UKM	dan Swasta Lainnya)			
E	Pembinaan <i>One Distrik One Produk (OVOP SIGI)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya industri di masing-masing desa 	Kemenperin, Kementrian Pertanian, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
4.2	Pengembangan Sistem Informasi Industri							
A	Pemetaan Potensi Industri hulu agro.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpetakannya potensi industri 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, Desa	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Pemanfaatan Sistem Informasi Industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Dimanfaatkannya SII 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Terawasinya pelaksanaan pembangunan industri 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Kerjasama perguruan Tinggi	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
5	Sarana Prasarana Industri							
A	Penataan Lokasi sentra IKM yang ada bagi penempatan IKM Hulu Agro.	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya lokasi sentra IKM Sigi Biromaru 	Kemeperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√
B	Pembangunan Infrastruktur di dalam Sentra.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Infrastruktur Dasar (Jalan, Bangunan, jaringan air bersih, Listrik dll) dalam sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta	√	√	√
C	Penyediaan sarana prasarana penunjang sentra.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas	Swasta	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
				Komunikasi dan Informatika				
D	Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Hulu Agro.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bantuan peratalatan usaha industri (IKM) Prioritas. 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta	√	√	√
6.	Penguatan IKM Sentra							
A	Penyediaan sarana informasi sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana informasi sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,		√	√	√
B	Pembinaan/penguatan kelembagan kelompok usaha di dalam sentra dan diluar sentra IKM.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya pelaku usaha di sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Koordinasi lintas sektor untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha di sentra dan diluar Sentra IKM.	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya koordinasi lintas sector 	Kemenperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
D	Diseminasi teknologi mesin dan tekonologi proses bagi pelaku usaha di sentra dan diluar Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya informasi teknologi ke sentra 	Kemeperin, Balai Besar Industri Agro, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
7	Program Pemasaran IKM							
A	Penguatan branding produk Hulu agro Kabupaten Sigi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya Brand Produk 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Membuat sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektonik (Brosur, profil usaha, leaflet, baliho, dokumentasi video, <i>e-catalog</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana promosi 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Menyelenggarakan pelatihan dan penyusunan pemasaran platform Digital (<i>e-Smart</i>) IKM Hulu Agro	<ul style="list-style-type: none"> • Berkembangnya pelaku usaha didalam memasarkan produk melalui online 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Fasiltasi Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran platform Digital (<i>e-Smart IKM</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana prasarana yang digunakan oleh pelaku usaha 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD			

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
		didalam melakukan pemasaran dan promosi usah berbasis daring.	Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	dan Swasta Lainnya)			
E	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti pameran-pameran di beberapa event.	<ul style="list-style-type: none"> • Terpromosikannya produk IKM 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
F	Memfasilitasi penyelenggaraan pameran,	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya pameran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
G	Menjalin Kerjasama dengan pusat-pusat perdagangan, hotel, restoran diluar kabupaten Sigi khususnya di Kota Palu dan diluar daerah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya kerjasama pemasaran 	K Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait. emendag,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha, Perusahaan swasta	√	√	√
H	Pembuatan/peningkatan fasilitas showroom pemasaran di lokasi-lokasi strategis termasuk di Bandara Sis-Aljufri Palu dan lokasi strategis lainya (olahan kelapa, minyak atsiri, coklat dan produk berbasis hulu agro prioritas lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya showroom pemasaran 	Kemendag, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lain-Lain	2019-2023	2022-2027	2029-2039
8.	Pembiayaan Industri (IKM)							
A	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	• Terfasilitasinya pembiayaan usaha	Kemenkop & UKM, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan /pendampingan penyusunan proposal kelayakan usaha yang bankable	• Terselenggaranya pelatihan	Kemenkop & UKM, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
C	Menjalin kerjasama dengan BUMN/Bank SULTENG/ Swasta dalam pemanfaatan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi pembiayaan usaha industry	• Terjalinnnya kerjasama	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Bank Sulteng, Perusahaan Swasta lainnya, Pelaku usaha	√	√	√
D	Fasiltasi Dungan BUMDEs didalam pembiayaan IKM Desa	• Terjalinnnya kerjasama BUMDes dan IKM	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, KEMENDES, Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Aneka (Kerajinan Kayu, Rotan dan Bambu) batako Batako/Batu merah, Pavin serta industri tekstil tenun dan batik lokal.

Industri Tekstil Kulit, Alas Kaki dan Aneka menjadi satu diantara jenis industri yang masuk dalam industri unggulan Kabupaten Sigi yang terdiri dari **1) Industri Furniture dan pengolahan Kayu**, antara lain: Furniture kayu, Industri penggergajian kayu, Furniture kayu, Industri penggergajian kayu, dan Furniture kayu dan kerajinan lainnya. **2) Industri Kerajinan Rotan dan Bambu**, terdiri dari Kerajinan furniture berbahan baku Rotan dan Bambu, Kerajinan dan Meubel Rotan atau bambo, Kerajinan berbahan baku limbah industri pengolahan Rotan dan bambo. **3) Industri Pengolahan Batako terdiri atas**, Industri Pembuatan Batako, Industri pembuatan pot dan kerajinan lainnya berbahan baku pasir lokal, Industri Batako, Industri Kerajinan berbahan baku tanah liat (Gerabah). **4) Industri Tekstil terdiri atas**, Industri tenun dan batik lokal.

Sasaran dan strategi serta rencana aksi pembangunan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka dijabarkan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4.16

Sasaran dan Strategi Industri Mebel dan Kerajinan Kayu, Rotan dan Bambu serta Batako/Batu Merah, Tekstil Tenun dan Batik Lokal

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
a. Tersedianya bahan baku Industri Meubel dan kerajinan anyaman Kayu, Rotan dan Bambu serta industri tekstil (tenun dan batik lokal) b. Tersedianya bahan baku Industri Aneka. c. Tersedianya bahan baku Kayu, Rotan dan Bambu serta tenun dan kain batik lokal. d. Terbentuknya sentra industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Aneka. e. Peningkatan ketersediaan produk	a. Tersedianya fasilitasi sarana dan prasarana produksi Industri aneka. b. Adanya forum konsultasi sentra produksi Industri Aneka. c. Terdiversifikasinya produk Meubel Kayu, Rotan dan Bambu serta tenun dan kain batik lokal. d. Terdiversifikasinya produk olahan kerajinan anyaman Rotan dan Bambu	a. Terbangunnya Industri pengolahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman, tenun dan kain batik lokal yang maju dan berdaya saing. b. Adanya produk olahan Industri Olahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi.

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<p>olahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman.</p> <p>f. Peningkatan SDM Pelaku usaha Industri olahan.</p> <p>g. Berkembangnya wirausaha baru IKM Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman berbasis pesantren (Santripreneur)</p> <p>h. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri.</p> <p>i. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik dlm online, katalog dan brosur.</p> <p>j. Terbangunnya pemasaran platform digital (e-smart)</p> <p>k. Terfasilitasinya temu usaha antara pemasok bahan baku, perajin dan buyer.</p>	<p>serta tenun dan kain batik lokal.</p> <p>e. Terdiversifikasinya produk olahan Batako dan Batu merah</p> <p>f. Adanya produk olahan Industri Olahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan kain batik lokal yang memiliki standar mutu dan bersertifikasi</p> <p>g. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negri</p> <p>h. Tersedianya klaster Industri pengolahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan kain batik lokal</p> <p>i. Peningkatan peran perguruan tinggi (Untad dan PT. Swasta lainnya) dalam Pengembangan Produk</p>	<p>c. Terciptanya pasar dalam negeri dan luar negri.</p> <p>d. Mengembangkan industri pengolahan Meubel dan anyaman kayu, rotan dan bambu sentra produksi bahan baku</p> <p>e. Meningkatnya ekspor produk IKM Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan kain batik lokal</p> <p>f. Mendorong Investasi terhadap industri Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan batik lokal juga Prioritas daerah</p>
Strategi		
<p>a. Peningkatan utilitas dan aksesibilitas serta kapasitas produksi.</p> <p>b. Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui penataan struktur industri</p> <p>c. Peningkatan mutu produk pengolahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman Kayu, Rotan dan Bambu serta tenun dan kain batik lokal</p> <p>d. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahanbaku dengan industri pengolahan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan kain batik lokal.</p>		

Sasaran		
2019-2023	2024-2028	2029-2039
<p>e. Peningkatan wirausaha baru bidang usaha IKM Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman serta tenun dan kain batik lokal melalui Program Santripreneur.</p> <p>f. Peningkatan Kualitas Industri Batako dan Batu Merah</p> <p>g. Memfasilitasi penyelenggaraan dan partisipasi pameran dalam negeri.</p> <p>h. Memfasilitasi promosi melalui media elektronik dalam online (<i>E-Smart IKM</i>), katalog dan brosur</p>		

Tabel 4.17

Rencana Aksi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kerajinan Kayu, Rotan dan Bambu), Batako/Batu merah Serta Industri tekstil Tenun dan batik Lokal.

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Kelembagaan							
1.1	Menyelesaikan Perangkat Regulasi dan Kelembagaan RPIK Sigi							
A	Pembentukan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya PERDA RPIK Sigi 	Kemenperin	Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), DPRD, Dinas Perindustrian Perdagangan , OPD terkait	Pelaku Usaha	√		
B	Menjalankan PERDA RPIK Sigi	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya PERDA RPIK Sigi khususnya industri andalan Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman berbahan Kayu, Rotan dan Bambu 	Kemenperin	Bupati, BP4D, DPRD, Dinas Perindustrian Perdagangan , OPD terkait	Pelaku Usaha	√	√	√
C	Peningkatan pelayanan Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya legalitas usaha IKM 	Kemenperin	DPMPSTP, Disperndag	Pelaku Usaha	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
D	Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggara monitoring-data dan evaluasi secara berkala setiap tahun • Tersedianya hasil evaluasi dan perbaikan rencana tindak lanjut pengembangan Industri Aneka Kerajinan Meubel dan Anyaman berbahan Kayu, Rotan dan Bambu 	Kemenperin	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaku Usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
1.2	Memperkuat Kelompok Usaha Bersama							
A	Membentuk dan Mengaktifkan KUB Industri dan penataan kelembagaan serta legalitasnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya kelembagaan KUB aktif 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, KUB, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri							
2.1	Menumbuhkan wirausaha baru Sigi							
A	Mengadakan pelatihan kewirausahaan/ peningkatan motivasi usaha.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
B	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal khususnya Kayu, rotan dan bambo.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal Batako dan Batu merah yang berkualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pembinaan dan penyuluhan (bimbuluh) pemanfaatan sumberdaya lokal tenun dan kain batik yang berkualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru • Tumbuhnya wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	
D	Perbanyak Wirausaha IKM melalui program Santri Preneur	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wirausaha berbasis Santri Preneur 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Pondok Pesentren, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
E	Mengembangkan inkubator bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya calon wirausaha baru 	Kemenperin, Kemenkop &	Dinas Perindustrian dan	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
		<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya wirausaha baru 	UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Swasta Lainnya)			
F	Pemberdayaan masyarakat miskin utk dapat memiliki usaha mandiri khususnya penduduk yang bermukim di wilayah hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya calon wirausaha baru di wilayah hutan lindung Tumbuhnya wirausaha baru dgn memanfaatkan sumberdaya lokal 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.2	Meningkatkan Kompetensi Manajerial							
A	Mengadakan pelatihan manajemen usaha industri Aneka	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan manajemen keuangan/pencatatan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan manajemen produksi Industri aneka	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
D	Mengadakan pelatihan manajemen pemasaran dll	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kompetensi manajerial para pelaku IKM 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.3	Meningkatkan Kompetensi Teknis							
A	Mengadakan pelatihan teknik produksi Industri Aneka	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, Kemetrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan teknik produksi pengolahan kerajinan Rotan dan Bambu	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, kemetrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Mengadakan pelatihan teknik produksi maubel kayu	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, kemetrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			Lembaga terkait.	UKM, PD terkait lainnya.	(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
D	Mengadakan pelatihan teknik produksi Batako dan batumerah serta pavin berkualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, kemetrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
E	Mengadakan pelatihan teknik produksi tenun dan batik berkualitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai besar kerajinan dan batik, kemetrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, OPD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
F	Pemagangan, Studi banding IKM sejenis yang Maju	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kemetrian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			Lembaga terkait.					
G	Pelatihan Tenaga Kerja Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya Kompetensi teknis para pelaku IKM 	Pudiklat Industri kemenperin, Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, PD terkait lainnya	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
G	Fasilitasi perolehan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya Kompetensi teknis para pekerja industri 	Pusdiklat Industri kemenperin, Balai Kementerian Tenaga Kerja, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
2.4	Meningkatkan Kompetensi Kreativitas dan Inovasi							
A	Mengadakan pelatihan dan fasilitasi desain kemasan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Terbinanya tingkat kreatifitas pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.					
B	Mengadakan pelatihan diversifikasi dan inovasi produk tekstil dan aneka.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya tingkat inovasi pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, PD terkait lainnya.	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri IKM							
3.1	Meningkatkan Kemampuan Tekonologi Proses Produksi							
A	Memfasilitasi standarisasi/sertifikasi (SNI, ISO, HAKI) Produk IKM	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya standarisasi dan sertifikasi Produk Aneka. 	Kemeperin, Kemenhum & Ham, Balai Besar Riset dan standarisasi industri, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, LPPOM-MUI, Perusahaan Swasta,	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan dan pendampingan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Kemenhum & Ham,	Dinas Perindustrian dan	Pelaku usaha, LPPOM-MUI,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			Balai Besar Riset dan standarisasi industri, kementerian/ Lembaga terkait.	Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Perusahaan Swasta,			
C	Mengadakan pelatihan peningkatan mutu produk/penerapan	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Kemenhum & Ham, Balai Besar Riset dan standarisasi industri, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha,	√	√	√
D	Mengadakan pelatihan Pembuatan furniture/pengolahan kayu, kerajinan rorancan bambu, batako dan tenun dan membatik dengan kualitas tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi UKM, OPD terkait lainnya.	Pelaku usaha	√	√	√
E	Memfasilitasi magang untuk penguasaan teknologi proses	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya kemampuan teknis pelaku IKM 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil,	Dinas Perindustrian dan	Pelaku usaha, BUMN,	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
	furniture/pengolahan kayu, kerajinan rorancan bambu, batako dan tenun dan membatik dengan kualitas tinggi.		balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
3.2	Meningkatkan Kemampuan Teknologi (Mesin/Peralatan)							
A	Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya mesin/peralatan 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta,	√	√	√
B	Memfasilitasi restrukturisasi mesin	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya restrukturisasi mesin 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha,	√	√	√
C	Kerjasama alih teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya proses transfer/alih teknologi 	Kemeperin, Balai Besar Riset dan standarisasi industri, kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
3.3	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Pengolahan Limbah							

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
A	Memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan limbah industri tekstil dan aneka	<ul style="list-style-type: none"> Terolahnya limbah industri lainnya 	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kemenperin, Kementerian/ lembaga terkait.	BLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BP4D,	Pelaku Usaha	√	√	√
4	Penataan Struktur Industri							
4.1	Pembinaan keterkaitan industri hulu ke hilir							
A	Kerjasama lintas sektoral dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya kerjasama lintas sektor 	Kemenperin, Kementerian Pertanian, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Diskop & UKM dan OPD terkait lainnya	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Intensifikasi (peningkatan (Produktifitas), rejuvenasi (peremajaan), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan melalui program Bersama OPD terkait.	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunya koordinasi OPD terkait 	Kemenperin, Kementerian Pertanian, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Diskop & UKM dan OPD terkait lainnya	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			
C	Memfasilitasi kemitraan, temu usaha, antara industri kecil dan industri Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya kemitraan 	Kemenperin, Kementerian Pertanian, kementerian/	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Diskop & UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			Lembaga terkait.		(UNTAD dan Swasta Lainnya)			
C	Mengadakan kajian pengembangan industri dari hulu ke hilir	<ul style="list-style-type: none"> Tersusunnya kajian pengembangan industri 	Kemenperin, Kementerian Pertanian, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Diskop & UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Pembinaan <i>One Village One Produk (OVOP SIGI) Produk Tekstil dan Aneka</i>	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya industri di masing-masing desa 	Kemenperin, Kementerian Pertanian, kementerian/ lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi & UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
4.2	Pengembangan Sistem Informasi Industri							
A	Pemetaan Potensi Industri Tekstil dan aneka	<ul style="list-style-type: none"> Terpetakannya potensi industri 	Kemenperin, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, Desa	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Pemanfaatan Sistem Informasi Industri	<ul style="list-style-type: none"> Dimanfaatkannya SII 	Kemenperin, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri	<ul style="list-style-type: none"> Terawasinya pelaksanaan pembangunan industri 	Kemenperin, Kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kerjsama perguruan Tinggi	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
5	Sarana Prasarana Industri							
A	Penataan Lokasi sentra IKM yang ada bagi penempatan IKM	<ul style="list-style-type: none"> Tertatanya lokasi sentra IKM Sigi Biromaru 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	BP4D, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√
B	Pembnagunan Infrastruktur di dalam Sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Infrastruktur Dasar (Jalan, Bangunan, jaringan air bersih, Listrik dll) dalam sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta	√	√	√
C	Penyediaan sarana prasarana penunjang sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas	Swasta	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
				Komunikasi dan Informatika				
D	Fasilitasi Bantuan Peralatan IKM Tekstil dan Aneka	<ul style="list-style-type: none"> Adanya bantuan peratalatan usaha industri (IKM) Prioritas 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta	√	√	√
6. Penguatan IKM Sentra								
A	Penyediaan sarana informasi sentra	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana informasi sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,		√	√	√
B	Pembinaan/penguatan kelembagan kelompok usaha di dalam sentra dan diluar sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya pelaku usaha di sentra 	Kemenperin, Kementrian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
C	Koordinasi lintas sektor untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha di sentra dan diluar Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> Terjalannya koordinasi lintas sektor 	Kemenperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
			kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.					
D	Diseminasi teknologi mesin dan tekonologi proses bagi pelaku usaha di sentra dan diluar Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar nya informasi teknologi ke sentra 	Kemeperin, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN, Perusahaan Swasta, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
7	Program Pemasaran IKM							
A	Penguatan branding produk tekstil dan aneka yang prioritas.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk nya Brand Produk 	Kemenperin, Kemendag, Balai riset dan standarisasi industri, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
B	Membuat sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik (Brosur, profil usaha, leaflet, baligho,	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana promosi 	Kemeperin, Balai besar riset dan satndarisasi industri,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
	dokumentasi video, e-catalog, dll)		Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM				
C	Menyelenggarakan pelatihan dan penyusunan pemasaran platform Digital (e-Smart)	<ul style="list-style-type: none"> Berkembangnya pelaku usaha didalam memasarkan produk melalui online 	Kemeperin, Balai besar riset dan satndarisasi industri, Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)	√	√	√
D	Fasiltasi Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran platform Digital (e-Smart)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana yang digunakan oleh pelaku usaha didalam 	Kemeperin, Balai besar riset dan satndarisasi industri,	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Pelaku usaha, PT (UNTAD dan Swasta Lainnya)			

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
		melakukan pemasaran dan promosi usah berbasis daring.	Balai Besar Tekstil, balai industri keramik, balai besar kerajinan dan batik, kemetrian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM				
E	Memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti pameran - pameran di beberapa event	• Terpromosikannya produk IKM	Kemenperin, Kemendag, kementerian/ lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
F	Memfasilitasi penyelenggaraan pameran,	• Terselenggaranya pameran	Kemenperin, Kemendag, kementerian/ lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM	Pelaku usaha, BUMN	√	√	√
G	Menjalin Kerjasama dengan pusat-pusat perdagangan, hotel, restoran diluar kabupaten Sigi khususnya di Kota Palu dan diluar daerah lainnya	• Terjalinnnya kerjasama pemasaran	Kemenperin, Kemendag, kementerian/ lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha, Perusahaan swasta	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
H	Pembuatan/peningkatan fasilitas showroom pemasaran di lokasi-lokasi strategis termasuk di Bandara Sis-Aljufri Palu dan lokasi strategis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya showroom pemasaran 	Kemenperin, Kemendag, kementerian/ lembaga terkait.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha,	√	√	√
7.	Pembiayaan Industri (IKM)							
A	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> Terfasilitasinya pembiayaan usaha 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
B	Mengadakan pelatihan /pendampingan penyusunan proposal kelayakan usaha yang bankable	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya pelatihan 	Kemenperin, Kemenkop & UKM, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√
C	Menjalin kerjasama dengan BUMN/Bank SULTENG/ Swasta dalam pemanfaatan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) bagi pembiayaan usaha industri	<ul style="list-style-type: none"> Terjalinnnya kerjasama 	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, Kemenperin, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√

No	Rencana Aksi	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun		
			Pusat	Daerah	Lainnya	2019-2023	2024-2028	2029-2039
D	Fasiltasi Dungan BUMDEs didalam pembiayaan IKM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Terjalannya kerjasama BUMDes dan IKM 	Kemenkop & UKM, Kemen BUMN, KEMENDES, kementerian/ Lembaga terkait.	Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMD	BUMN, Perusahaan Swasta, Pelaku usaha	√	√	√

4.2.3 Program Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan Pembangunan Kawasan Industri (KI).

Pengembangan WPPI di Kabupaten Sigi disesuaikan dengan rencana pengembangan WPPI Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebagai bagian dari WPPI Palapas. WPPI Palapas di Kabupaten Sigi direncanakan menjadi kawasan industri besar hasil perikanan darat, yang berada di wilayah Kecamatan Lindu.

Adapun peluang rencana pengembangan WPPI Palapas di Kabupaten Sigi didukung oleh:

- a. Dalam koridor ekonomi Sulawesi, Kabupaten Sigi masuk dalam kawasan perhatian investasi potensial untuk kegiatan ekonomi perikanan (perikanan air tawar), sekaligus sebagai simpul kakao. Dalam rencana pengembangan industri perikanan, Kabupaten Sigi ditetapkan sebagai lokasi industri ikan air tawar provinsi yang berada di kawasan Danau Lindu, Kecamatan Lindu.
- b. Dalam Peta Kawasan Perhatian Investasi, Kabupaten Sigi sebagai simpul Kakao. Disamping itu, diharapkan menjadi zona pendukung atau daerah produksi bahan baku (kelapa, perikanan, kakao).
- c. Kecamatan Sigi Biromaru termasuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata “Magaya” untuk sentra industri pengolahan hasil pertanian (industri bawah goreng varietas lembah palu, dan buah naga).
- d. RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Pertanian Berbasis Konservasi Sumberdaya Alam dan Berbudaya”. Selanjutnya dalam RPJMD Kabupaten Sigi (2016-2021):
 - ✓ Pada urusan pertanian: Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan sasaran meningkatnya industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar; tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil produksi hasil pertanian; meningkatnya mutu, efisiensi dan pemasaran hasil produksi pertanian.
 - ✓ Pada urusan industri: Program peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah dengan sasaran Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
 - ✓ Pada urusan kehutanan: Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan dengan sasaran meningkatnya industri hasil hutan yang sesuai dengan aturan.

- e. Dalam RTRWP Sulawesi Tengah tahun 2013-2033, kawasan peruntukan industri kecil menyebar di seluruh kabupaten dan kota.
- f. Di Kabupaten Sigi terdapat industri hasil hutan, kerajinan dan bahan bangunan sebanyak 227 buah; industri hasil logam dan aneka sebanyak 122 buah; dan industri hasil pertanian sebanyak 235 buah. Industri tersebut menyebar di seluruh kecamatan, namun jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sigi Biromaru, Marawola, Palolo, Gumbasa dan Marawola Barat (BPS Sigi, 2017).
- g. Terdapat sebanyak dua UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang berorientasi pada produksi hasil hutan yang akan menjadi penyuplai utama bahan baku kayu, rotan, getah pinus, bambu, gula aren, dan kemiri, yaitu KPH Kulawi, dan KPH Dolago Tanggunung.
- h. Tersedia infrastruktur (eksisting dan rencana) untuk mendukung kegiatan investasi di kawasan perhatian investasi yaitu *jalan, pelabuhan, bandara, energi, dan sumber air*.
 - 1) Rencana pengembangan jaringan jalan terdiri atas:
 - a) Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 terdiri atas: Ruas jalan Kalukubula – Kalawara; ruas jalan Kalawara – Kulawi; ruas jalan Biromaru/Birobuli – Palolo; ruas jalan Kulawi – Gimpu; ruas jalan Palupi – Bangga; ruas jalan Bangga – Simoro; dan ruas jalan Palolo – Napu.
 - b) Jaringan Jalan Kolektor Primer K3 terdiri atas: Ruas jalan ruas jalan Kalukubula–Kalawara; ruas jalan Kalawara–Kulawi; ruas jalan Biromaru/ Birobuli – Palolo; ruas jalan Kulawi – Gimpu; ruas jalan Palupi – Bangga; ruas jalan Bangga – Simoro; ruas jalan Palopo – Napu; ruas jalan Bangga – Lalundu.
 - c) Jaringan Jalan Kolektor Primer K4 terdiri atas: Ruas jalan Palupi – Simoro; ruas jalan Bobo – Deasi; ruas jalan Bulu Bete – Rogo; ruas jalan Sambo – Bungi; ruas jalan Bonemenggila – Jono; ruas jalan dalam Kota Baliase; ruas jalan dalam Kota Sibalaya; ruas jalan Saluki – Sisiatuwa; ruas jalan Simoro – Perkebunan; ruas jalan Simoro I – Perkebunan; ruas jalan dalam Kota Pakuli; ruas jalan Raupa – Toro; ruas jalan Kulawi – Banggaiba; ruas jalan dalam Kota Kulawi; ruas jalan Watukilo – Salutome; ruas jalan dalam Kota Lawua; ruas jalan Gimpu – Paena; ruas jalan dalam Kota Paena; ruas jalan SP. Jl. Provinsi – Kamarora; ruas jalan Sintuwu – Rahmat; ruas jalan Lendaka – Ampera; ruas jalan Ampera – Rejeki; ruas jalan Ranteleda – Rahmat; ruas jalan Makmur – Pasar Makmur; ruas jalan Rahmat – Kamarora; ruas jalan Ranteleda – Tanah Harapan; ruas jalan Rahmat – Kapiroe; ruas jalan dalam Kota Makmur; ruas jalan Biromaru – Paneki; ruas jalan Maranata –

Bora; ruas jalan Kalora – SB, Bora; ruas jalan SP. Lolu – Jono; ruas jalan Lolu – Kalukubula; ruas jalan Lolu – Pombewe; ruas jalan SP.Jl.HPH Kebun Sari–Kinta Baru; ruas jalan SP. Sidera I – Boya Bunga; ruas jalan SP Maranata – Tanam Pobunti; ruas jalan SP. Lompio – Lompio; ruas jalan Sidondo – Tandau; ruas jalan Sidondo – Irigasi; ruas jalan SP. Paneki – Pombewe; ruas jalan Kinta baru – Pasantren; ruas jalan Sidondo I – Deasi; ruas jalan Sidera – Permukiman Trans; ruas jalan SP. Sidera PKMT – Lolu; ruas jalan Loru – Ngata Baru; ruas jalan SP. Jl. Provinsi – Lompio; ruas jalan dalam Kota Biromaru; ruas jalan Tinggede – Kasiromu; ruas jalan Binangga – Sunju; ruas jalan kalukubula – sunju; ruas jalan Porame – Uwemanje; ruas jalan Tinggede – Baliase; ruas jalan Padende – Binangga; ruas jalan Boya Baliase – Porame; ruas jalan Beka – Dolo; ruas jalan Bomba – Lebanu; ruas jalan Doda – Daenggune; ruas jalan Balaroa – Daenggune; ruas jalan Donggala Kodi – Kanuna; ruas jalan Dalam Kota Binangga; ruas jalan Dolo – Sidera; ruas jalan Dolo – Jono; ruas jalan Maku – SP. Maranata; ruas jalan Maku – Kaleke; ruas jalan SP. Dolo – SP. Sidera II; ruas jalan Pesaku – Mantikole; ruas jalan Rarampande – Wera; ruas jalan Pewunu – Kabelota (Pasantren); ruas jalan SP. Pewunu – Kalukutinggi; ruas jalan Kabobona – Dusun III; ruas jalan Kaleke – Wera; ruas jalan Pesaku I – Persawahan; ruas jalan Kota Rindau – BTN; ruas jalan Dalam Kota Dolo; ruas jalan lembah Tongoa – Manggalapi; dan ruas jalan Manggalapi – Sausu.

Selanjutnya rencana peningkatan jalan lokal primer terdiri atas: (1). ruas Dombu – Tinggede – Dolo – Sidera – Bora; dan (2). ruas jalan Gimpu – Peana – Kalamanta. (3). ruas jalan Gimpu–Marato–Kalamanta.

- 2) Pembangkit tenaga listrik terdiri atas:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kulawi;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Danau Lindu Kecamatan Lindu, Sungai Morowo Kecamatan Kulawi Selatan, Sungai Lariang Kecamatan Pipikoro.
- 3) Sistem jaringan telekomunikasi dengan sistem jaringan kabel terdiri atas: Sistem jaringan mikro digital terdapat di Kota Palu – Batas Provinsi Barat (Kabupaten Sigi). Sistem jaringan nirkabel berupa BTS terdapat di Pipikoro, Kulawi Selatan, Kulawi, Lindu, Nokilalaki, Gumbasa, Dolo Selatan, Tanambulava, Dolo Barat, Marawola Barat, Marawola, Kinovaro, Dolo, Sigi Biromaru, Palolo.
- 4) Sistem jaringan sumberdaya air dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan irigasi terdiri atas: Wilayah sungai

nasional terdiri atas : WS Palu – Lariang yang merupakan WS lintas provinsi, dan WS Palu – Palolo yang merupakan WS Strategi Nasional. Daerah irigasi terdiri atas Gumbasa, Kekeloe, Maenusi, Wuno, Ngata Baru, Paneki, Gimpu, Tongoa, Pakuli, Bangga, Saluri, Baluase, Rogo, Sambo, Wera Dan Bomba. Prasarana air baku untuk air bersih terdiri atas Sungai Gumbasa, Danau Lindu, dan Sungai Lariang.

- 5) Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) diberikan kepada Pemerintah Provinsi sedangkan penerbitan IUI menengah dan kecil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten Sigi periode tahun 2019-2039 disajikan pada Tabel 4.18 berikut.

Tabel 4.18.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kabupaten Sigi
Periode Tahun 2019-2039

No.	Program	Tahun		
		2019-2023	2023-2038	
A.	Pengembangan KPI			
	KPI Menengah:			
1	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Aneka Industri (industri logam, mesin, elektronika), furniture, pengolahan hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil ternak serta hasil ikan; biogas; makanan/minuman di Kecamatan Sigi Biromaru 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, di Kecamatan Marawola 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan di Kecamatan Gumbasa 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan di Kecamatan Palolo 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
2	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Dolo Barat: • Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Dolo Selatan: • Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Palolo: • Pengembangan klaster industri furniture, perbengkelan, percetakan, batako dan batu bata, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, makanan / minuman.. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Nokilalaki: • Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, makanan/minuman, furniture/kerajinan dari kayu dan rotan. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gumbasa: • Pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, serta makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tanambulava: • Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan dari hasil hutan dan logam. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Marawola: 			

No.	Program	Tahun	
		2019-2023	2023-2038
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan klaster industri furniture, perbengkelan, percetakan, batako dan batu bata, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, makanan / minuman.. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Marawola Barat: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kinovaro: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulawi: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kulawi Selatan: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil hutan, kerajinan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/ minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Lindu: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan darat, industri makanan hasil ikan. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pipikoro: 		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan pertanian, kerajinan dari hasil kayu dan rotan, makanan/ minuman. 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
B.	Pembangunan KI		
	Kecamatan Sigi Biromaru :		
1	<ul style="list-style-type: none"> Sentra Aneka Industri dan IKM (hasil pertanian, hasil hutan dan hasil peternakan) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Palolo:		
2	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IKM (hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Marawola:		
3	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IKM (hasil hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Gumbasa:		
4	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IKM (hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Kulawi:		
5	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian dan hasil hutan) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Dolo:		
6	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian dan perikanan darat) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Dolo Barat:		
7	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Dolo Selatan:		
8	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian dan hasil ternak) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Marawola Barat:		
9	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian dan kehutanan) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Kinovaro:		
10	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Nokilalaki:		
11	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian dan kehutanan) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Lindu:		
12	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil perikanan darat) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
	Kecamatan Kulawi Selatan:		
13	<ul style="list-style-type: none"> Sentra IK (hasil pertanian) 	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi

No.	Program	Tahun	
		2019-2023	2023-2038
14	Kecamatan Tanambulava:		
	• Sentra IK (hasil pertanian)	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi
15	Kecamatan Pipikoro:		
	• Sentra IK (hasil pertanian dan kehutanan)	Studi Kelayakan dan Master Plan	Pemantapan Zonasi

Sumber: RPIP Provinsi Sulteng, 2017; RTRW Kabupaten Sigi tahun 2013; RPJMD Sigi tahun 2006, diolah kembali tahun 2018.

Pengembangan IKM pada tabel di atas meliputi: (a). Industri pengolahan hasil pertanian meliputi industri pengolahan kakao menjadi coklat bubuk, pasta, liquor, kue, industri makanan dari coklat dan kembang gula; industri gula semut/gula cetak dan gula cair/syrup dari nira aren/kelapa; industri pengolahan buah menjadi minuman; industri pengolahan tepung dari hasil padi dan sagu; industri bawang goreng varietas lembah palu serta sayur-sayuran organic; industri pengolahan minyak atsiri dari nilam, sereh wangi, akar wangi, dll.; (b). Industri pengolahan hasil perikanan darat melalui industri pengolahan ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku, ikan kaleng, tepung ikan dan produk makanan olahan lainnya; (c). Industri pengolahan hasil hutan (penggajian kayu, furniture, getah damar, rotan, kayu bambu/rebung bambu, getah pinus serta madu lebah); (d). Industri pengolahan hasil ternak (sapi, domba dan unggas); (e). industri kerajinan dari bahan logam; (f). Industri pengolahan air minum dalam kemasan (AMDK).

Pada rencana pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sesuai RPJMD Sigi 2006-2021 sangat terkait dengan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, permukiman, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pengembangan pertanian pangan diarahkan pada pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan Sentra produksi pangan (agropolitan) bisa terdiri atas:

- a. Kawasan lahan pertanian (*hinterland*): Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan hinterland berupa Kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan Kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
- b. Kawasan pemukiman: Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan)
- c. Kawasan pengolahan dan industri: Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan.

Di kawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian/kehutanan/perikanan/peternakan menjadi produk jadi.

- d. Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
- e. Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya, misalnya; kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservasi alam.

Strategi pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), melalui pengembangan masyarakat yang tidak saja diarahkan pada upaya pengembangan usaha budidaya (*on-farm*) tetapi juga meliputi pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian) dan agribisnis hilir (proses dan pemasaran) dan jasa-jasa pendukungnya.

Adapun peruntukan kawasan terkait dengan rencana pengembangan industri di Kabupaten Sigi diuraikan seperti berikut:

➤ **Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Sigi dengan komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

Kakao, terdapat di seluruh kecamatan.

Cengkeh, terdapat di Kecamatan Palolo, Kulawi dan Kulawi Selatan.

Kelapa, terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Pipikoro.

Nilam, Sereh wangi, Akar wangi terdapat di seluruh kecamatan.

Sagu, terdapat di Kecamatan Gumbasa dan Tanambulava.

Aren, terdapat di seluruh Kecamatan.

Bambu, terdapat di seluruh Kecamatan.

➤ **Kawasan Peruntukan Peternakan**

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura. Adapun komoditas peternakan yang cukup dominan di Kabupaten Sigi adalah seperti:

Ternak besar berupa: **Sapi**, terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru dan Dolo Selatan serta Palolo.

Ternak sedang berupa: **Babi**, terdapat di Kecamatan Kulawi, Pipikoro, dan Marawola Barat; **Kambing/Domba**, terdapat di Kecamatan Sigi Biromaru dan Marawola.

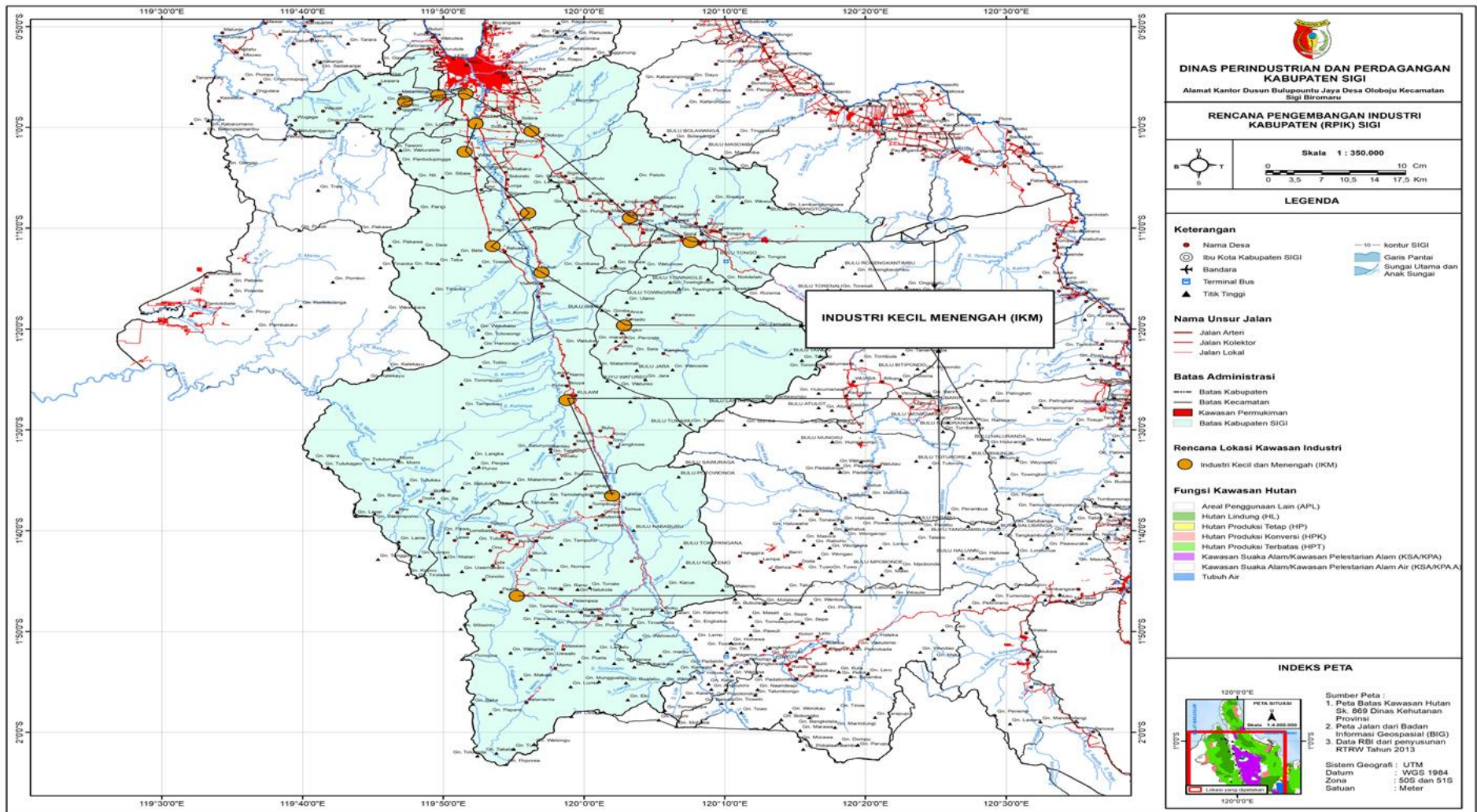
Unggas berupa: **Ayam kampung dan ayam ras**, dan **Itik**, terdapat di seluruh kecamatan.

➤ **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan darat terdiri atas:

- ✓ **Perikanan budidaya (kolam/empang/sawah):** Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Sigi terdapat di Kecamatan Dolo dan Sigi Biromaru.
- ✓ **Kawasan perikanan budidaya (danau) dan pengolahan hasil perikanan darat** terdapat di Kecamatan Lindu.

Adapun lokasi rencana KPI Kabupaten Sigi disajikan pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3. Lokasi KPI Kabupaten Sigi

Rencana pembangunan kawasan peruntukan industri untuk IKM di Kabupaten Sigi periode 2019-2039 tersebar pada setiap wilayah kecamatan sesuai dengan RTRW, RPJPD dan RPJMD Kabupaten, FGD dan hasil survei lapangan tahun 2018. Untuk jelasnya diuraikan seperti berikut:

a. Kecamatan Sigi Biromaru

Kawasan Industri di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi meliputi Aneka Industri, Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di wilayah Desa Sidera. Pada Gambar 4.4 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Sigi Biromaru.

Pada Gambar 4.4 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan Aneka Industri dan IKM di Kecamatan Sigi Biromaru mencapai luas 50,51 ha. Adapun informasi lokasi IKM, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.19.
Lokasi IKM Kecamatan Sigi Biromaru

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Titik Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Sidera	P1	119°56'16,69" BT; 01°00'50,33"LS	Aneka Industri	50,51
		P2	119°56'22,51" BT; 01°00'26,14"LS		
		P3	119°56'07,78" BT; 01°00'14,76"LS		
		P4	119°56'50,99" BT; 01°00'19,27"LS		

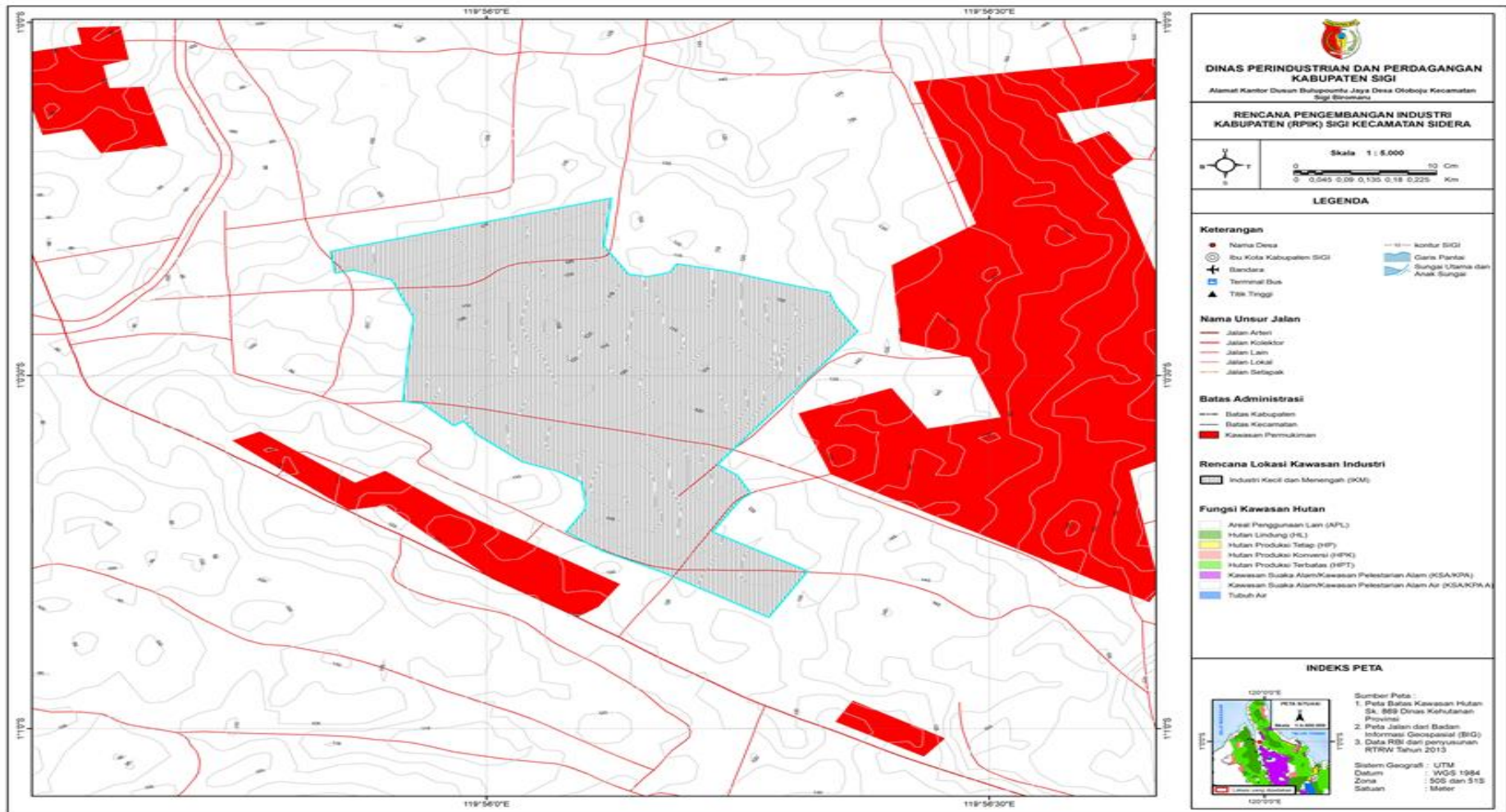
Adapun jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi Aneka industri dan IKM serta sekitarnya Kecamatan Sigi Biromaru berupa: Padang rumput, pertanian dan permukiman. Kawasan Aneka industri dan IKM ini cukup strategis lokasinya karena berada di kawasan RPKP Sigi, terdapat jalur transportasi darat. Lokasi ini berada pada ketinggian 100-175 m.dpl.

Lokasi Aneka industri (Industri Menengah) Kecamatan Sigi Biromaru direncanakan pengembangan sentra aneka industri (industri logam, mesin, elektronika), furnitur, pengolahan hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil ternak serta hasil ikan; biogas; makanan/minuman di Kecamatan Sigi Biromaru. Selain itu, juga direncanakan industri kecil dalam pengembangan klaster industri furnitur, perbengkelan, percetakan, batako dan batu bata, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, makanan / minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Sigi Biromaru yang berlokasi di Desa Sidera didukung oleh keberadaan industri hasil

hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 69 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 19 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 29 buah.

Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 3.240 ha; perkebunan kelapa seluas 502,5 ha; perkebunan kakao seluas 510 ha; dan keberadaan UPT KPH Kulawi dan UPT KPH Dolago Tanggunung yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, bambu, dan getah pinus). Rencana pembangunan kawasan IKM di Kecamatan Sigi Biromaru juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat dan udara, PLN dan PDAM.



Gambar 4.4. Lokasi KPI Kecamatan Sigi Biromaru

b. Kecamatan Palolo

Kawasan Industri di Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Makmur Kecamatan Palolo. Pada Gambar 4.5 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Palolo.

Pada Gambar 4.5 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IKM di Kecamatan Palolo terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 20,18 ha. Adapun informasi lokasi IKM, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

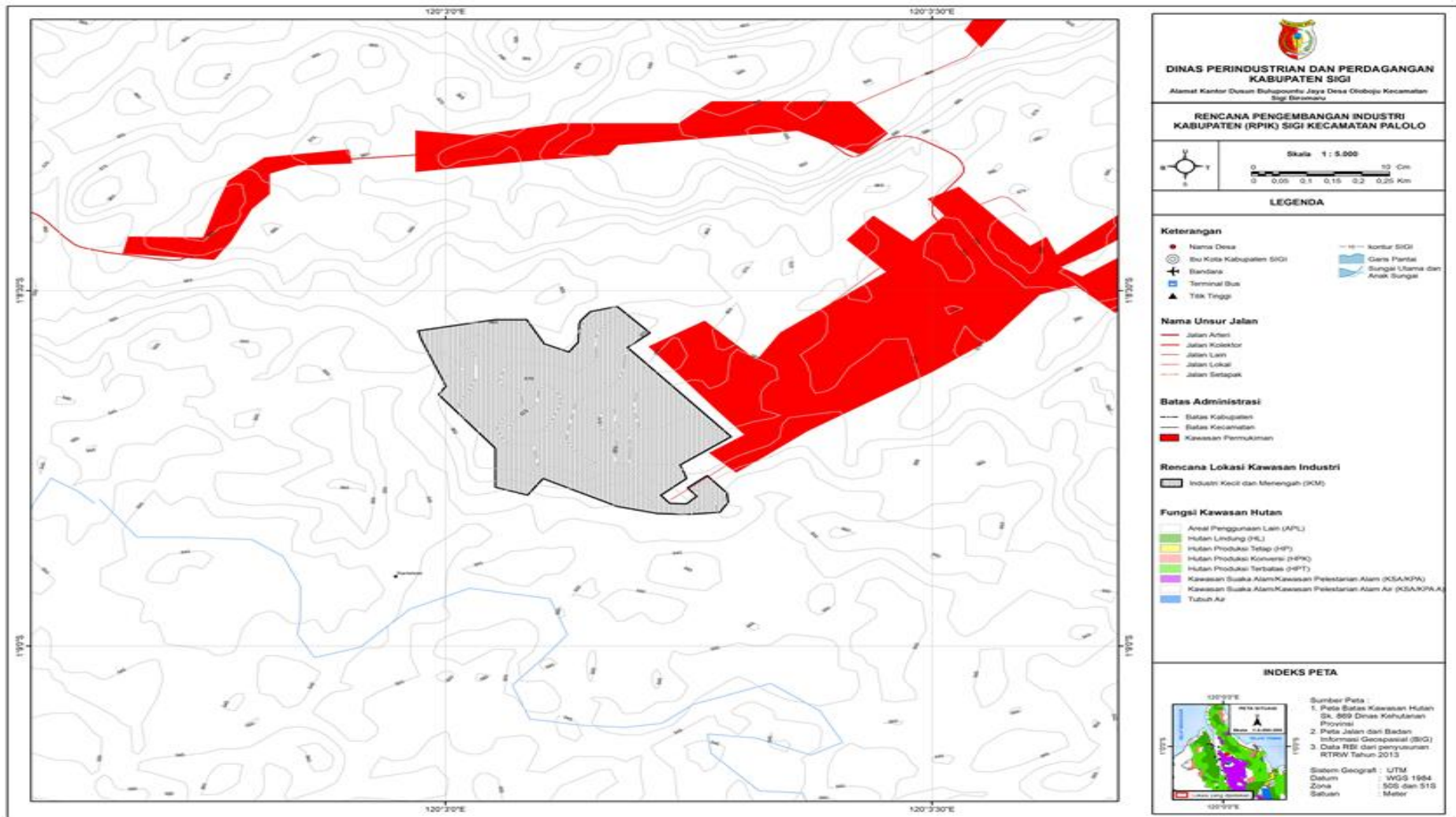
Tabel 4.20.
Lokasi IKM Kecamatan Palolo

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Makmur	P1	120°03'12,36" BT; 01°08'33,48"LS	IKM	20,18
		P2	120°03'13,55" BT; 01°08'48,05"LS		
		P3	120°02'57,95" BT; 01°08'33,23"LS		
		P4	120°03'04,73" BT; 01°08'47,27"LS		

Adapun jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IKM dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Palolo berupa: Lokasi persawahan, perkebunan rakyat, permukiman, dan jalan raya. Lokasi IKM ini berada pada ketinggian 500-600 m.dpl.

Lokasi IKM Kecamatan Palolo direncanakan sentra industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan di Kecamatan Palolo untuk industri menengah, dan untuk industri kecil yaitu pengembangan klaster industri furnitur, perbengkelan, percetakan, batako dan batu bata, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, makanan / minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Palolo di Desa Makmur didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 26 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 9 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 36 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 2.960 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 10.752,8 ha, kelapa 197 ha, kopi seluas 168 ha); dan keberadaan UPT KPH Dolago Tanggunung yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, bambu, kemiri dan getah damar). Rencana pembangunan kawasan IKM di Kecamatan Palolo juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.5. Lokasi KPI Kecamatan Palolo

c. Kecamatan Nokilalaki

Kawasan Industri di Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Kadidia dan Kamarora A. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta dilintasi jalur transportasi darat. Pada Gambar 4.6 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nokilalaki.

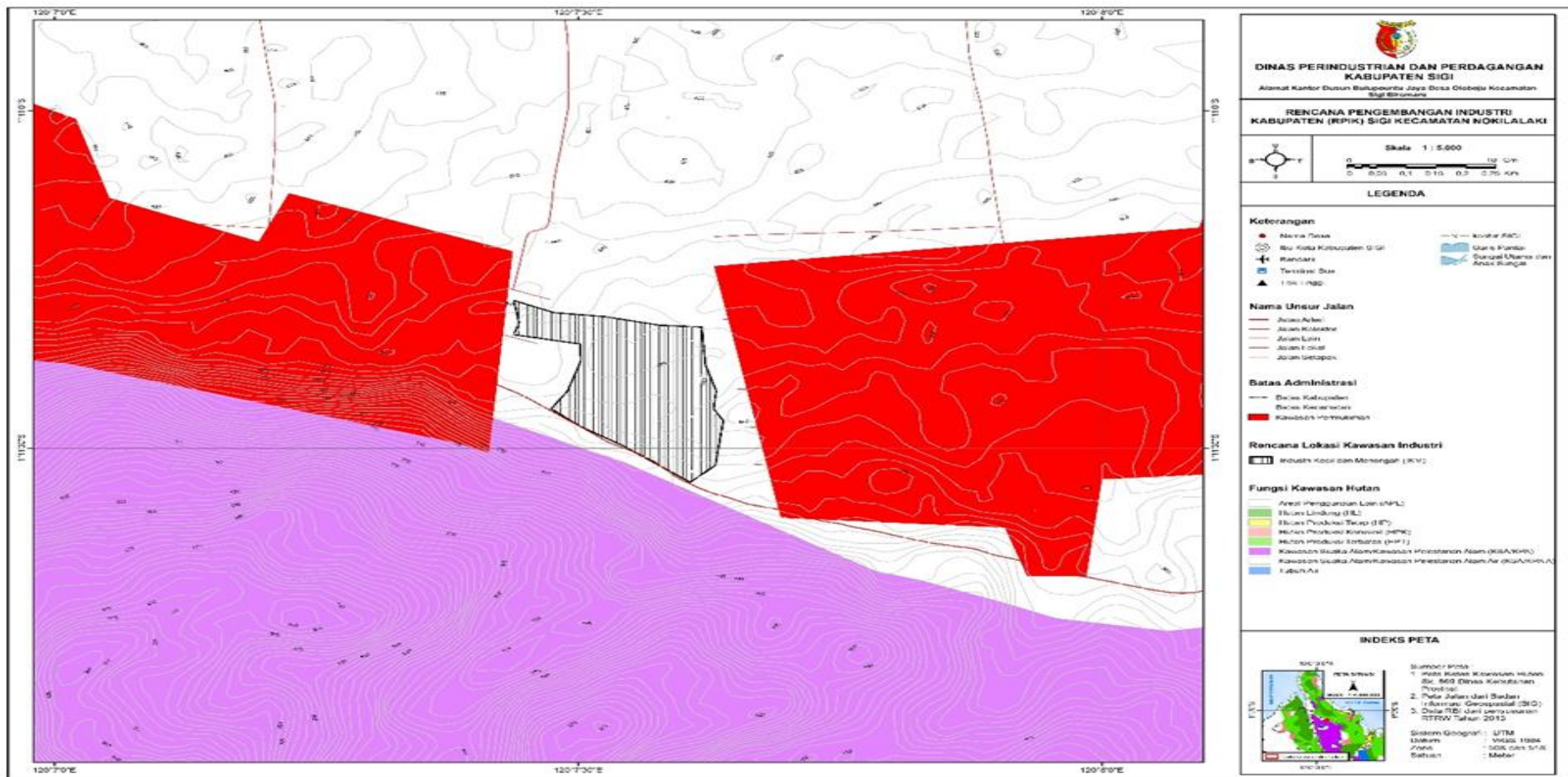
Pada Gambar 4.6 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Nokilalaki terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 10,00 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.21.
Lokasi IK Kecamatan Nokilalaki

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Kadidia dan Kamarora A	P1	120°07'36,58" BT; 01°11'32,94"LS	IK	10,00
		P2	120°07'28,74" BT; 01°11'26,65"LS		
		P3	120°07'37,22" BT; 01°11'19,15"LS		
		P4	120°07'26,57" BT; 01°11'17,01"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Nokilalaki berupa: Lokasi permukiman dan jalan raya, pertanian lahan kering, hutan, semak belukar. Lokasi IK ini berada pada ketinggian 600-700 m.dpl. Pada Gambar di atas disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Nokilalaki. Lokasi IK Kecamatan Nokilalaki direncanakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, makanan/minuman, furnitur/kerajinan dari kayu dan rotan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Nokilalaki di Desa Kadidia dan Kamarora A didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 6 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 4 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 10 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 616 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 1.587,30 ha; kopi 10,50 ha; kelapa seluas 1,30 ha; dan keberadaan UPT KPH Dolago Tanggunung yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Nokilalaki juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.6 Lokasi KPI Kecamatan Nokilalaki

d. Kecamatan Dolo

Kawasan Industri di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Kotapulu. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta dilitansi jalur transportasi darat Palu-Kulawi. Pada Gambar 4.7 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Dolo.

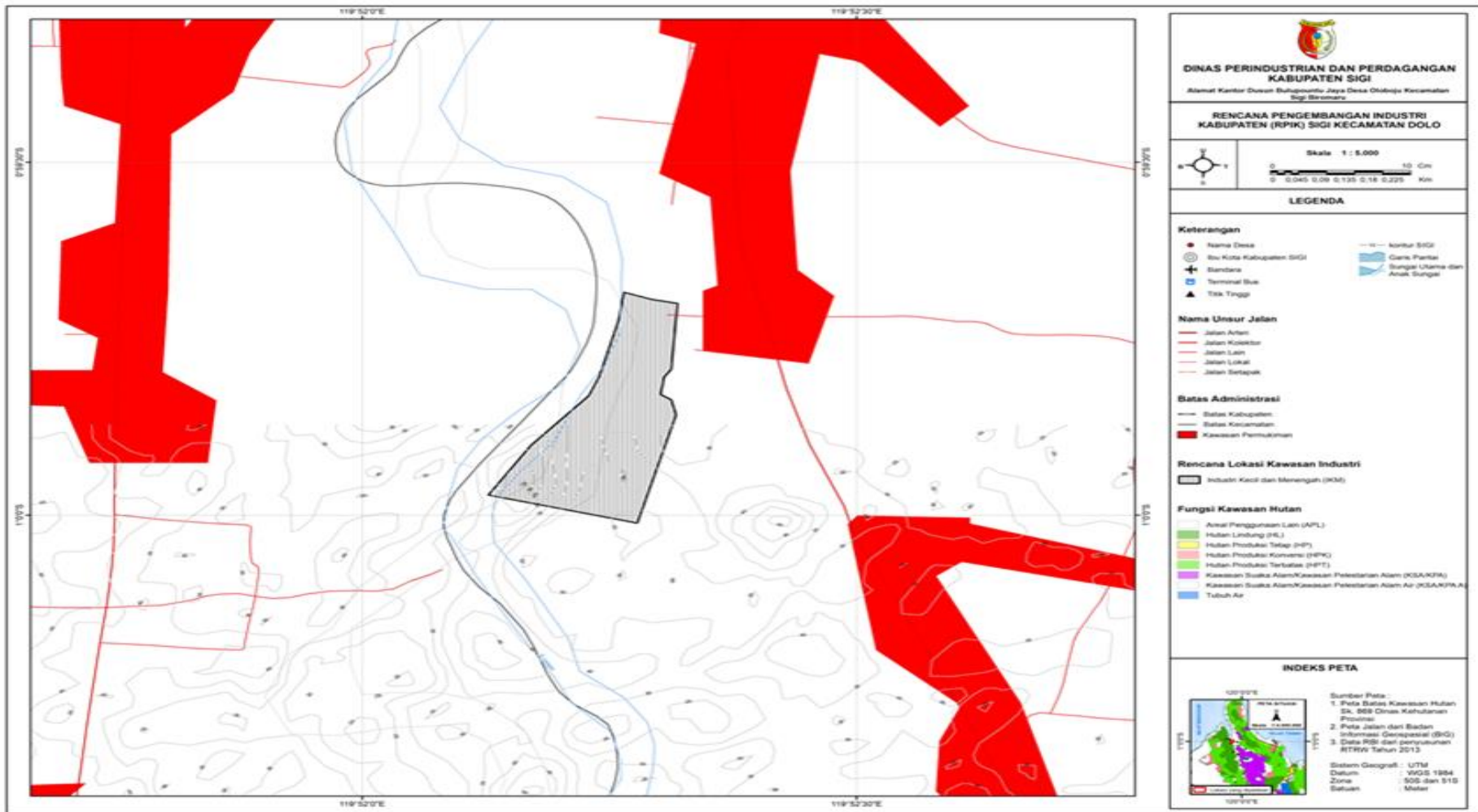
Pada Gambar 4.7 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Dolo terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 10,59 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.22
Lokasi IK Kecamatan Dolo

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Kotapulu	P1	119°52'18,94" BT; 00°59'41,82"LS	IK	10,59
		P2	119°52'15,77" BT; 00°59'40,96"LS		
		P3	119°52'06,78" BT; 01°59'57,96"LS		
		P4	119°52'16,59" BT; 01°00'00,49"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Dolo berupa: Lokasi perkebunan rakyat, permukiman, lahan semak belukar, dan jalan raya. Lokasi ini berada pada ketinggian 50-100 m.dpl. Di lokasi IK Kecamatan Dolo direncanakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam serta hasil ikan, batako dan batu bata, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Dolo di Desa Kotapulu didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 8 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 15 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 10 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 1.720 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 323 ha, kelapa seluas 652 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Dolo juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.7 Lokasi KPI Kecamatan Dolo

e. Kecamatan Dolo Barat

Kawasan Industri di Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Kalukutinggu. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta dilintasi jalur transportasi darat. Pada Gambar 4.8 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Dolo Barat, tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dengan luas seluruhnya 10,62 ha.

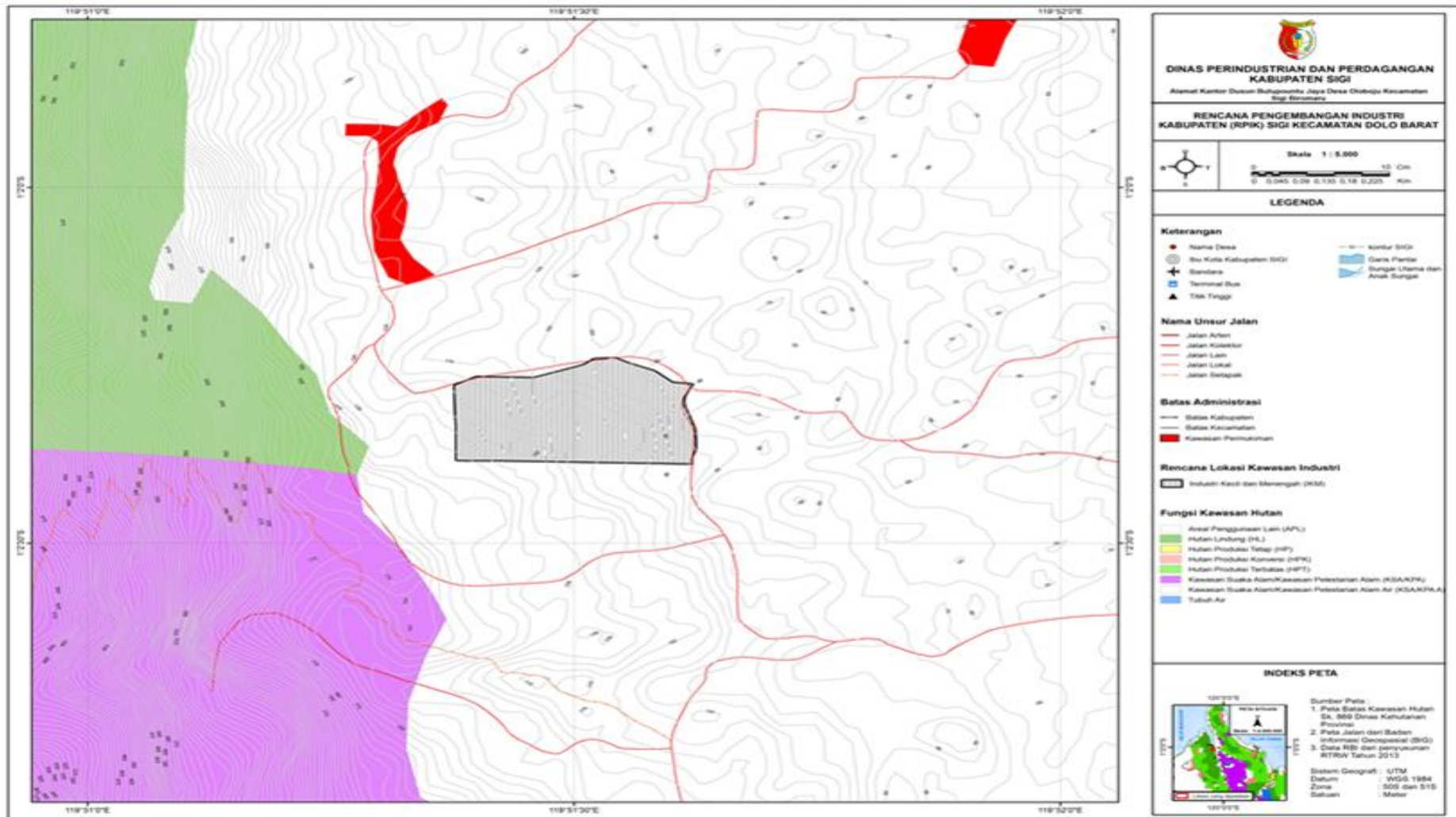
Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.23
Lokasi IK Kecamatan Dolo Barat

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Kalukutinggu	P1	119°51'37,05" BT; 01°02'22,85"LS	IK	10,62
		P2	119°51'22,53" BT; 01°02'22,57"LS		
		P3	119°51'22,51" BT; 01°02'16,19"LS		
		P4	119°51'37,23" BT; 01°02'16,15"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Dolo Barat berupa: Lokasi permukiman, lahan terbuka, dan jalan raya. Lokasi ini berada pada ketinggian 100-200 m.dpl. Lokasi IK Desa Kalukutinggu Kecamatan Dolo Barat direncanakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Dolo Barat di Desa Kalukutinggu didukung oleh keberadaan industri industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 4 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 14 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 13 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 1.165 ha, perkebunan rakyat (kakao seluas 445,50 ha; kelapa seluas 703,50 ha;); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Dolo Barat juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.8 Lokasi KPI Kecamatan Dolo Barat

f. Kecamatan Dolo Selatan

Kawasan Industri di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Baluase. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Bangga. Pada Gambar 4.9 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Dolo Selatan.

Pada Gambar 4.9 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 25,61 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.24
Lokasi IK Kecamatan Dolo Selatan

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Baluase	P1	119°53'27,48" BT; 01°11'32,78"LS	IKM	25,61
		P2	119°53'31,01" BT; 01°11'05,97"LS		
		P3	119°53'26,95" BT; 01°11'06,51"LS		
		P4	119°53'11,31" BT; 01°11'37,49"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Baluase dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Dolo Selatan berupa: Lokasi perkebunan rakyat, permukiman, semak belukar/lahan terlantar. Lokasi ini berada pada ketinggian 100-200 m.dpl. Di lokasi IK Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan direncanakan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Dolo Selatan di Desa Baluase didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 9 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 9 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 7 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 1.100 ha, perkebunan rakyat (kakao seluas 1.587 ha, kelapa seluas 2.382 ha; kopi seluas 26,50 ha; dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Dolo Selatan juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.9. Lokasi KPI Kecamatan Dolo Selatan

g. Kecamatan Marawola

Kawasan Industri di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Sibedi. Kawasan IKM ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Bangga. Pada Gambar 4.10 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Marawola.

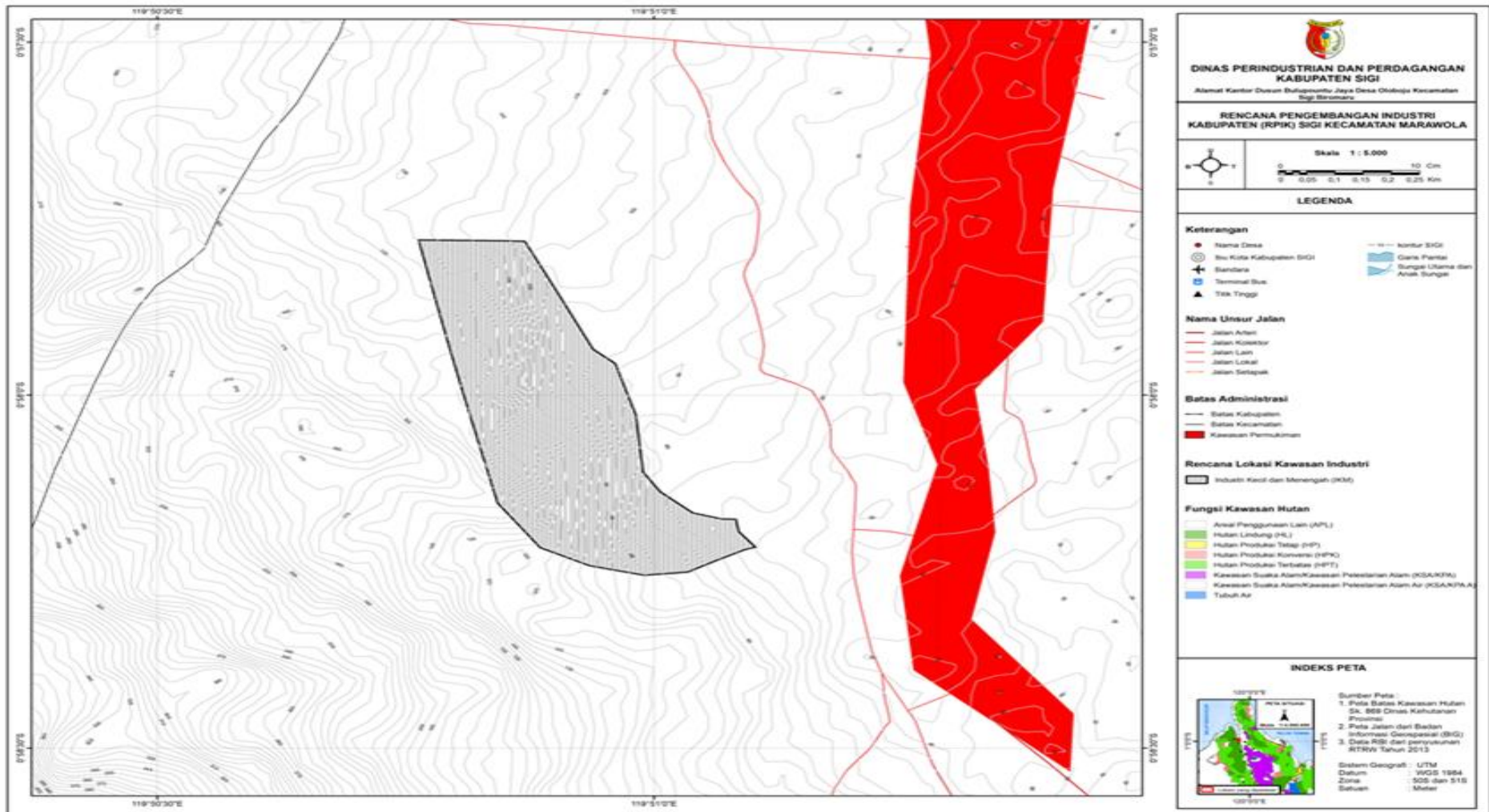
Pada Gambar 4.10 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IKM Desa Binangga dan Padende Kecamatan Marawola terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 25,11 ha. Adapun informasi lokasi IKM, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.25
Lokasi IKM Kecamatan Marawola

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi	Jenis Industri	Luas (Ha)	
1	Sibedi	P1	119°51'04,66" BT; 00°58'10,21"LS	IKM	25,11
		P2	119°50'51,99" BT; 00°57'46,57"LS		
		P3	119°50'52,74" BT; 00°58'12,61"LS		
		P4	119°50'45,68" BT; 00°57'46,50"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IKM Desa Binangga dan Padende di wilayah Kecamatan Marawola berupa: Lokasi permukiman, semak belukar, dan lahan terbuka (rerumputan). Lokasi ini berada pada ketinggian 75-125 m.dpl. Di lokasi IKM Desa Sibedi Kecamatan Marawola direncanakan sentra industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. Di lokasi IKM ini juga direncanakan pengembangan klaster industri furnitur, perbengkelan, percetakan, batako dan batu bata, kerajinan tangan dari hasil hutan dan logam, makanan / minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marawola di Desa Sibedi didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 41 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 9 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 25 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 965 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 27,90 ha, kelapa seluas 232,90 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, bambu). Rencana pembangunan kawasan IKM di Kecamatan Marawola juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, PLN dan PDAM.



Gambar 4.10. Lokasi KPI Kecamatan Marawola

h. Kecamatan Kinovaro

Kawasan Industri di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Balane. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Dombu. Pada Gambar 4.11 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Kinovaro.

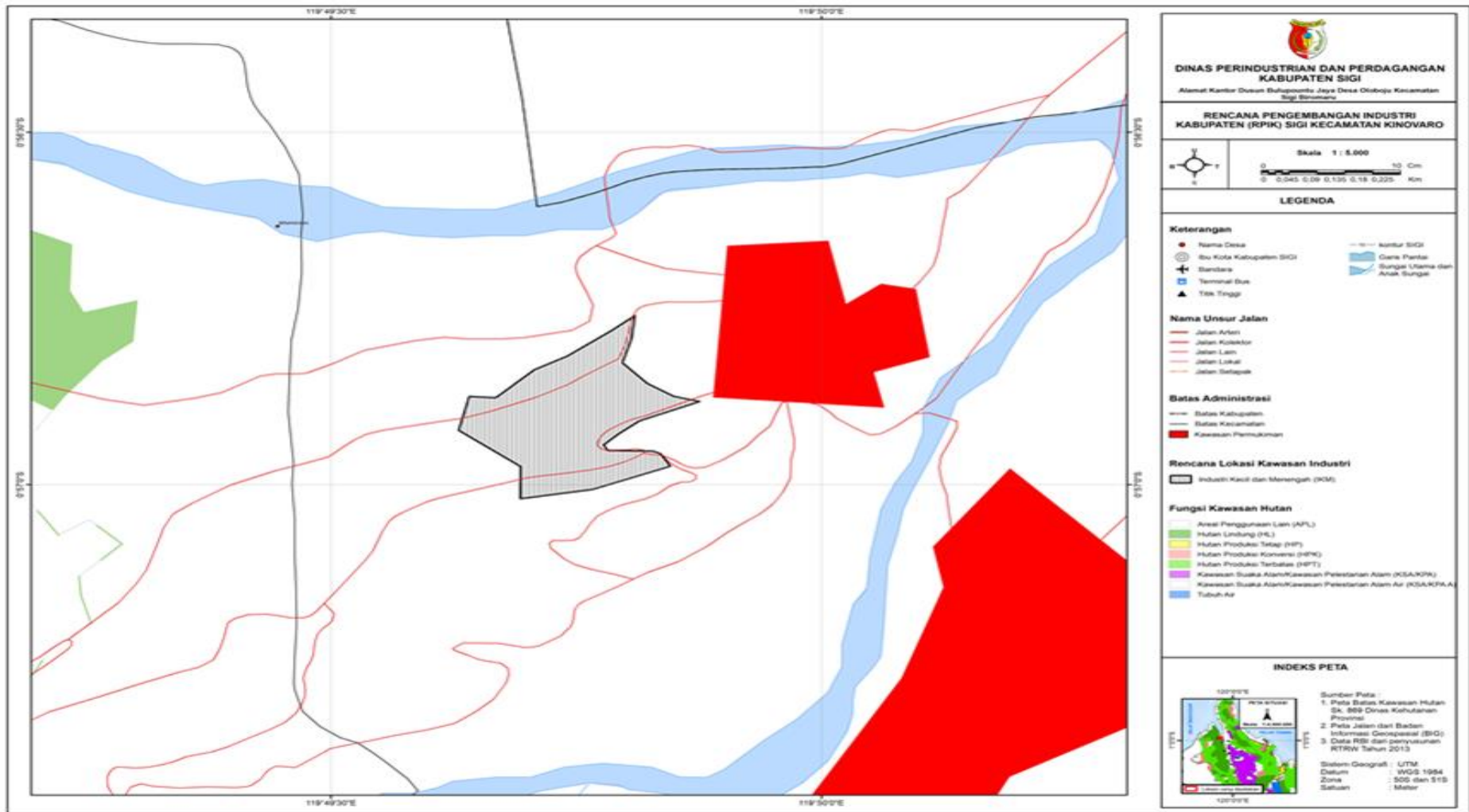
Pada Gambar 4.11 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Balane Kecamatan Kinovaro terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 10,10 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.26
Lokasi IK Kecamatan Kinovaro

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Balane	P1	119°49'48,35" BT; 00°56'45,30"LS	IK	10,10
		P2	119°49'52,47" BT; 00°56'52,54"LS		
		P3	119°49'41,58" BT; 00°57'00,68"LS		
		P4	119°49'38,33" BT; 00°56'52,07"LS		

Adapun jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Balane dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Kinovaro berupa: Lokasi lahan terbuka, dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 200-300 m.dpl. Disamping itu, di wilayah Desa Balane terdapat jaringan telekomunikasi, listrik PLN, dan sumber air bersih. Di lokasi IK Desa Balane Kecamatan Kinovaro direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/ minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Kinovaro di Desa Balane didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 6 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 4 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 6 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 556 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 38,50 ha; kelapa seluas 47,70 ha; kopi seluas 0,30 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan dan getah pinus). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Kinovaro juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, Listrik PLN dan sumber air bersih.



Gambar 4.11. Lokasi KPI Kecamatan Kinovaro

i. Kecamatan Marawola Barat

Kawasan Industri di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Dombu. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalan transportasi darat Palu-Dombu. Pada Gambar 4.12 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Marawola Barat.

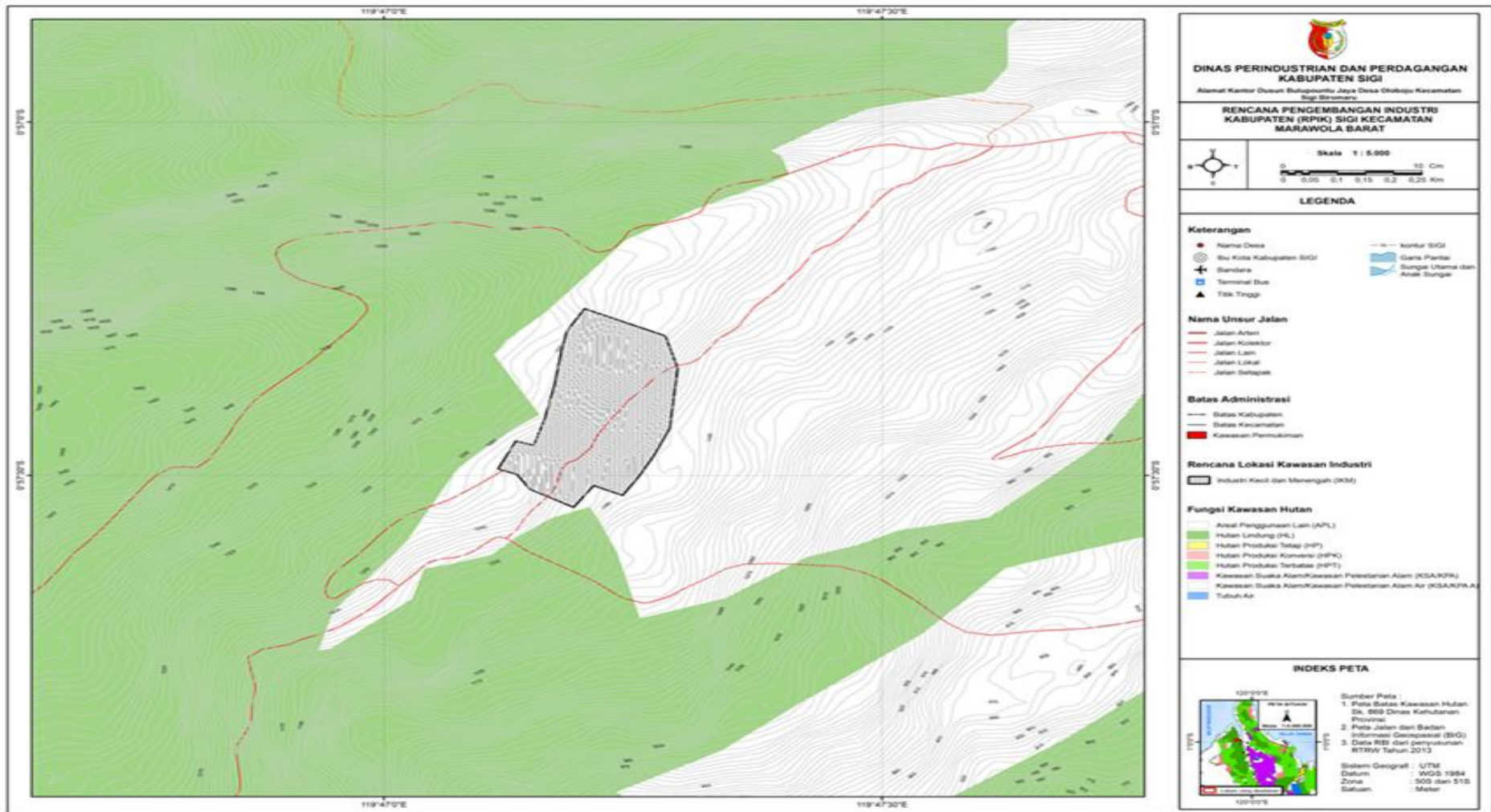
Pada Gambar 4.12 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Dombu Kecamatan Marawola Barat terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 10,26 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.27
Lokasi IK Kecamatan Marawola Barat

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Dombu	P1	119°47'12,18" BT; 00°57'16,05"LS	IK	10,26
		P2	119°47'17,07" BT; 00°57'18,32"LS		
		P3	119°47'11,46" BT; 00°57'32,67"LS		
		P4	119°47'06,96" BT; 00°57'29,49"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Dombu dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Marawola Barat berupa: Lokasi permukiman, hutan, ladang, lahan terbuka, dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 1.200-1.300 m.dpl. Di lokasi IK Desa Dombu Kecamatan Marawola Barat direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Marawola Barat di Desa Dombu didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 9 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 13 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 25 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Perkebunan rakyat (kakao seluas 85,60 ha, kelapa seluas 2,50 ha; kopi seluas 21,80 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan bambu dan getah damar). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Marawola Barat juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik dan sumber air bersih.



Gambar 4.12. Lokasi KPI Kecamatan Marawola Barat

j. Kecamatan Tanambulava

Kawasan Industri di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Sibalaya Utara. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Kulawi. Pada Gambar 4.13 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Tanambulava.

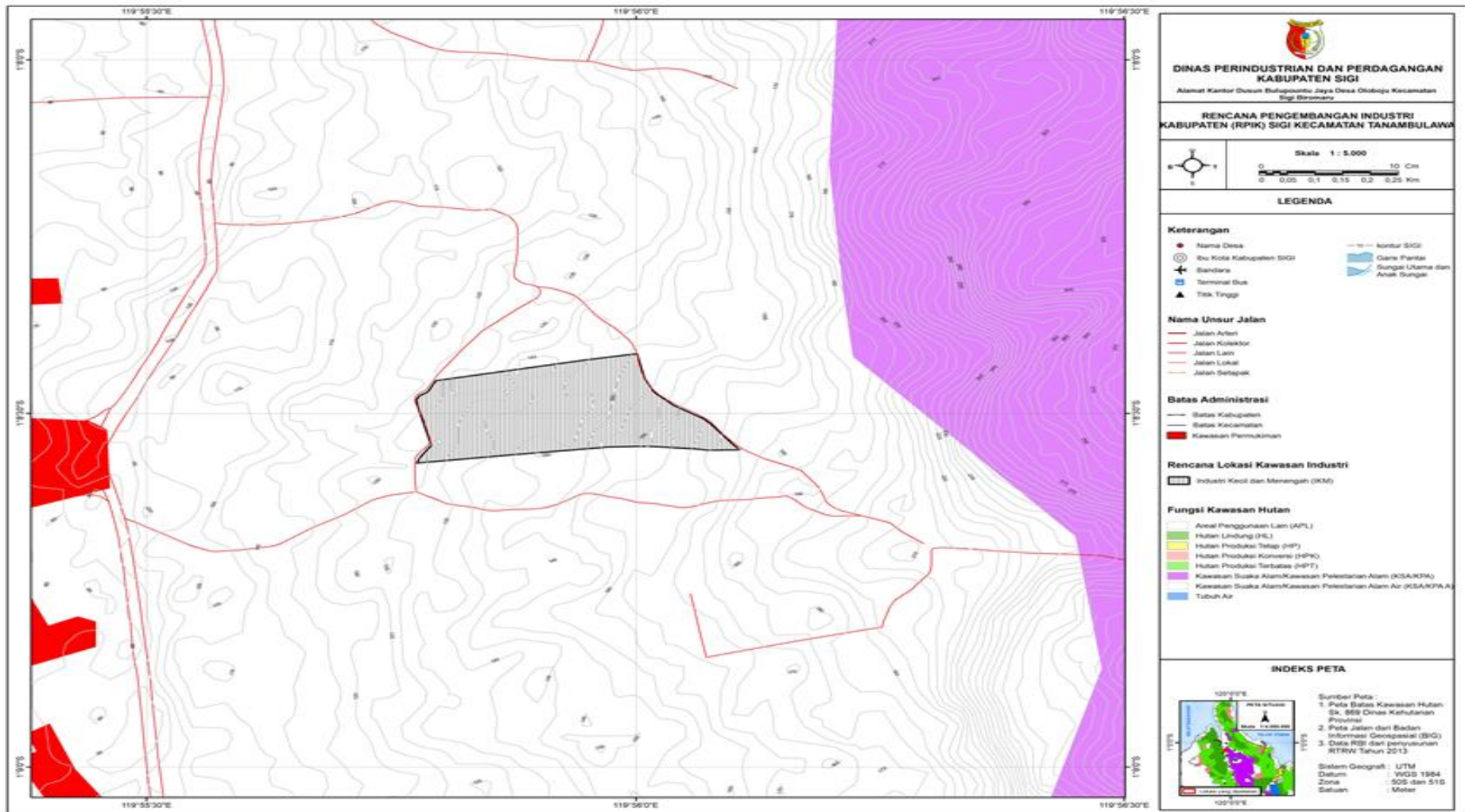
Pada Gambar 4.13 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 10,72 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.28
Lokasi IK Kecamatan Tanambulava

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Sibalaya Utara	P1	119°55'46,46" BT; 01°08'33,91"LS	IK	10,72
		P2	119°56'06,26" BT; 01°08'32,85"LS		
		P3	119°56'00,03" BT; 01°08'24,94"LS		
		P4	119°55'47,66" BT; 01°08'27,09"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Sibalaya Utara dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Tanambulava berupa: Lokasi kebun campuran dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 125-200 m.dpl. Di lokasi IK Desa Sibalaya Utara Kecamatan Tanambulava direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, kerajinan dari hasil hutan dan logam.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tanambulava di Desa Sibalaya Utara didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 5 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 5 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 12 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 1.155 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 1.501,50 ha, kelapa seluas 574 ha; kopi seluas 20 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi dan UPT Balai Besar TNLL yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Tanambulava juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik PLN dan PDAM.



Gambar 4.13. Lokasi KPI Kecamatan Tanambulava

k. Kecamatan Gumbasa

Kawasan Industri di Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Pakuli. Kawasan IKM ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Kulawi. Pada Gambar 4.14 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Gumbasa.

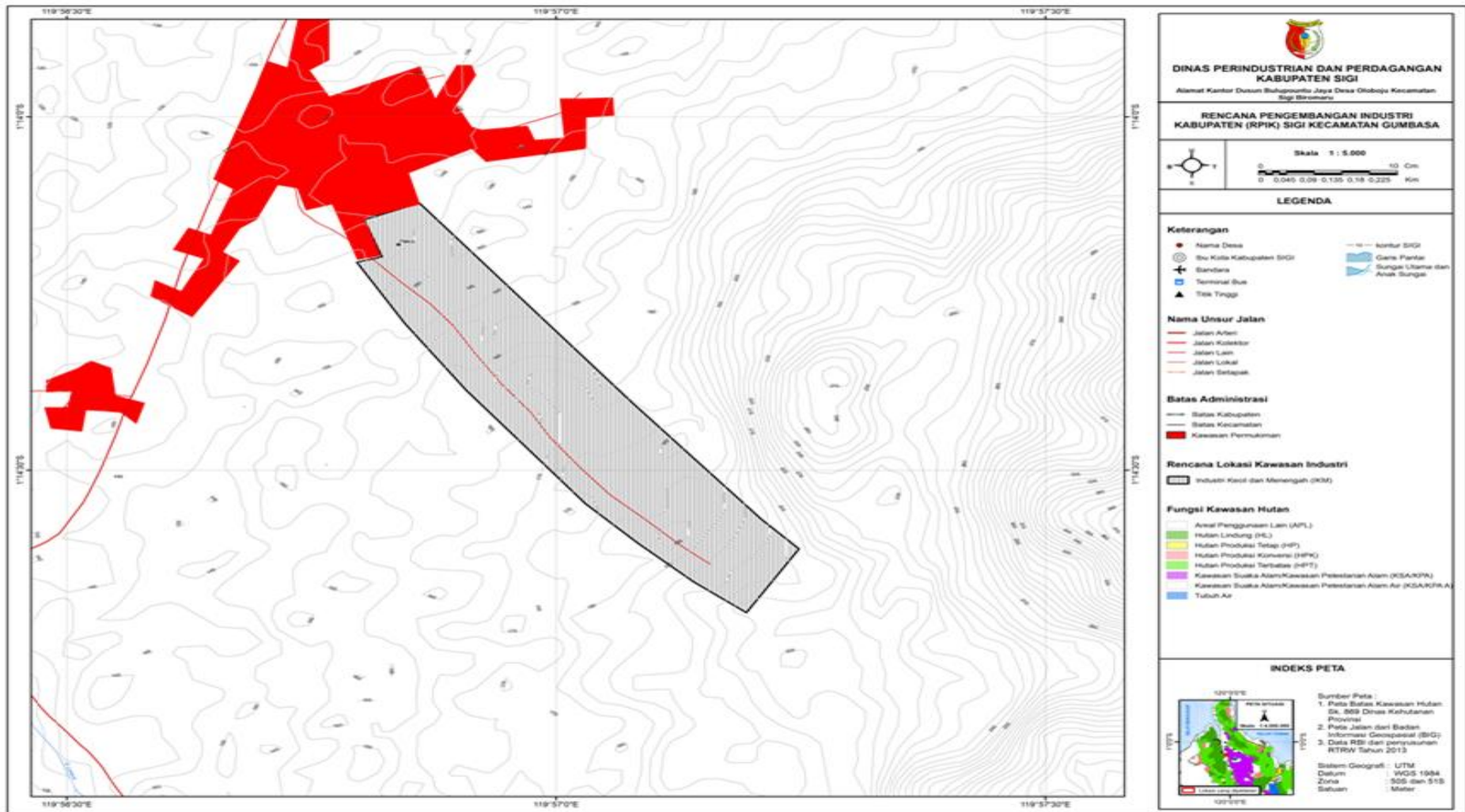
Pada Gambar 4.14 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IKM Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 25,93 ha. Adapun informasi lokasi IKM, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.29
Lokasi IKM Kecamatan Gumbasa

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Pakuli	P1	119°56'48,08" BT; 01°14'12,01"LS	IKM	25,93
		P2	119°56'51,68" BT; 01°14'07,55"LS		
		P3	119°57'13,75" BT; 01°14'43,39"LS		
		P4	119°57'17,68" BT; 01°14'39,46"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IKM Desa Pakuli dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Gumbasa berupa: Lokasi kebun campuran (kakao, dll.), kelapa, dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 125-200 m.dpl. Di lokasi IKM Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa direncanakan untuk sentra industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. Disamping itu, juga direncanakan untuk pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, serta makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gumbasa di Desa Pakuli didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 22 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 5 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 42 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 968 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 1.485 ha, kelapa seluas 595 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi dan UPT Balai Besar TNLL yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, aren, sagu dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IKM di Kecamatan Gumbasa juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik PLN dan PDAM.



Gambar 4.14. Lokasi KPI Kecamatan Gumbasa

1. Kecamatan Kulawi

Kawasan Industri di Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil dan menengah (IKM) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Boladangko. Kawasan IKM ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Gimpu. Pada Gambar 4.15 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Kulawi.

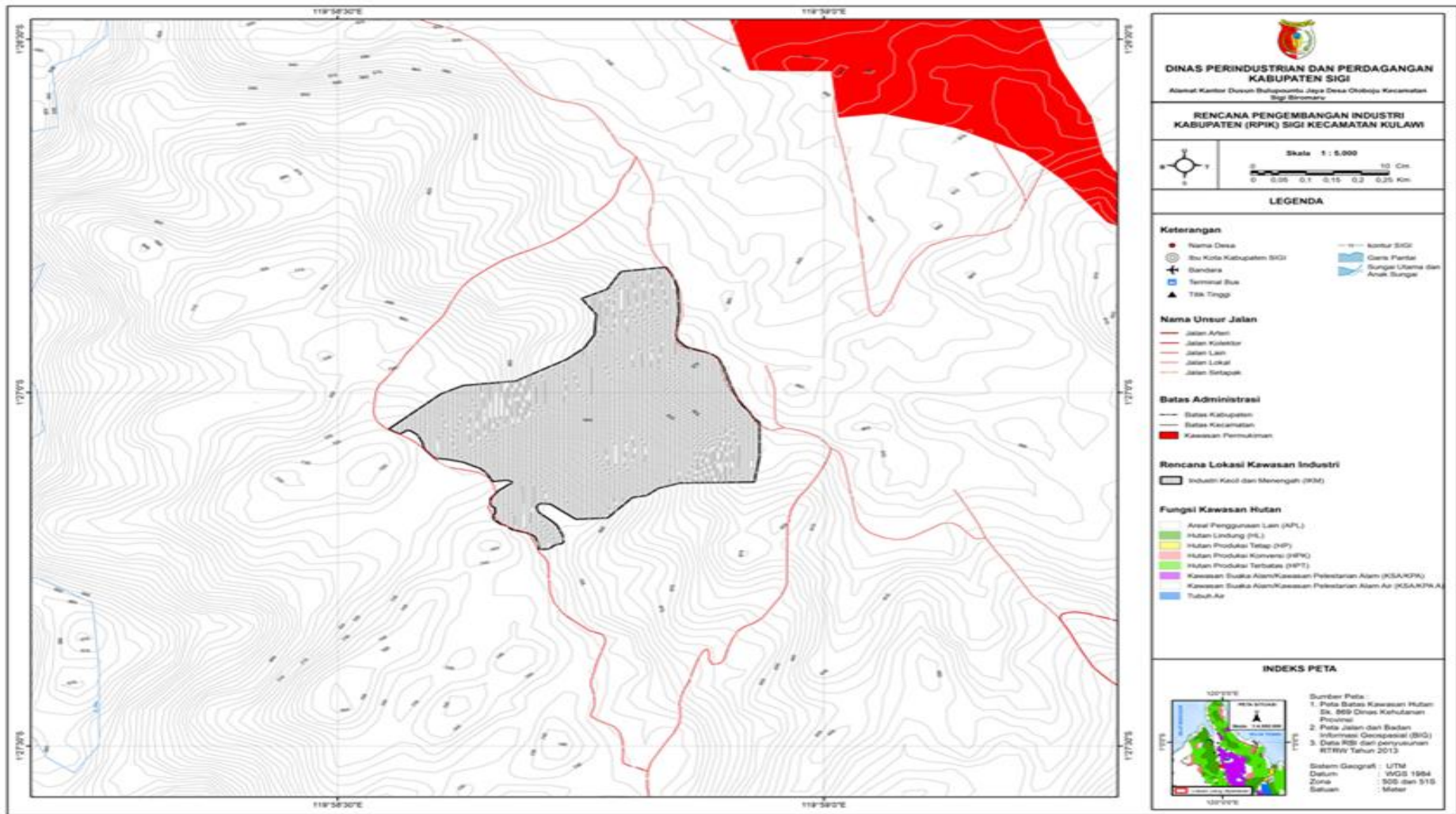
Pada Gambar 4.15 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IKM Desa Boladangko Kecamatan Kulawi terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 25,09 ha. Adapun informasi lokasi IKM, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.30
Lokasi IKM Kecamatan Kulawi

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Boladangko	P1	119°58'55,77" BT; 01°27'02,57"LS	IKM	25,09
		P2	119°58'50,19" BT; 01°26'49,41"LS		
		P3	119°58'32,93" BT; 01°27'02,93"LS		
		P4	119°58'42,23" BT; 01°27'12,94"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IKM Desa Boladangko dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Kulawi berupa: Lokasi kebun campuran (kakao, dll.), permukiman, hutan dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 600-700 m.dpl. Di lokasi IKM Desa Boladangko Kecamatan Kulawi direncanakan untuk pengembangan klaster industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan, kerajinan dari hasil logam dan hasil hutan, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Kulawi di Desa Boladangko didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 8 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 9 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 2 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 575 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 4.442 ha, kelapa seluas 77,50 ha, kopi seluas 1.179,80 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi dan UPT Balai Besar TNLL yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, aren, sagu dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Kulawi juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik PLN dan PDAM.



Gambar 4.15. Lokasi KPI Kecamatan Kulawi

m. Kecamatan Lindu

Kawasan Industri di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Tomado. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Sadaunta-Lindu. Pada Gambar 4.16 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Lindu.

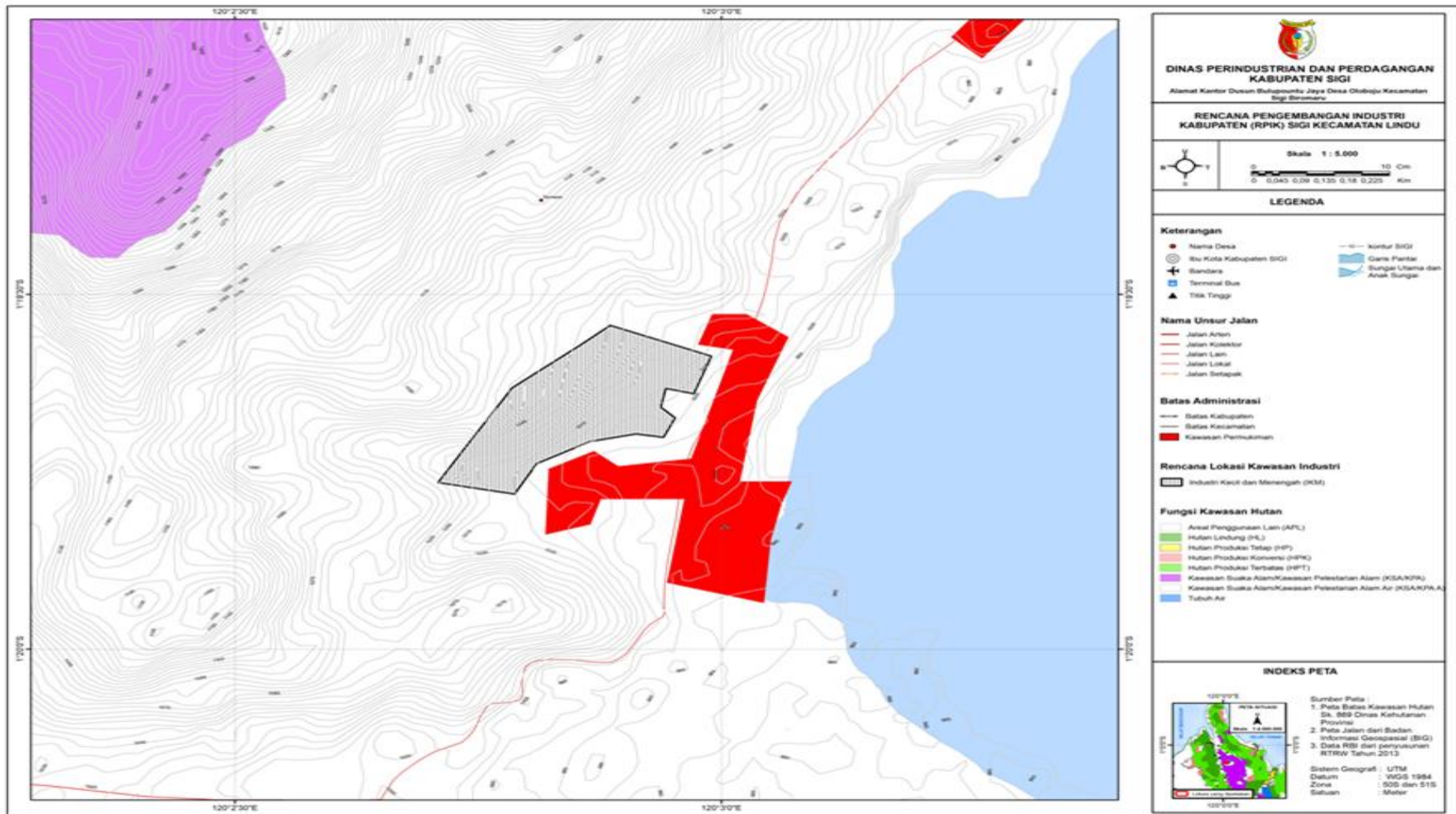
Pada Gambar 4.16 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Tomado Kecamatan Lindu terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil dan Menengah seluas 10,40 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.31
Lokasi IK Kecamatan Lindu

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Tomado	P1	120°02'56,47" BT; 01°19'41,91"LS	IK	10,40
		P2	120°02'59,41" BT; 01°19'35,04"LS		
		P3	120°02'53,22" BT; 01°19'32,47"LS		
		P4	120°02'42,62" BT; 01°19'45,81"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Tomado dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Lindu berupa: Lokasi kebun campuran (kakao, kopi, dll.), permukiman, hutan dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 1.000-1.075 m.dpl. Di lokasi IK Desa Tomado Kecamatan Lindu direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil perikanan darat, industri makanan hasil ikan. Di wilayah ini, juga terdapat industri skala besar Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengolahan hasil perikanan darat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Lindu di Desa Tomado didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 8 buah, dan industri hasil pertanian sebanyak 14 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 1.486 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 918 ha, kopi seluas 574 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, aren dan bambu), dan UPT Balai Besar TNLL yang menyediakan hasil hutan bukan kayu (rotan, aren dan bambu),. Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Lindu juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik swasta dan sumber air bersih.



Gambar 4.16. Lokasi KPI Kecamatan Lindu

n. Kecamatan Kulawi Selatan

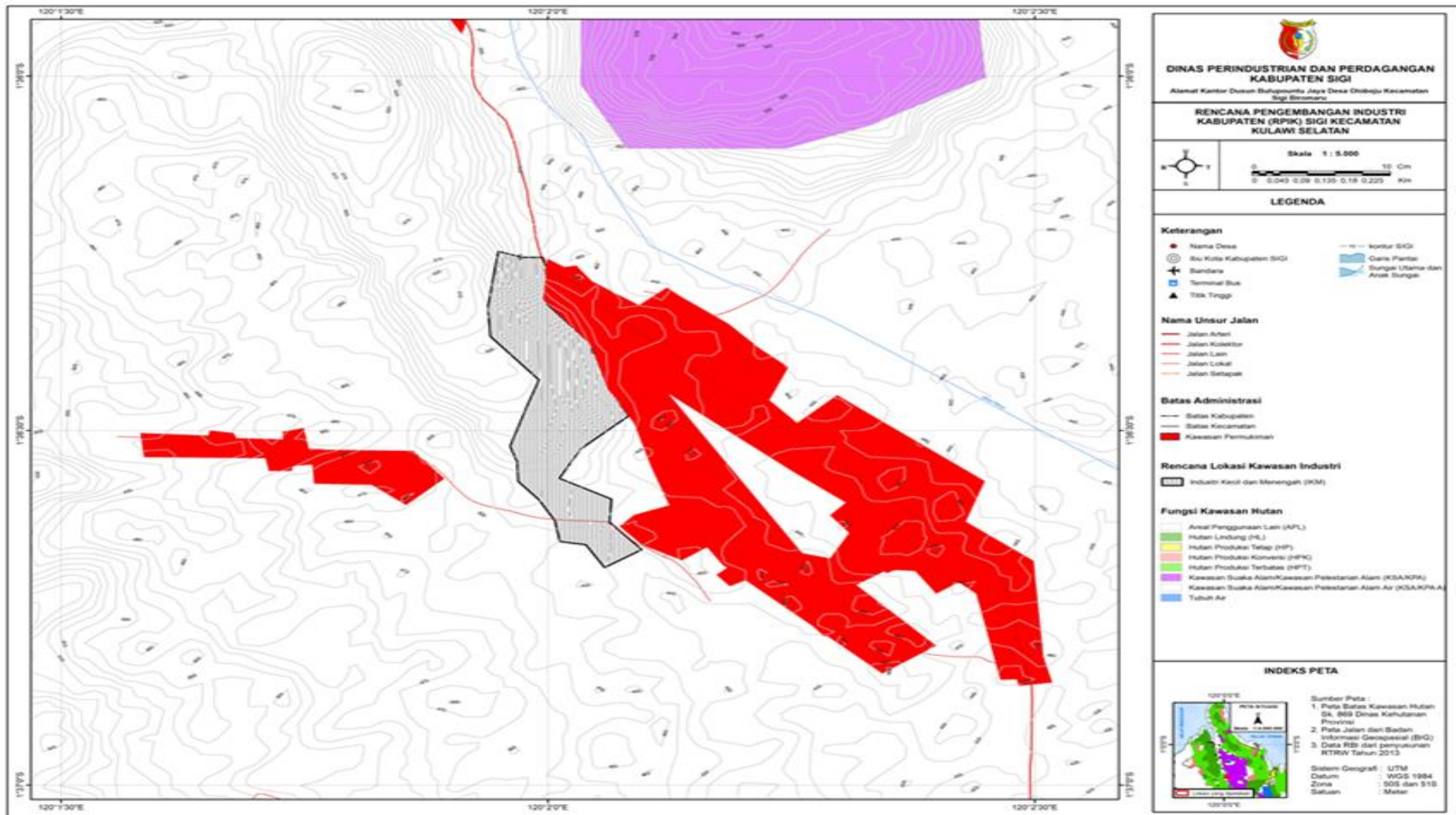
Kawasan Industri di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Lawua-Salutome. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Palu-Gimpu. Pada Gambar 4.17 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Kulawi Selatan. Tampak pada Gambar 4.17 bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Kulawi Selatan terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 10,52 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.32
Lokasi IK Kecamatan Kulawi Selatan

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Lawua-Salutome	P1	120°01'59,62" BT; 01°36'15,06"LS	IK	10,52
		P2	120°01'56,78" BT; 01°36'14,66"LS		
		P3	120°01'57,49" BT; 01°36'31,17"LS		
		P4	120°02'05,62" BT; 01°36'39,64"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Lawua-Salutome dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Kulawi Selatan berupa: Lokasi kebun campuran (kakao, kopi, dll.), hutan, semak belukar dan tanah terbuka. Lokasi ini berada pada ketinggian 450-500 m.dpl. Di lokasi IK Desa Lawua-Salutome Kecamatan Kulawi Selatan direncanakan untuk sentra industri pengolahan hasil pertanian dan hasil hutan. Disamping itu, juga direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil hutan, kerajinan dari hasil hutan dan logam, batako dan batu bata, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Kulawi Selatan di Desa Lawua-Salutome didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 5 buah; industri hasil logam dan aneka sebanyak 5 unit. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 825 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 2.105,20 ha, kelapa seluas 26 ha; kopi seluas 14,50 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi dan UPT Balai Besar TNLL yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, aren, dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Kulawi Selatan juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik dan sumber air bersih.



Gambar 4.17. Lokasi KPI Kecamatan Kulawi Selatan

o. Kecamatan Pipikoro

Kawasan Industri di Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi yang meliputi Industri Kecil (IK) direncanakan lokasinya berpusat di wilayah Desa Peana. Kawasan IK ini berada di sekitar lokasi permukiman serta terdapat jalur transportasi darat Gimpu-Peana. Pada Gambar 4.18 disajikan lokasi Kawasan Peruntukan Industri Kecamatan Pipikoro.

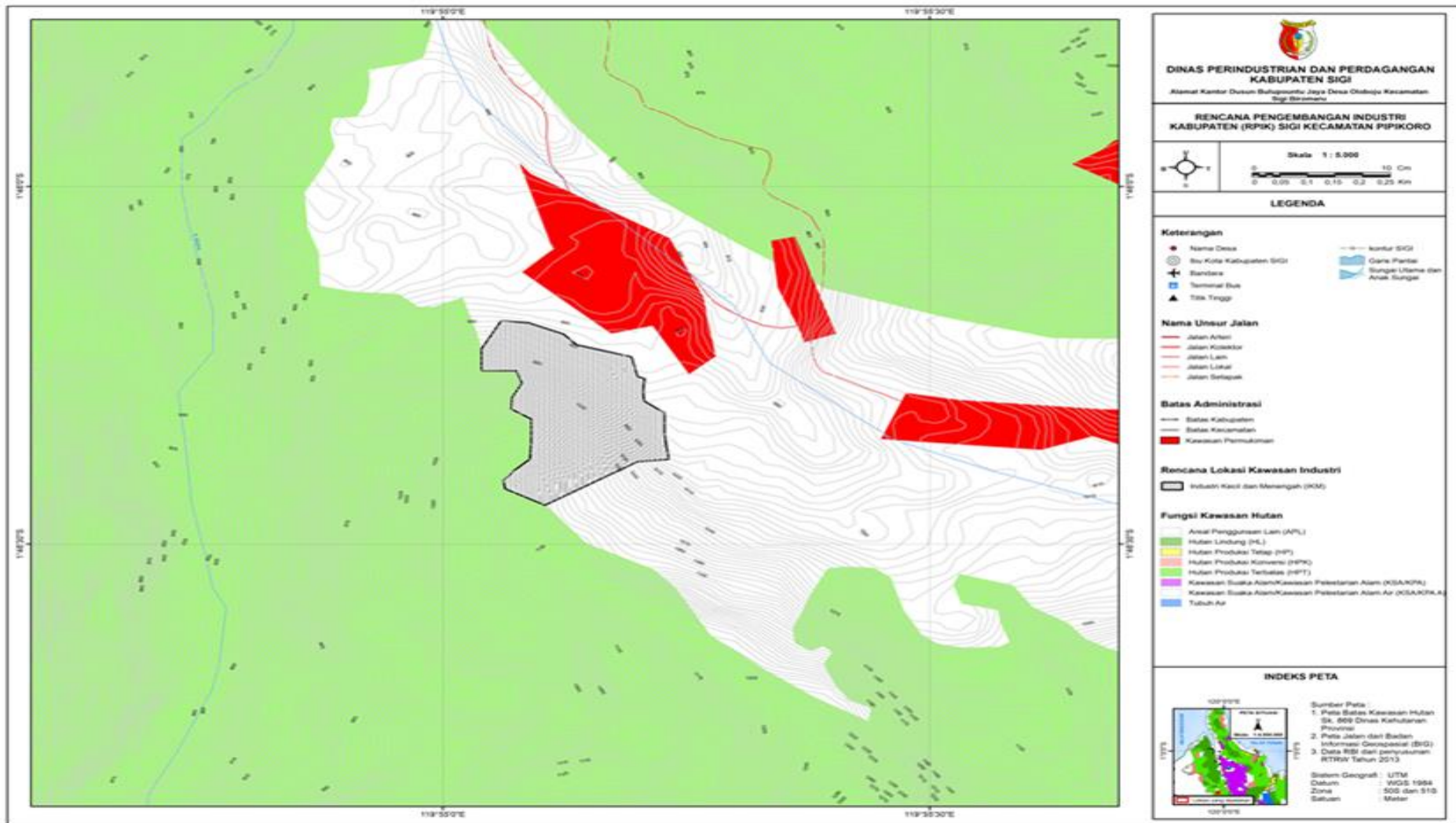
Pada Gambar 4.18 tampak bahwa di lokasi rencana pembangunan kawasan IK Desa Peana Kecamatan Pipikoro terdiri atas alokasi ruang untuk Industri Kecil seluas 10,07 ha. Adapun informasi lokasi IK, secara rinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.33
Lokasi IK Kecamatan Pipikoro

No.	Lokasi/Desa	Koordinat Batas Lokasi		Jenis Industri	Luas (Ha)
1	Peana	P1	119°55'03,59" BT; 01°46'11,32"LS	IK	10,07
		P2	119°55'11,55" BT; 01°46'14,32"LS		
		P3	119°55'13,89" BT; 01°46'22,91"LS		
		P4	119°55'06,29" BT; 01°46'25,74"LS		

Jenis penggunaan lahan saat ini di lokasi IK Desa Peana dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Pipikoro berupa: Lokasi kebun campuran (kakao, kopi, dll.), permukiman, hutan, sawah dan semak belukar. Lokasi ini berada pada ketinggian 900-1.000 m.dpl. Di lokasi IK Desa Peana Kecamatan Pipikoro direncanakan untuk pengembangan industri pengolahan hasil hutan dan pertanian, kerajinan dari hasil kayu dan rotan, makanan/minuman.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sigi tahun 2017, rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pipikoro di Desa Peana didukung oleh keberadaan industri hasil hutan, kerajinan dan bangunan sebanyak 1 buah, industri hasil logam dan aneka sebanyak 2 unit, dan industri hasil pertanian sebanyak 4 buah. Selanjutnya sumberdaya pendukung meliputi: Pertanian sawah seluas 530 ha; perkebunan rakyat (kakao seluas 2.352 ha, kopi seluas 639 ha); dan keberadaan UPT KPH Kulawi yang menyediakan hasil hutan kayu dan bukan kayu (rotan, aren, getah damar dan bambu). Rencana pembangunan kawasan IK di Kecamatan Pipikoro juga ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana wilayah seperti transportasi darat, listrik dan sumber air bersih.



Gambar 4.18. Lokasi KPI Kecamatan Pipikoro

4.2.4 Pembangunan Sumber Daya Industri.

4.2.4.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

1. Ruang Lingkup Pembangunan SDM Industri.

Untuk melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Sigi dibutuhkan, pembangunan sumber daya manusia Industri meliputi;

- a. Wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- b. Mendukung program **Santripreneur** berbasis pesantren dalam menghasilkan wirausaha baru di Kabupaten Sigi.
- c. Tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri);
- d. Pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri); dan
- e. Konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Program pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan:

- a. Menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan dalam sentra industri kecil menengah dan Kawasan industri;
- b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Industri;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor Industri; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, maka perlu dibangun infrastruktur kompetensi yang meliputi :

- a. Tersedianya perangkat penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri;
- b. Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- c. Tersedianya lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- d. Tersedianya lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- e. Tersedianya perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang memberikan fasilitas pemagangan industri; dan
- f. Tersedianya tenaga asesor kompetensi.

2. Program Pembangunan SDM Industri.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pembangunan SDM Industri Kabupaten Sigi yang disusun untuk periode 2019-2023, 2024-2028 dan periode 2029-2039 sebagai berikut:

Tabel 4.34
Program Pembangunan SDM Industri
Kabupaten Sigi Tahun 2019–2039

No.	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Mendorong dan memfasilitasi berdirinya sekolah vokasi Kabupaten berbasis industri Prioritas daerah	√		
2	Fasilitasi Program SantriPreneur dalam mendorong wirausaha baru IKM berbasis pesantren di Kab. Sigi	√	√	√
3	Pembinaan tenaga kerja berbasis kompetensi dalam bentuk pelatihan, workshop dan Vokasi	√	√	√
4	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis Kompetensi oleh Pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten)	√	√	
5	Koordinasi dengan OPD terkait dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Industri Prioritas daerah	√	√	
6	Membangun kerjasama Perguruan Tinggi Univ, Tadulako, STIE Panca Bhakti dan Univ swasta lainnya didalam menyiapkan SDM yang siap pakai..	√	√	√
7	Sinergisitas Pemerintah dan swasta didalam menyiapkan SDM Industri yang maju dan berdaya saing	√	√	√
8	Menumbuh kembangkan konsultan industri bersertifikasi nasional		√	√
9	Pelatihan pembuatan kemasan bagi produk industri pangan olahan	√	√	
10	Pelatihan keamanan pangan (PKP) bagi pelaku IKM	√		

No.	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
11	Bimbingan dan Pelatihan pemasaran platform digital (Online) bagi Pelaku IKM (<i>e-Smart IKM</i>)	√		

4.2.4.2 Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA).

1. Ruang Lingkup Pemanfaatan. Penyediaan dan Penyaluran SDA.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Pemerintah Kabupaten Sigi didalam meningkatkan ketersediaan bahan baku industri, khususnya industri pangan maka Program Pemanfaatan. Penyediaan dan Penyaluran SDA ini akan disinergikan dengan Program RPKP Kawasan perdesaan Agrowisata “Magaya” dan program Prioritas Sigi Hijau. Pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Sigi merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif berbasis komoditi.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dilakukan melalui: (a) Penghematan, (b) Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan (c) Optimasi kinerja proses produksi. Sedangkan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dilakukan melalui: (a) pengurangan limbah, (b) penggunaan kembali, (c) pengolahan kembali, dan (d) pemulihan.

2. Program Pengembangan Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri di Kabupaten Sigi, maka diperlukan

program pengembangan yang disusun untuk periode 2019-2023, 2024-2028 dan periode 2029-2039 sebagai berikut.

Tabel 4.35
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran
Sumber Daya Alam Kabupaten Sigi
Tahun 2019-2039

No.	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik.	√	√	√
2	Menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri dengan dukungan untuk program koordinasi lintas OPD dan intensifikasi (peningkatan (Produktifitas), rejuvenasi (peremajaan), dan ekstensifikasi yang berwawasan lingkungan melalui program Bersama OPD terkait.	√	√	√
A	Koordinasi lintas OPD dalam menjamin ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku industri	√	√	√
B	Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif) kerjasama OPD Terkait	√	√	
C	Koordinasi OPD terkait dalam Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan Pupuk bagi petani	√	√	
d	Mendukung Program Pengendalian hama dan penyakit tanaman	√	√	
e	Mendukung fasilitasi alat tangkap nelayan dan budidaya intensif perikanan melalui OPD terkait	√	√	

No.	Program	Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
f	Pemantapan dan pengembangan jaringan infrastruktur logistik sumber daya alam;	√		
g	Pemantapan Penanganan budidaya dan pasca panen sumberdaya alam pertanian dan perkebunan	√	√	√
3	Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani (ke sumber-sumber bahan baku industri) dan jaringan pengairan	√	√	
4	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	√	√	√
a	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	√	√	
b	Koordinasi Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	√	√	
c	Monitoring hasil dan standarisasi	√	√	√
5	Koordinasi dan dukungan Program Pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksplotasi sumberdaya alam	√	√	√

4.2.4.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

1. Ruang Lingkup Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian serta efiseinsi produk industri di Kabupaten Sigi. Penguasaan teknologi tidak hanya pada proses produksi akan tetapi pemanfatan tehnologi dilakukan untuk mencapai pasar yang lebih luas dan masiv melalui platform digital. dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

2. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Perusahaan industri didorong dan diarahkan untuk melakukan pemetaan, evaluasi, uji coba, adopsi, dan adaptasi teknologi

industri yang diperlukannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Program Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk masing-masing industri Prioritas secara bertahap periode 2019-2023, 2024-2028 dan periode 2029-2039 diuraikan sebagai berikut .

Tabel 4.36
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
Industri Prioritas Kabupaten Sigi
Tahun 2019-2039

No.	Program	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Peningkatan sinergi program kerjasama perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah provinsi Sulteng, lembaga riset untuk menghasilkan produk litbang yang aplikatif dan terintegrasi bagi pengembangan produk Prioritas Kabupaten Sigi khususnya industri pengolahan pangan dan hulu Agro	√	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru Bagi IKM Prioritas kabupaten Sigi	√	√	
3	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri Prioritas daerah.	√	√	√
4	Peningkatan transfer teknologi IKM Kabupaten Sigi.	√	√	
5	Mendorong Investasi swasta terutama bagi industri menengah yang berorientasi ekspor di Kabupaten Sigi (industri pengolahan Ikan air Tawar dan olahan pangan lainnya)	√	√	√
6	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah IKM Prioritas daerah	√		

No.	Program	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
7	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi Tepat Guna pada IKM	√	√	√
8	Penerapan standar mutu dan keamanan pangan (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan	√	√	
9	Fasilitasi peralatan industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	√	√	√
11	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan dgn Universitas Tadulako dan Univ. swasta lainnya	√	√	√
12	Pelatihan pemasaran produk industri dan penyiapan starup menuju e-smart IKM (penjualan Online)	√	√	√
13	Fasiltasi Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran platform digital (<i>e-Smart IKM</i>)	√	√	

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi bagi pengembangan industri di Kabupaten Sigi, maka diperlukan program pengembangan yang disusun untuk periode tahun 2019-2023, 2024-2028 dan periode 2029-2039 sebagai berikut:

4.2.4.4 Penyediaan Sumber Pembiayaan.

1. Lingkup Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Pemenuhan kebutuhan investasi tersebut dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan sumber pembiayaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha Industri kecil dan menengah (IKM) tersebut.

2. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung pembiayaan pengembangan industri di Kabupaten Sigi, maka diperlukan program pengembangan yang disusun untuk periode tahun 2019-2023, 2024-2028 dan periode tahun 2029-2039 sebagai berikut.

Tabel 4.37
Program Pembiayaan Pengembangan Industri Kabupaten Sigi
Tahun 2019–2039

No.	Program	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan usaha yang kompetitif	√	√	√
2	Menjalin kerjasama dengan BUMN/Bank SULTENG/ Swasta dalam pemanfaatan dana <i>corporate social responsibility</i> (CSR) bagi pembiayaan usaha industri	√	√	
3	Fasilitasi penyediaan fasilitas KUR bagi IKM dengan bunga rendah;	√	√	√
4	Fasilitasi pemberian subsidi bunga pinjaman bagi industri, khususnya industri Prioritas;	√	√	√
5	Fasilitasi pemerintah untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif; dan	√	√	√
6	Fasilitas akses pembiayaan kepada IKM dalam rangka memperoleh modal investasi dan modal kerja berupa penyediaan informasi skema pembiayaan, baik perbankan maupun non perbankan dan penyusunan Studi Kelayakan.	√	√	√
7	Mengadakan pelatihan /pendampingan penyusunan proposal kelayakan usaha yang <i>bankable</i>	√	√	√
8	Fasiltasi Dukungan BUMDEs didalam pembiayaan IKM Desa	√	√	

4.2.5 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri, meliputi energi dan lahan kawasan industri.

4.2.5.1 Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Sigi yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi, khususnya bersumber dari listrik. Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sigi meliputi:

Tabel 4.38
Program Penyediaan Energi Listrik Kabupaten Sigi Tahun 2019–2039

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1.	Koordinasi antar pemerintah kabupaten Sigi dengan pemerintah Provinsi Sulteng, kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung sarana dan prasarana industri;	√	√	√
2.	Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik secara bertahap untuk mendukung Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) Sigi;	√	√	
3.	Fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan	√	√	√
4	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Listrik	√	√	

4.2.5.2 Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah (a) memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun, (b) jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah, (c) tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau (d) kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Program penyediaan lahan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri meliputi:

Tabel 4.39
Program Penyediaan Lahan Industri Kabupaten Sigi
Tahun 2019–2039

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2023-2028	2029-2038
1.	Koordinasi antara Pemerintah, masyarakat dan kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan dan status lahan sentra IKM;	√	√	
2.	Penyusunan rencana pembangunan/pengembangan kawasan industri (SIKIM), termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (<i>masterplan</i>);	√	√	
3	Penyediaan lahan melalui pembangunan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan industri;	√	√	√
4.	Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah bagi pembangunan/perluasan kawasan industri dan SIKIM	√	√	

4.2.5.3 Sumberdaya Air, Telekomunikasi dan Perhubungan.

Penambahan lahan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri ini perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana diantaranya:

- a. Pembangunan jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan transmisi data dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan industri di kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; dan
 - b. Perhubungan dilakukan untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik meliputi pembangunan jalan, Pembangunan jaringan jalan meliputi pembangunan jalan baru maupun perbaikan atau peningkatan kualitas jalan dari dan menuju kawasan peruntukan industri dan kawasan industri. Pembangunan jalan trans Palu-Kulawi-Sulawesi Barat untuk mendukung logistik antar pulau dan kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri dengan volume angkut yang besar.
- Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyediaan kebutuhan, air baku, telekomunikasi, dan perhubungan dilakukan melalui program pengembangan sebagai berikut

Tabel 4.40
Program Penyediaan Sumberdaya Air, Telekomunikasi dan Perhubungan Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2023-2028	2029-2038
1.	Koordinasi antar Pemerintah Kab. Sigi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, serta kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan air baku, Listrik, telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri;	√	√	√
2	Koordinasi dan fasilitasi Pembangunan jalan trans Palu-Kulawi-Sulbar mendukung logistik antar pulau dan kegiatan ekspor/impor dalam pengangkutan bahan baku dan produk-produk industri	√	√	

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2023-2028	2029-2038
3.	Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah Prov Sulteng serta Kementerian Kominfo dlm pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri ;	√	√	
4.	Pembangunan/ penyediaan dan Peningkatan kualitas jaringan distribusi, air baku khususnya pada Kecamatan yang memiliki keterbatasan air bersih dan mendukung Tumbuhnya IKM Kab. Sigi	√	√	

4.2.5.4 Sistem Informasi Industri Daerah.

1. Lingkup, Tujuan dan Sasaran.

Dalam upaya peningkatan daya saing industri daerah, salah satu aspek yang berpengaruh adalah sistim informasi industri. Sistim informasi industri meliputi sistim informasi pasar, bahan baku, teknologi, pembiayaan serta sumber daya lainnya.

Pembangunan sistem Informasi Industri daerah di Kabuptem Sigi bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/ pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan sistim informasi industri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri di Kabupaten Sigi.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan sistim informasi industri di Kabupaten Sigi meliputi:

- a. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara offline dan *online*;

- b. Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. Terkoneksinya dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah,;
- f. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

2. Program Pengembangan

Dalam rangka pengembangan sistim informasi di Kabupaten Sigi, maka diperlukan program pengembangan yang disusun untuk periode tahun 2019-2039 sebagai berikut:

Tabel 4.41
Program Penerapan Sistem Informasi Industri Kabupaten Sigi
Tahun 2019-2039

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
1.	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulteng, Kementerian Perindustrian serta pihak terkait dalam penyiapan sistem, perangkat keras, perangkat lunak dan SDM;	√	√	
2.	Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak utk dinas didalam pengolahan data;	√		
3.	Pelatihan operator pengelola sistem informasi industri;	√	√	√
4.	Verifikasi data IKM Sigi melalui Pengumpulan, pengolahan dan analisis data IKM;	√		

No.	Program Pengembangan	Periode Tahun		
		2019-2023	2024-2028	2029-2039
5.	Penyajian data secara on line; dan	√	√	√
6.	Interkoneksi dengan <i>stakeholder</i> terkait.	√	√	√

4.2.6 Pemberdayaan Industri

Pengembangan Industri kecil dan menengah di Kabupaten Sigi dapat mendorong tumbuhnya nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan petani dan pekerja disektor lainnya. Pemerintah Kabupaten Sigi mendorong pemberdayaan industri kecil dan menengah yang ada di seluruh baik yang telah maju, berkembang melalui kebijakan yang berpihak pada IKM. Berbagai bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan seperti berikut ini:

1. Peningkatan kompetensi para peserta pelatihan dan kompetensi instruktur pelatihan
2. Peningkatan daya tampung pelatihan melalui perbaikan sarana dan prasarana
3. Sertifikasi kompetensi
4. Bantuan mesin dan peralatan yang relevan berdasarkan need assessment, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna
5. Penyediaan sarana promosi (dalam bentuk event atau expo)
6. Fasilitasi akses pasar dan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri
7. Menciptakan kemudahan bagi IKM untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan sehingga IKM bankable
8. Membentuk kawasan sentra IKM

BAB 5

PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK) KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 - 2039

Visi dua puluh tahun Kabupaten Sigi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2005–2025, yaitu ***Pertanian Konservasi Sumberdaya Alam Dan Berbudaya***. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) telah mengamanatkan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan melalui 4 tahapan selama 20 tahun 12 Misi pembangunan daerah. Adapun Misi Terkait langsung dengan pembangunan perekonomian, tanpa mengesampingkan misi lainnya, adalah misi ke-1 yaitu Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi dan diikuti Misi-3 yaitu : Peningkatan dan pengembangan koperasi dan UKM/IKM sebagai bagian dari pilar ekonomi. Dengan harapan pada akhir periode 20 tahun pembangunan Kabupaten Sigi peran UKM/IKM berkontribusi nyata didalam memajukan ekonomi daerah selain sektor pertanian sebagai pilar ekonomi.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi Tahun 2019-2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPD Kabupaten Sigi 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2021, dan menjadi dasar dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2020-2025 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIK Kabupaten Sigi menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di Kabupaten Sigi serta Rencana Strategi PD Perindustrian Kabupaten Sigi. Selain sebagai dasar penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sigi sebagai pedoman bagi seluruh *stakeholder* dalam

melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat khususnya Pelaku usaha Industri.

Semoga usaha perwujudan dari rencana pembangunan industri Kabupaten Sigi selama 20 tahun ke depan terjadi dalam sinergi dan keharmonisan seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pada sisi lain dokumen ini diharapkan dapat berguna bagi para pelaku IKM dan sektor Industri dalam memajukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Sigi melalui sinkronisasi kebijakan Industri antara Pusat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi, sekaligus dokumen ini mampu menerjemahkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sigi khususnya dibidang Industri. Sehingga pada akhirnya berkontribusi bagi elemen-elemen kemajuan industri Sulawesi Tengah dan Nasional.

B U P A T I S I G I

MOHAMAD IRWAN, S.Sos, M.Si

